



Suyatni  
Henry Hendrastuti

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI

2

Suyatni  
Henry Hendrastuti

# Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas XI



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN  
Kementerian Pendidikan Nasional



2

# **Pendidikan Kewarganegaraan**

**Untuk SMA/MA Kelas XI**

**Suyatmi**

**Henny Hendrastuti**



**Pusat Kurikulum dan Perbukuan**  
Kementerian Pendidikan Nasional

**2**

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional  
Dilindungi Undang-Undang.

# Pendidikan Kewarganegaraan

## Untuk SMA/MA Kelas XI

**Penulis** : Suyatmi  
Henny Hendrastuti

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm

Suyatmi

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Suyatmi, Henny Hendrastuti. --  
Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional,  
2011.

viii; 231 hlm.: foto.; 25 cm.

untuk SMA/ MA/ Kelas XI

Bibliografi: hlm. 218

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (No. Jil Lengkap)

ISBN 978-979-095-675-9 (jil. 2.1)

1. Kewarganegaraan --Studi dan Pengajaran I. Judul

II. Henny Hendrastuti

323.607

Hak cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan  
Nasional dari Penulis Suyatmi dan Henny Hendrastuti

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

**Bebas digandakan sejak November 2010 s.d November 2025.**

Diperbanyak oleh ...

# Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/ penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri sehingga dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun buku ini.

Buku materi kewarganegaraan (citizenship) ini disusun menurut kebutuhan pembelajaran. Buku ini menyajikan materi yang sesuai dengan keadaan masyarakat, bangsa, dan negara yang telah mengalami perubahan akibat perkembangan zaman. Buku ini juga memuat isu-isu sentral yang banyak menjadi perbincangan khalayak umum, seperti demokrasi, HAM, penegak hukum, dan lain-lain.

Dalam buku ini, uraian materi disajikan mengarah pada pemenuhan kompetensi peserta didik, sehingga guru mampu mengembangkan peserta didiknya menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan negara yang demokratis. Kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik memiliki dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, memiliki keterampilan kewarganegaraan, menghayati atau mengembangkan karakter kewarganegaraan yang baik dan bertanggung jawab, serta mampu menerapkan sikap sebagai warga negara yang baik.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik terhadap keberadaan media pembelajaran. Melalui buku ini, peserta didik dapat kreatif menangkap dan mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan hingga mampu menjadi warga negara yang baik.

Buku ini diharapkan bermanfaat bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan sikap kewarganegaraan secara menyenangkan. Kritik dan saran, penyusun harapkan bagi penyempurnaan buku ini. Terima kasih.

Surakarta, Maret 2010

Penulis

# Pendahuluan

Buku **Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI** ini merupakan salah satu media pembelajaran bagi peserta didik. Buku ini memuat rangkaian pembelajaran, mulai dari uraian materi hingga evaluasi. Di dalam uraian materi, buku ini dilengkapi dengan berbagai macam komponen pendukung pembelajaran.

Secara keseluruhan, buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI ini memuat dua aspek pokok dalam pembelajaran kewarganegaraan, yaitu teori sebagai bahan kajian pemahaman peserta didik mengenai kewarganegaraan serta berbagai bentuk penugasan yang menunjang peserta didik untuk mengembangkan pemahaman. Komponen penunjang dalam buku ini berupa penugasan maupun informasi penting yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.

Berikut ini uraian singkat mengenai isi buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI.

## ➤ Peta Konsep

*Peta Konsep* dibuat pada setiap bab. *Peta Konsep* merupakan pemetaan materi yang harus dipelajari setiap bab.



## ➤ Kata Kunci

*Kata Kunci* merupakan daftar kata-kata penting yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.

### **Kata Kunci**

- Budaya
- Partisipasi
- Sosialisasi
- Partisipan

## ➤ Uraian Materi

*Uraian Materi* memuat keseluruhan teori dan pemahaman yang diperlukan peserta didik. Uraian Materi disusun sesuai perkembangan peserta didik dengan bahasa yang mudah, lugas, dan efektif.

### **Hakikat Budaya Politik**

Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut, budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik.

## ➤ Aktivitas Mandiri

*Aktivitas Mandiri* berupa bentuk penugasan secara mandiri. Aktivitas Mandiri merupakan bagi peserta didik untuk melakukan analisis dan observasi suatu permasalahan secara mandiri.

### **Aktivitas Mandiri**

*Coba Anda cari konsep dan pengertian budaya politik selain yang tercantum dalam materi! Cari melalui surat kabar, majalah, internet, atau media lain. Buatlah rangkuman dari hasil studi pustaka Anda!*

## ➤ Arena Diskusi

*Arena Diskusi* berupa bentuk penugasan yang melatih peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan secara kelompok. Melalui Arena Diskusi, peserta didik dapat mengomunikasikan pendapat secara lisan, mendengarkan pendapat orang lain, serta menyimpulkan berbagai pendapat.

### **Arena Diskusi**

*Coba baca penggalan artikel berikut ini bersama kelompok Anda!*

#### **Pola Tindakan Politik**

Konsep dalam masyarakat Jawa membentuk pola "tindak-tanduk yang wajar" yang berupa pengendalian emosi dan pembatasan ambisi serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan yang "kasar".

Elemen yang tampak dualistik, berakar pada tradisi kehidupan militer dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya titik berat antara kedua tradisi bersifat kontradiktif. Tradisi militer mengutamakan hierarki dan komando yang ketat, segala gerak dan tindakan dibatasi. Militer juga menitikberatkan suasana penciptaan keamanan fisik.

Sumber: one.indoskripsi.com

### ➤ Info Khusus

*Info Khusus* merupakan komponen penunjang yang memuat berbagai macam informasi tambahan. Info Khusus berfungsi menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik.

#### Info Khusus

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan politik timbul dari hubungan antara individu yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kebersamaan timbul dari proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang kekuasaan secara alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila dibandingkan dengan hubungan yang terdapat di masyarakat Barat.

Sumber: [www.politikita.co](http://www.politikita.co)

### ➤ Tokoh

*Tokoh* memuat informasi mengenai tokoh yang berpengaruh dalam teori kewarganegaraan.

#### Tokoh

##### GABRIEL ALMOND



Gabriel A. Almond (12 Januari 1911 - 25 Desember 2002) merupakan ilmuwan politik dari Amerika Serikat. Ia terkenal karena karya pionir di bidang perbandingan politik, perkembangan politik, dan budaya politik.

Almond lahir di Rock Island, Illinois. Ia merupakan putra imigran dari Rusia dan Ukraina. Di masa dewasa, Almond kuliah di Universitas Chicago, hingga menyelesaikan program pascasarjana.

Selesai kuliah, Almond bekerja di Harold Lasswell. Almond menyelesaikan Ph.D. pada tahun 1938, dengan disertasi doktornya yang berjudul *Plutokrasi dan Politik di New York City*, tetapi tidak dipublikasikan hingga tahun 1998.

Sumber: [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

### ➤ Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-Nilai Pancasila memuat kandungan nilai Pancasila dalam materi setiap bab. Melalui Nilai-Nilai Pancasila, peserta didik mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.

#### Nilai-Nilai Pancasila

Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.

### ➤ Potret Nusantara

Potret Nusantara memuat kutipan artikel tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia atau peristiwa internasional yang melibatkan Indonesia. Potret Nusantara memberikan gambaran berbagai macam fenomena kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia atau fenomena kewarganegaraan yang melibatkan negara di dalam pergaulan internasional.

#### Potret Nusantara

##### Pembangunan Demokrasi Pemantapan Pendidikan Politik Perkuat Karakter Bangsa

Suara Karya, Senin, 23 Agustus 2010

JAKARTA. Dalam kesempatan tersebut, Suwarno mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang berlangsung damai di sejumlah daerah. Menurut dia, pilkada damai dan demokratis menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan pendidikan politik.

"Dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, bermartabat, dan demokratis, ke depan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, karena memiliki banyak kelebihan dalam bermokrasi," katanya.

Sumber: Suara Karya

### ➤ Refleksi

Refleksi merupakan simpulan singkat materi yang telah dipelajari serta bahan renungan bagi peserta didik berkaitan dengan materi.

#### Refleksi

Kehidupan politik di suatu negara sangat tergantung dari perilaku warga masyarakatnya dalam berperan dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan politik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan masyarakat partisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya.

### ➤ Evaluasi

Evaluasi merupakan media untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Terdapat tiga bentuk Evaluasi, yaitu Uji Kemampuan, Uji Kreativitas, dan Studi Kasus. Uji Kemampuan melatih ranah kognitif peserta didik, Uji Kreativitas dan Studi Kasus melatih ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.

# Daftar Isi

<b>Kata Sambutan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab 1 Budaya Politik di Indonesia .....</b>	<b>1</b>
A. Hakikat Budaya Politik .....	3
B. Macam-Macam Budaya Politik .....	9
C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik .....	13
D. Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan .....	21
<b>Bab 2 Budaya Demokrasi menuju Masyarakat Madani .....</b>	<b>37</b>
A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi .....	39
B. Masyarakat Madani .....	50
C. Sistem Politik Demokrasi Pancasila .....	60
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia .....	67
E. Perilaku Budaya Demokrasi .....	75
<b>Bab 3 Keterbukaan dan Jaminan Keadilan .....</b>	<b>85</b>
A. Pengertian Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	87
B. Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	94
C. Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan .....	99
D. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara .....	105
<b>Latihan Semester 1 .....</b>	<b>119</b>
<b>Bab 4 Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional .....</b>	<b>123</b>
A. Pengertian Hubungan Internasional .....	125
B. Pengertian Perjanjian Internasional dan Tahap-Tahap Perjanjian Internasional .....	131
C. Fungsi Perwakilan Diplomatik .....	138
D. Peranan Organisasi Internasional dalam Meningkatkan Hubungan Internasional ...	144
E. Mendukung Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia .....	155
<b>Bab 5 Sistem Hukum dan Peradilan Internasional .....</b>	<b>165</b>
A. Sistem Hukum Internasional .....	167
B. Sistem Peradilan Internasional .....	186
C. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian oleh Mahkamah Internasional .....	190
<b>Latihan Semester 2 .....</b>	<b>211</b>



<b>Glosarium .....</b>	<b>215</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>218</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>220</b>
<b>Kunci Jawaban .....</b>	<b>222</b>

# Bab

# 1

## Budaya Politik di Indonesia

### Pendahuluan

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah politik. Keterlibatan manusia dalam politik dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan politik menjadi bagian proses yang dilakukan warga negara. Setiap warga negara memiliki aspirasi dalam bidang politik. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, maupun pemilihan wakil rakyat.

Dalam bentuk lain, kegiatan politik warga negara diwadahi dalam sebuah organisasi yang disebut partai politik. Di dalamnya, setiap warga negara memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai peran warga negara sebagai insan politik dan sistem politik. Dari organisasi partai politik diharapkan tercipta kematangan budaya politik.

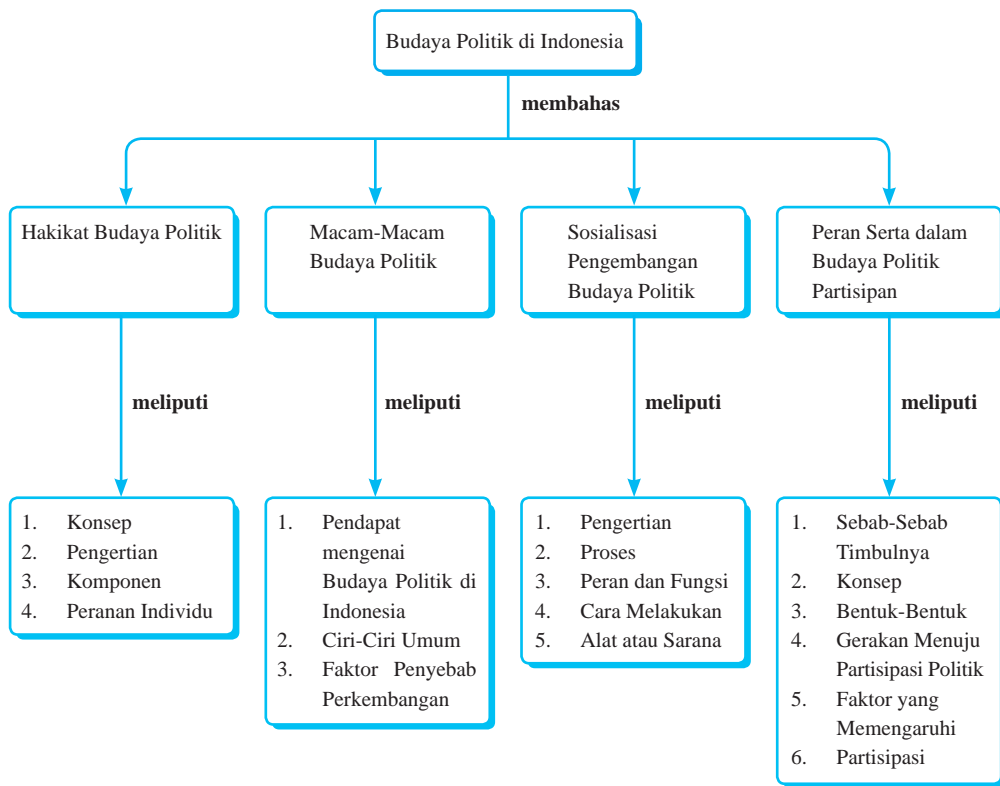


Gambar 1.1

Sumber: wordpress.com

# Peta Konsep

## BAB I



### Kata Kunci

- Budaya
- Partisipasi
- Sosialisasi
- Partisipan



## Hakikat Budaya Politik

Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut, budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui berbagai macam peristiwa politik. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi bahan perbincangan hangat dan menarik. Salah satunya adalah penyelesaian masalah Bank Century. Hampir setiap hari, kita dapat menyaksikan melalui layar televisi rapat Pansus Century di Gedung DPR. Penyelesaian kasus Bank Century melalui jalur politik menjadi topik yang hangat dan menarik untuk diikuti. Kita dapat mengetahui kinerja para wakil rakyat dalam menyelesaikan kasus yang cukup menghebohkan tersebut.



Sumber: wordpress.com

Gambar 1.2 Penyelesaian kasus Bank Century melalui pansus DPR merupakan salah satu peristiwa politik.

Dari peristiwa politik yang tersaji melalui media massa, masyarakat dapat memberikan pendapat, memperoleh tambahan pemahaman dan pengetahuan cara kerja anggota dewan, dapat menilai kesungguhan para wakil rakyatnya, serta menunjukkan sikap dan perasaan tertentu. Pendapat, pemahaman, pengetahuan, sikap dan perasaan tersebut merupakan cerminan budaya politik masyarakat.

### 1. Konsep Budaya Politik

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Masyarakat Indonesia secara *sosiokultural* mempunyai pola budaya politik dengan elemen yang pada prinsipnya bersifat dualistik, yang berkaitan dengan tiga hal, yaitu:

- 1) Dualisme kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang mengutamakan kedinamisan (konflikual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi.

- 2) Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang mengutamakan keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemandirian militer-sipil dalam proses sosial politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru.
- 3) Dualisme implikasi masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia.

## 2. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Mereka dianggap memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan. Dengan demikian, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *budhayah*, bentuk jamak dari *budhi* yang artinya akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) dapat dipelajari,
- 2) dapat diwariskan dan diteruskan,
- 3) hidup dalam masyarakat,
- 4) dikembangkan dan berubah,
- 5) terintegrasi.

Adapun politik berasal dari bahasa Yunani *polis dan teta*. Polis berarti kota atau negara kota, *teta* berarti urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan). Selain dari arti kata, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang politik. Beberapa pengertian tentang politik yaitu:

### a. Mirriam Budiardjo

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

### b. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.

Politik adalah penggunaan kekuasaan (*macht*) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain.

### c. Joyce Mitchell

Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari budaya politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri.

Banyak ahli yang mengemukakan pengertian budaya politik. Beberapa definisi budaya politik yang disampaikan para ahli antara lain:

**a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba**

Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dimengerti oleh para anggota suatu sistem politik.

**b. Austin Ranney**

Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objek-objek politik.

**c. Samuel Beer**

Samuel Beer mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

**d. Alan R. Ball**

Alan R. Ball mengemukakan bahwa budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai batasan pengertian budaya politik, yaitu:

- a. Budaya politik tidak mengedepankan perilaku aktual, tetapi perilaku nonaktual. Bentuk-bentuk perilaku nonaktual seperti pandangan, orientasi, keyakinan, sikap, emosi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dihayati para anggota suatu sistem politik.
- b. Budaya politik mengorientasikan sistem politik. Terdapat salah satu faktor yang memiliki arti penting pada pandangan terhadap sistem politik yaitu perasaan (*trust*) dan pemahaman (*hostility*). Perasaan tersebut berwujud kerja sama dan konflik yang bermanfaat dalam membentuk kualitas politik.
- c. Budaya politik mendeskripsikan warga negara sebagai anggota sistem politik.

Dengan demikian, orientasi warga negara terhadap objek politik, akan memengaruhi perilaku nonaktual sebagai cerminan budaya politiknya. Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasi struktur ditentukan oleh konteks kultural. Dilihat dari sudut pandang rangsangan secara keseluruhan, budaya politik bertujuan untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik yang demokratis.

## Aktivitas Mandiri

***Coba Anda cari konsep dan pengertian budaya politik selain yang tercantum di dalam materi! Cari melalui surat kabar, majalah, internet, atau media lain. Buatlah rangkuman dari hasil studi pustaka Anda!***

### 3. Komponen Pandangan Objek Politik

Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif.

#### a. *Komponen kognitif*

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya.

#### b. *Komponen orientasi afektif*

Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para aktor, dan penampilannya.

#### c. *Komponen orientasi evaluatif*

Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Menurut Almond dan Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik

### Info Khusus

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan politik timbul dari hubungan antara individu yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kebersamaan timbul dari proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang kekuasaan secara alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila dibandingkan dengan hubungan yang terdapat di masyarakat Barat.

*Sumber: [www.politik kita.com](http://www.politik kita.com)*

### 4. Peranan Individu dalam Sistem Politik

Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu yang didukung konsep serta gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara konsekuen.

Seorang politikus dalam suatu waktu memiliki peranan ganda. Misalnya, ia berperan sebagai anggota parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai pemimpin partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut dalam menjalankan peranan yang satu sering bertentangan dengan norma dan aturan yang melekat dalam peran yang lain. Untuk



itulah diperlukan kehati-hatian dalam mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan. Kapan waktunya ia berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin partai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pentingnya pemisahan peranan (*role differentiation*) dalam situasi tertentu. Sikap kehati-hatian dalam membedakan peranan politik itu dapat dikatakan sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan individu-individu dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan subjek, yaitu:

- a. subjek pertama adalah struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi,
- b. penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator,
- c. kebijaksanaan, keputusan, dan penguatan keputusan.

Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum,
- b. perasaan seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjur-penganjur kebijakan,
- c. perasaan seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal itu,
- d. perasaan seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak, kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang memiliki pengaruh,
- e. penilaian seseorang terhadap norma-norma berpolitik.



Sumber: wordpress.com

Gambar 1.3 Pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi orientasi individu dalam kehidupan politik.



### **Pembangunan Demokrasi Pemantapan Pendidikan Politik Perkuat Karakter Bangsa**

*Suara Karya, Senin, 23 Agustus 2010*

JAKARTA-, Dalam kesempatan tersebut, Suwarno mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang berlangsung damai di sejumlah daerah. Menurut dia, pilkada damai dan demokratis menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan pendidikan politik.

“Dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, bermartabat, dan demokratis, ke depan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, karena memiliki banyak kelebihan dalam bermokrasi,” katanya.

Suwarno melihat, dalam pilkada sangat dibutuhkan “wisdom” atau kearifan para elite politik dan masyarakat. “Dengan demikian, tidak perlu lagi banyak biaya yang dikeluarkan. Dan beragam permasalahan dalam pesta demokrasi tidak perlu lagi berakhir di pengadilan. Ini memang harus dilatih, bagaimana seseorang bertanggung jawab sesuai level kepemimpinannya, termasuk terhadap dirinya sendiri dalam kontribusinya membangun dan menumbuhkembangkan demokrasi,” ucapnya.

Suwarno menuturkan, jika demokrasi sudah mantap, maka upaya mencapai kesejahteraan kelak tak hanya diukur dari pertumbuhan, tapi bagaimana dengan pemerataannya. “Kesejahteraan harus seimbang antara kesejahteraan batin dengan fisik. Ada orang dengan penghasilan rendah bisa menerima, tapi ada orang yang berpenghasilan lebih, tapi tidak menerima.” katanya.

Menurut dia, Indonesia terus berupaya mengungguli negara-negara lain, sehingga bangsa ini tak boleh rendah diri. Harus ada kepercayaan diri dan keyakinan atas jati dirinya. “Kemampuan itu bisa ditingkatkan melalui tekad, semangat, dan format. Tekad harus kuat, semangat harus bagus, dan format harus lebih sistematis,” katanya.

Format kesatuan bangsa dan politik Indonesia ke depan akan terus diperkuat. “Sehingga kita dapat diperhitungkan dunia. Yang mendasar adalah tekad dan semangat, itu harus ditanamkan masyarakat,” ujar Suwarno. (Yudhiarma/Victor AS)

*Sumber: Suara Karya.com*

Pemantapan penerapan pendidikan politik makin memperkuat karakter bangsa. Pendidikan politik mampu memperdalam kesadaran tentang makna kearifan dan sikap bijak dalam membangun, mengembangkan, dan menjunjung tinggi demokrasi. Berdasarkan tradisi yang sudah mengakar selama berabad-abad, bangsa Indonesia memiliki basis kultur yang bijak, arif dan adil, sehingga sangat familiar dengan sikap tenggang rasa dan berlaku adil,

Keberhasilan menanamkan nilai-nilai kearifan politik ke dalam ranah pemikiran warga, sudah merupakan sukses tersendiri bagi sebuah bangsa. Pendidikan politik tidak harus sekadar teori. Pembelajaran dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik di rumah dan di lingkungan lainnya, adalah pelajaran politik yang sangat berharga.



## Macam-Macam Budaya Politik

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi warga negara terhadap kehidupan politik memengaruhi penggolongannya ke dalam kebudayaan politik. Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara kasar dengan sistem politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkungnya luas, terutama bila subkultur disertakan.

Agar diperoleh pendekatan dan gambaran yang relatif tepat mengenai orientasi individu terhadap budaya politik, perlu dikumpulkan informasi mengenai objek pokok orientasi politik. Adapun objek-objek orientasi politik tersebut meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, dan diri sendiri.

### 1. Berbagai Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia

Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern.

#### a. Budaya politik tradisional

Budaya politik tradisional ialah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Sebagai contoh budaya politik yang berangkat dari paham masyarakat Jawa.

Budaya politik tradisional juga ditandai oleh hubungan yang bersifat *patron-klien*, seperti hubungan antara tuan dan pelayannya. Budaya politik semacam ini masih cukup kuat di beberapa daerah, khususnya dalam masyarakat etnis yang sangat konservatif. Masyarakat tradisional seperti ini biasanya berafiliasi pada partai-partai sekuler (bukan partai agama).

#### b. Budaya politik Islam

Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu keyakinan dan nilai agama Islam. Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas. Karenanya, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan Islam sebagai salah satu budaya politik yang cukup mewarnai kebudayaan politik di Indonesia. Orientasi budaya politik yang mendasarkan pada nilai agama Islam mulai tampak sejak para pendiri bangsa membangun negeri ini.

Budaya politik Islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Kelompok masyarakat Islam terdiri dari dua kelompok, yaitu tradisional dan modern. Kelompok tradisional biasanya diwakili oleh masyarakat santri yang berasal dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Sementara kelompok modern diwakili oleh masyarakat santri dari organisasi Muhammadiyah. Perbedaan karakter Islam ini juga turut melahirkan perbedaan pilihan politik. Ini membuat budaya politik Islam menjadi tidak satu warna.

#### c. Budaya politik modern

Budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau latar belakang agama tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dikembangkan budaya politik modern yang dimaksudkan untuk tidak mengedepankan budaya etnis atau agama tertentu. Pada masa pemerintahan ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai yakni stabilitas keamanan dan kemajuan.

Seperti halnya budaya politik Islam, budaya politik modern juga bersifat kuat dan berpengaruh. Di dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual, dan militer. Nyatanya hanya ada dua kelompok (birokrat dan militer) yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pada masa Orde Baru.

Menurut antropolog berkebangsaan Amerika, *Clifford Geertz* ada tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu:

**a. Budaya politik abangan**

Budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat memengaruhi hidup manusia. Tradisi selamatan merupakan ciri khas masyarakat ini. Upacara selamatan dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu manusia.

**b. Budaya politik santri**

Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam. Masyarakat santri biasanya diidentikkan dengan kelompok yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. Pendidikan masyarakat santri ditempuh melalui lembaga pendidikan yang ada dalam pondok pesantren, madrasah, atau masjid. Pekerjaan masyarakat ini biasanya pedagang.



*Sumber: wordpress.com*

*Gambar 1.4 Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam.*

**c. Budaya politik priyayi**

Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Priyayi adalah masyarakat kelas atas atau aristokrat. Pekerjaan kaum priyayi biasanya adalah para birokrat, yaitu bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Almond dan Verba mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik menjadi tiga. Ketiga budaya politik tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipasi.

#### **a. Budaya politik parokial**

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana. Ciri khas budaya politik parokial yaitu:

- 1) spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas,
- 2) satu peranan dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersama dengan peranannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

#### **b. Budaya politik subjek**

Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politik. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya politik ini telah menyadari otoritas pemerintahan. Namun demikian posisi sebagai subjek (kawula) mereka dipandang sebagai posisi yang positif. Biasanya, sikap-sikap seperti ini timbul diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti proses kolonisasi dan kediktatoran.

#### **c. Budaya politik partisipan**

Masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang ditujukan kepada sistem politik secara keseluruhan, struktur politik, dan administratif.

### **Arena Diskusi**

***Coba baca penggalan artikel berikut ini bersama kelompok Anda!***

#### **Pola Tindakan Politik**

Konsep dalam masyarakat Jawa membentuk pola “tindak-tanduk yang wajar” yang berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan yang “kasar”.

Elemen yang tampak dualistis, berakar pada tradisi kehidupan militer dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya titik berat antara kedua tradisi bersifat kontradiktif. Tradisi militer mengutamakan hierarki dan komando yang ketat, segala gerak dan tindakan dibatasi. Militer juga menitikberatkan suasana penciptaan keamanan fisik. Di lain pihak, kelompok sipil dilandasi oleh tradisi penuh keleluasaan dan persamaan. Hierarkinya bersifat jauh lebih longgar dan insidental.

Pada kebanyakan masyarakat non-Barat(non-Anglo Saxon), terutama masyarakat Asia, persepsi yang dimiliki tentang kekuasaan berbeda dengan masyarakat Barat. Perbedaan ini berakar pada perbedaan falsafah yang fundamental mengenai hakikat kedudukan individu dalam masyarakat. Pada masyarakat Asia semangat kerja sama antaranggota masyarakat sangat sentral sehingga kepentingan pribadi individu ditempatkan pada posisi perifer, di mana kepentingan individu mudah dikorbankan untuk kepentingan kolektif. Sedangkan masyarakat non-Asia tidak demikian.

*Sumber: one.indoskripsi.com*

***Setelah membaca artikel di atas, coba Anda diskusikan hal-hal berikut ini!***

1. Tanggapan Anda mengenai isi artikel di atas.
2. Pola tindakan politik di Indonesia menurut pengamatan Anda.
3. Lakukan studi pustaka sebagai pendapat pembandingan!

## 2. Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia

Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran tentang ciri-ciri budaya politik Indonesia, yaitu:

- Konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (*nation building*) dan pembangunan karakter (*character building*).
- Budaya politik Indonesia bersifat *parokial-kaula* di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Masyarakat bawah masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya. Hal tersebut disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, serta ikatan primordial. Sedangkan kaum elit politik sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendidikan modern.
- Sifat ikatan primordial yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme dan nonpuritanisme, dan lain-lain. Di samping itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan.
- Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain, sikap asal bapak senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa.
- Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

## 3. Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
- Tingkat ekonomi masyarakat, yaitu makin tinggi tingkat ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat pun makin besar.
- Reformasi politik/*political will*, yaitu semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik.
- Supremasi hukum, yaitu adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas.
- Media komunikasi yang independen, yaitu media tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri.



Sumber: [www.panyingkul.com](http://www.panyingkul.com)

Gambar 1.5 Media dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri untuk mendukung perkembangan budaya politik.

## Aktivitas Mandiri

***Coba Anda cari jawaban atas permasalahan-permasalahan berikut ini!***

1. Sejauh mana perkembangan pendidikan politik di dalam masyarakat Indonesia?
2. Adakah perbedaannya antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan?
3. Sejauh mana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap bidang politik?
4. Faktor-faktor apa saja yang menurut Anda dapat memengaruhi perkembangan budaya politik dalam masyarakat?



## Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Proses sosialisasi politik diharapkan terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan politik tidak hanya menjadi monopoli kalangan elit politik. Partisipasi politik diharapkan datang dari segenap lapisan masyarakat, walaupun sudah barang tentu dalam kadar yang berlainan.

Konsep sosialisasi politik sangat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan budaya politik di Indonesia. Pada hakikatnya semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan keluarga, kelompok maupun organisasi kepentingan, organisasi politik, sampai kepada pemerintah dapat menjadi sarana untuk memantapan dan menyebarkan budaya politik.

Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tempat seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang.

### 1. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi politik menjadi media untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Sosialisasi politik tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang



biasanya akan berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor pendorong untuk memunculkan persepsi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.



*Sumber: wordpress.com*

*Gambar 1.6 Sosialisasi politik adalah proses individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.*

Berbagai pengertian atau batasan mengenai sosialisasi politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Meskipun di antara para ahli politik terdapat perbedaan, namun pada umumnya tetap pada prinsip-prinsip yang sama. Berikut ini beberapa pengertian sosialisasi politik menurut para ahli.

#### **a. David F. Aberle**

Dalam bukunya yang berjudul *Culture and Socialization*, David F. Aberle mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan, motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan baik sekarang maupun yang berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari. (*Sumber: id.wikipedia.org*)

#### **b. Gabriel Almond**

*Gabriel Almond* mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya. (*Sumber: id.wikipedia.org*)

**c. Irvin L. Child**

Irvin L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu-individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku yang dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya. (*Sumber: id.wikipedia.org*)

**d. S.N. Eisentadt**

Dalam *From Generation to Generation*, S.N. Eisentadt mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah komunikasi yang dipelajari manusia dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. (*Sumber: id.wikipedia.org*)

**e. Denis Kavanagh**

Denis Kavanagh mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. (*Sumber: id.wikipedia.org*)

**f. Alfian**

Alfian mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. (*Sumber: id.wikipedia.org*)

Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
- 2) Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Dari sekian banyak definisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan beberapa segi penting sosialisasi politik, yaitu:

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
- c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
- d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.



### GABRIEL ALMOND



Sumber: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

Gabriel A. Almond (12 Januari 1911 - 25 Desember 2002) merupakan ilmuwan politik dari Amerika Serikat. Ia terkenal karena karya pionir di bidang perbandingan politik, perkembangan politik, dan budaya politik.

Almond lahir di Rock Island, Illinois. Ia merupakan putra imigran dari Rusia dan Ukraina. Di masa dewasa, Almond kuliah di Universitas Chicago, hingga menyelesaikan program pascasarjana. Selesai kuliah, Almond bekerja di Harold Lasswell. Almond menyelesaikan Ph.D. pada tahun 1938, dengan disertasi doktrinya yang berjudul *Plutokrasi dan Politik di New York City*, tetapi tidak dipublikasikan hingga tahun 1998.

Almond mengajar di Brooklyn College (sekarang Universitas Kota New York) 1939-1942. Pada waktu Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II, Almond bergabung dengan Kantor Informasi Perang. Ia bertugas menganalisis propaganda, dan menjadi kepala dari Bagian Informasi Musuh. Selesai perang, Almond bekerja untuk Lembaga Strategis Survei pasca-Perang di Jerman.

Almond kembali ke kehidupan akademik pada tahun 1947 dan mengajar di Yale (1947-1950) dan (1959-1963), Princeton (1950-1959), dan Universitas Stanford (1963-1993). Dia juga menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Politik di Stanford (1964-1969). Selain itu, Almond juga menghabiskan waktu sebagai dosen tamu di berbagai universitas, seperti Universitas Tokyo di Jepang, Universitas Belo Horizonte di Brasil, dan Universitas Kiev. Meskipun Almond pensiun pada tahun 1976 dan menjadi profesor emeritus di Stanford, ia terus menulis dan mengajar hingga kematiannya.

Almond mengetuai Dewan Penelitian Ilmu Sosial Perbandingan Komite Politik selama bertahun-tahun. Ia juga presiden dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika (APSA) untuk 1965-1966. Pada tahun 1981, ia menerima APSA's James Madison Award, yang diberikan kepada seorang ilmuwan politik.

Sumber: [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

## 2. Proses Sosialisasi Politik

Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu:

- a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi.
- b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
- d. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

### Info Khusus

Di Rusia dilakukan suatu penelitian secara khusus untuk menyelidiki nilai-nilai pengasuhan anak yang memengaruhi sosialisasi politiknya. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Tradisi**; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya
2. **Prestasi**; meliputi ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran material mobilitas sosial.
3. **Pribadi**; meliputi kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati.
4. **Penyesuaian diri**; yaitu bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan ketenteraman.
5. **Intelektual**; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan.
6. **Politik**; sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan berkaitan dengan pemerintahan.

Sumber: [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

### 3. Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat.

Adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Phillip Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi sebagai berikut:

#### a. *Melatih individu*

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Pembelajaran mengenai pemahaman sistem politik suatu negara pun diajarkan di bangku sekolah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman kepada semua warga negara sebagai subjek dan objek politik. Dalam proses pembelajaran politik tersebut dimungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

#### b. *Memelihara sistem politik*

Sosialisasi politik juga berfungsi untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Setiap warga negara harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sistem politik. Pemahaman tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang mudah sifatnya, seperti warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri. Melalui pemahaman tersebut, setiap warga negara dapat memiliki identitas kebangsaan yang jelas.

### 4. Cara Melakukan Sosialisasi Politik

Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu:

#### a. *Imitasi*

Cara yang pertama dalam melakukan sosialisasi politik adalah imitasi. Melalui imitasi, seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya.

#### b. *Instruksi*

Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa.



Sumber: media.vivanews.com

Gambar 1.7 Gaya sosialisasi politik instruksi banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando.

### c Motivasi

Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain

## 5. Alat atau Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses seseorang dalam belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain:

### a. Keluarga (family)

Wadah sosialisasi nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Dimulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “perbincangan” politik ringan tentang segala hal. Dalam peristiwa tersebut tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.

### b. Sekolah

Di sekolah melalui pelajaran *civics education* (*pendidikan kewarganegaraan*), peserta didik dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, peserta didik telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

### c. Kelompok pertemanan (peer groups)

Sarana sosialisasi politik lainnya adalah kelompok pertemanan atau peer group. Peer group termasuk kategori agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Pengaruh pertemanan dalam sosialisasi politik sudah berlangsung sejak masa pergerakan nasional.

#### d. Media massa

Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, mengenai perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi masyarakat. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan.

#### e. Pemerintah

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, melalui beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan peserta didik kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini memengaruhi budaya politiknya.

#### f. Partai politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran dalam sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan kesan memperjuangkan kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.



Sumber: media.vivanews.com

Gambar 1.8 Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran sebagai sosialisasi politik

Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

##### 1) Sosialisasi politik

Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara (pendidikan politik).

## 2) *Rekrutmen politik*

Dalam melaksanakan fungsi rekrutmen, partai politik melakukan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus.

## 3) *Partisipasi politik*

Dalam menjalankan fungsi partisipasi politik, partai politik menjadi sarana kegiatan bagi masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## 4) *Artikulasi kepentingan*

Dalam menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, partai politik merumuskan dan menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah.

## 5) *Agregasi kepentingan*

Dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan, partai politik mengolah dan memadukan berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah.

## 6) *Komunikasi politik*

Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menghubungkan antara arus informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya.

## **Arena Diskusi**

***Diskusikan dengan kelompok Anda permasalahan-permasalahan berikut ini!***

1. Menurut pendapat Anda, sejauh mana arti penting sosialisasi politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Sudah idealkah peran partai politik di Indonesia dalam sosialisasi politik?



## **Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan**

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara.

Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.

Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung program-program pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

## 1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

- Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- Konflik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

## 2. Konsep Partisipasi Politik

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukakan tradisi pendekatan *behavioral* (perilaku) dan pendekatan *post behavioral* (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.

Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu:

- Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik?
- Siapa saja yang terlibat?
- Apa implikasinya?
- Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik?
- Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik?

Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik.



Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Sarjana	Konsep	Indikator
Kevin R. Hardwick	Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah</li> <li>- Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik.</li> </ul>
Miriam Budiardjo	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupa kegiatan individu atau kelompok</li> <li>- Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik.</li> </ul>
Ramlan Surbakti	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik</li> <li>- Dilakukan oleh warga negara biasa</li> </ul>
Michael Rush dan Philip Althoft	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik</li> <li>- Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi</li> </ul>
Huntington dan Nelson	Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman ( <i>private citizen</i> ) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan</li> <li>- Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik</li> <li>- Dilakukan oleh warga negara preman (biasa)</li> </ul>



Sarjana	Konsep	Indikator
Herbert McClosky	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupa kegiatan-kegiatan sukarela</li> <li>- Dilakukan oleh warga negara</li> <li>- Warga negara terlibat dalam proses-proses politik</li> </ul>

*Sumber: www. wikipedia.org*

Berdasarkan beberapa definisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa.

Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik, yaitu:

- cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap,
- warga negara biasa (preman) bukan pejabat,
- kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah,
- cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak,
- kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak.

### 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond.

Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.

#### a. *Bentuk konvensional*

Bentuk konvensional antara lain:

- 1) dengan pemberian suara (voting),
- 2) dengan diskusi kelompok,
- 3) dengan kegiatan kampanye,
- 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan,
- 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif,
- 6) dengan pengajuan petisi.

### ***b. Bentuk nonkonvensional***

Bentuk nonkonvensional antara lain:

- 1) dengan berdemonstrasi,
- 2) dengan konfrontasi,
- 3) dengan pemogokan,
- 4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran,
- 5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan,
- 6) dengan perang gerilya/revolusi.

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

### ***a. Partisipasi aktif***

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

### ***b. Partisipasi pasif***

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu:

- a. kegiatan pemilihan,
- b. lobi,
- c. kegiatan organisasi,
- d. mencari koneksi,
- e. tindakan kekerasan.

Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu:

- a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.
- b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.
- d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.

Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.

## • Nilai-Nilai Pancasila

*Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.*

### 4. Gerakan Menuju Partisipasi Politik

Partisipasi warga negara dalam suatu negara akan berjalan seiring dengan tingkat kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara akan mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Kesadaran politik yang mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal.

Menurut Myron Weinr, ada beberapa hal yang dapat memperluas arah partisipasi politik dalam proses politik, yaitu:

#### a. Modernisasi

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya industrialisasi, memacu perbaikan dalam segala aspek kehidupan termasuk perbaikan pendidikan. Peran media massa sebagai sarana komunikasi masyarakat menunjang ke arah kemajuan. Dengan kondisi semacam ini, ada sebagian warga negara yang merasakan terjadinya perubahan nasib. Kondisi demikian mendorong mereka menuntut untuk berperan dalam kegiatan politik. Hal inilah yang akan memperluas gerakan ke arah partisipasi politik.

#### b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial

Salah satu akibat modernisasi adalah munculnya perubahan kelas sosial, seperti kelas pekerja baru dan kelas pekerja menengah. Selain itu, stratifikasi sosial dalam masyarakatpun akan makin terlihat jelas. Dengan demikian, bagi yang berkepentingan akan menuntut partisipasi politik untuk berusaha memengaruhi pembuatan kebijakan politik.

#### c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Lahirnya kaum intelektual seperti sarjana, kritikus, pengarang, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan politik suatu negara. Melalui pendapat, ide, saran maupun kritikan, mereka dapat akan memengaruhi pola pikir masyarakat dan membangkitkan tuntutan akan partisipasi politik. Situasi yang demikian dapat memengaruhi pembuatan kebijakan politik pemerintah. Selain itu, makin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern, makin memperlancar penyebaran ide-ide baru.

#### d. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik

Dalam rangka mendapat dukungan dari masyarakat guna merebut kekuasaan dalam bidang pemerintahan, para pemimpin kelompok-kelompok politik menggunakan berbagai macam cara. Berbagai macam cara tersebut, seperti menumbuhkan ide-ide baru, beropini, bahkan dengan cara kekerasan, apabila saling berbenturan sehingga menimbulkan konflik. Adanya konflik tersebut, mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

#### ***e. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan***

Keterlibatan pemerintah yang makin meluas dalam berbagai aspek kehidupan, menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan rakyat untuk ikut berperan dalam menentukan kehidupannya. Meluasnya kegiatan pemerintah dalam menentukan kehidupan warga negara mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Setiap warga negara tidaklah sama partisipasinya dalam politik. Ada warga negara yang aktif, ada warga negara yang tidak aktif, ada warga negara yang enggan, atau bahkan sama sekali tidak mau berurusan dengan masalah politik (antipolitik). Keengganan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adanya politik kotor sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lain-lain. Ada tingkatan-tingkatan partisipasi politik masyarakat yang menunjukkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik.

Adapun tingkatan-tingkatan partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff antara lain:

- a. menduduki jabatan politik atau administrasi,
- b. mencari jabatan politik atau administrasi,
- c. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik,
- d. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik,
- e. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik,
- f. keanggotaan semu dalam suatu organisasi semu politik,
- g. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi,
- h. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik,
- i. voting (pemberian suara).

### **5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik masyarakat atau warga negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor tersebut, di antaranya:

#### ***a. Keimer***

Menurut Keimer, ada beberapa hal yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu:

- 1) modernisasi,
- 2) terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial,
- 3) meluasnya partisipasi masyarakat,
- 4) konflik-konflik di antara pemimpin-pemimpin politik,
- 5) keterlibatan pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

#### ***b. Ramlan Surbakti***

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 2 faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu kesamaan politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah.

#### ***c. Milbart***

Menurut Milbart, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu:

- 1) penerimaan perangsang politik,
- 2) karakteristik sosial seseorang,
- 3) sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu tetap hidup,
- 4) perbedaan regional.

#### d. *Arbi Sanit*

Terdapat 5 faktor menurut Arbi Sanit yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu:

- 1) kebebasan berkompetisi di segala bidang,
- 2) kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka,
- 3) keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur,
- 4) penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat yang berupa kekuasaan dalam masyarakat,
- 5) adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan.

### Info Khusus

Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam *trias politika*: **legislatif, eksekutif, dan yudikatif**.

*Sumber: sistempolitikindonesia.blogspot.com*

## 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Terdapat perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Salah satu sebab perbedaan adalah adanya perbedaan dalam sistem politik negara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan model pembangunan yang ditetapkan.

Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu:

#### a. *Model pembangunan liberal borjuis*

Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat.

#### b. *Model pembangunan otokrasi*

Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasaan politik untuk menciptakan stabilitas politik.

#### c. *Model teknokrasi*

Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### d. *Model populasi*

Model populasi mengakibatkan konflik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Selanjutnya Huntington juga membagi tahapan pembangunan sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat menjadi 5, yaitu:

- a. tingkat partisipasi masyarakat cenderung berlainan atas dasar status ekonomi,
- b. pembangunan ekonomi dan sosial tidak langsung telah meningkatkan ketegangan dan tekanan antarkelompok,
- c. berkembangnya perekonomian yang makin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dalam kelompok-kelompok itu,
- d. pembangunan ekonomi di samping sebagian memerlukan perluasan-perluasan yang penting dan fungsi-fungsi pemerintah juga menghasilkan,
- e. Modernisasi ekonomi biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional.

Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan batin dengan sebagian rakyat.
- b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan.
- c. Ketidacacuhan (apatis) yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi.
- d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan masyarakat menjadi terganggu.

## Aktivitas Mandiri

***Coba indentifikasikan kegiatan politik yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda! Identifikasikan pula peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut!***

## Refleksi

Kehidupan politik di suatu negara sangat bergantung pada perilaku warga masyarakatnya dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan politik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya.

Setelah mempelajari materi tentang Budaya Politik, coba Anda renungkan dan pahami kembali makna dari penerapan budaya politik. Budaya politik seperti apa yang mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, mendukung keutuhan bangsa dan negara, serta mampu membawa bangsa Indonesia mencapai kejayaan?

## Rangkuman

- Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktur politik dan sistem politik.
- Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.
- Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik.
- Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri.
- Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif.
- Objek-objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, diri sendiri.
- Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern.
- Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun.
- Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada.
- Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan.
- Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama.
- Peranan sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat.
- Fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.
- Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu: imitasi, instruksi, dan motivasi.

- Sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, media massa, pemerintah, dan partai politik.
- Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.
- Setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap.





### A Pilihan Ganda

**I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!**

1. Tokoh yang mengemukakan budaya politik sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus adalah ....
  - a. Almond dan Verba
  - b. Huntington
  - c. Nelson
  - d. Kartaprawira
  - e. Syamsudin Haris
2. Komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan politik peranan dan segala kewajiban merupakan komponen ....
  - a. komponen orientasi afektif
  - b. komponen kognitif
  - c. komponen evaluasi
  - d. komponen objek
  - e. komponen etika
3. Berikut ini yang merupakan komponen orientasi evaluatif adalah ....
  - a. sistem kepercayaan
  - b. etika
  - c. norma
  - d. ide
  - e. agama
4. Faktor yang sangat memengaruhi budaya politik adalah ....
  - a. sistem politik
  - b. sistem pemerintahan
  - c. struktur politik
  - d. partai politik
  - e. masyarakat
5. *Dapat memahami hubungan antara kebudayaan politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.*  
Pernyataan di atas merupakan ... budaya politik.
  - a. pengertian
  - b. tujuan
  - c. manfaat
  - d. fungsi
  - e. tipe-tipe
6. Proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik disebut ....
  - a. budaya politik
  - b. sikap politik
  - c. orientasi politik
  - d. sosialisasi politik
  - e. kehidupan politik

7. Budaya politik suatu masyarakat yang berkembang akan dipengaruhi oleh ... yang ada di dalam masyarakat tersebut.
  - a. kompleks nilai
  - b. norma
  - c. strata sosial
  - d. budaya setempat
  - e. struktur politik
8. Untuk melihat peranan individu dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan ....
  - a. subjek
  - b. objek
  - c. budaya
  - d. struktur politik
  - e. strata masyarakat
9. Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu yang didukung oleh ....
  - a. konsep
  - b. kekuatan massa
  - c. simbol
  - d. pengultusan
  - e. ide dan pemetaan kekuasaan
10. Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap ....
  - a. tata pemerintahan
  - b. kekuatan elit politik
  - c. pembagian kekuasaan
  - d. kekuatan individu
  - e. sistem politik
11. Budaya politik Indonesia bersifat *parokial-kaula* di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak.  
Hal tersebut dipengaruhi faktor-faktor berikut ini, *kecuali* ....
  - a. isolasi dari kebudayaan luar
  - b. semangat partisipan yang kuat
  - c. pengaruh penjajahan
  - d. feodalisme
  - e. ikatan primordial
12. Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan hingga membentuk ...
  - a. mesin politik
  - b. tingkah laku politik
  - c. regenerasi
  - d. budaya politik
  - e. struktur politik

13. Cara yang pertama dalam melakukan sosialisasi politik adalah ....
  - a. observasi
  - b. motivasi
  - c. imitasi
  - d. agitasi
  - e. representasi
14. Pihak yang dianggap sebagai agen yang mempunyai kepentingan langsung atas sosialisasi politik adalah ....
  - a. masyarakat
  - b. kader partai
  - c. lembaga swadaya masyarakat
  - d. pemerintah
  - e. partai politik
15. Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik disebut ....
  - a. partisipasi politik
  - b. budaya peran serta
  - c. struktur politik
  - d. regenerasi politik
  - e. kaderisasi politik
16. Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond adalah ....
  - a. parokial dan tradisional
  - b. konvensional dan nonkonvensional
  - c. struktur dan konvensional
  - d. modern dan ortodoks
  - e. tradisional dan nonkonvensional
17. Salah satu sebab perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan adalah ....
  - a. budaya politik
  - b. sistem politik
  - c. bentuk negara
  - d. pola pemerintahan
  - e. struktur politik
18. Berikut ini yang bukan merupakan model pembangunan menurut Huntington adalah ....
  - a. sosialis
  - b. liberal borjuis
  - c. otokrasi
  - d. teknokrasi
  - e. populasi
19. Timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politik dapat didorong oleh ....
  - a. budaya politik
  - b. peran partai politik
  - c. agitasi politik
  - d. partisipasi politik
  - e. struktur politik

20. Salah satu bentuk partisipasi politik secara konvensional adalah ....
- a. konfrontasi
  - b. pemogokan
  - c. demonstrasi
  - d. kekerasan politik
  - e. kampanye

## **B Uraian**

### *II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!*

1. Sebutkan elemen yang berkaitan dengan pola budaya politik Indonesia!
2. Jelaskan pengertian budaya politik menurut Almond dan Verba!
3. Apa saja yang memengaruhi orientasi individual terhadap kehidupan politik?
4. Jelaskan yang dimaksud dengan budaya politik Islam!
5. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebutkan faktor-faktor tersebut!
6. Bagaimana pengertian sosialisasi politik dalam buku *Culture and Socialization*?
7. Jelaskan peran dan fungsi sosialisasi politik!
8. Bagi pemerintah, apa fungsi partisipasi politik warga negara?
9. Sebutkan batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson!
10. Apa penyebab krisis partisipasi dalam kegiatan politik di Indonesia?

## **C Uji Kreativitas**

1. Buatlah suatu karya tulis dengan tema budaya politik!
2. Lakukan kajian pustaka dan wawancara sebagai sumber data!
3. Presentasikan karya tulis Anda di depan kelas!

## **D Studi Kasus**

### *Langkah Kegiatan:*

1. Pahami cuplikan artikel berikut ini!
2. Susunlah pendapat Anda berdasarkan hasil analisis dari tema artikel yang telah Anda pahami!

### *Landasan Teori:*

1. Materi tentang Budaya Politik.
2. Referensi yang membahas tentang budaya politik.
3. Wawancara dengan narasumber.

## Bahan Kajian:

### Sumber Perilaku Politik

Sumber perilaku politik pada dasarnya adalah budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini tidak selalu bersifat terbuka, tetapi ada pula yang bersifat tertutup. Kesepakatan untuk menerima amplop setiap kali dilakukan pembahasan RUU merupakan kesepakatan gelap (*illicit agreement*). Membayar “uang pelicin” kepada para petinggi politik untuk mendapatkan dukungan partai dalam rebutan jabatan bupati, wali kota, dan gubernur merupakan tindakan yang dianggap sah dalam budaya politik kita kini. Suatu budaya politik biasanya berlaku selama periode tertentu. Ketika datang perubahan penting dalam konstelasi politik, datang pula para pelaku baru dalam gelanggang politik, terbukalah kesempatan untuk memperbarui budaya politik. Di negara kita budaya politik para perintis kemerdekaan berbeda dari budaya politik pada zaman demokrasi parlementer, dan ini berbeda dengan budaya politik yang tumbuh dalam zaman Orde Baru. Zaman reformasi ini juga melahirkan budaya politik baru, yang kemudian melahirkan perilaku politik yang menyusahkan banyak orang. Di sementara kalangan budaya politik kita disebut dengan “budaya politik aji mumpung”.

*Sumber: bilikdemokrasi.org*

### Penguatan Analisis:

1. Buatlah forum diskusi di kelas untuk membandingkan hasil analisis Anda dengan analisis teman-teman Anda!
2. Lakukan presentasi pendapat di kelas!
3. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelas!

# Bab

## 2

## Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

### Pendahuluan

Indonesia memasuki masa transisi saat lahirnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998. Pada tahun tersebut, Indonesia memasuki masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Terdapat perubahan-perubahan yang bersifat fundamental dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah membangun tatanan kehidupan politik baru yang demokratis. Arah baru ini menjadikan Indonesia dimasukkan sebagai salah satu dari dua negara demokrasi baru bersama Nigeria. Perkembangan demokrasi Indonesia dianggap paling signifikan oleh Freedom House.

Sebagai langkah awal pembenahan demokrasi, dilakukan percepatan pemilu. Perhelatan tersebut dimajukan dari rencana semula. Pemilu sebenarnya hendak dilaksanakan tahun 2003, namun dimajukan menjadi tahun 1999. Pemerintahan baru hasil Pemilu 1999 mendapat amanah untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi. Di dalam agenda tersebut terdapat satu yang terpenting, yaitu melakukan perubahan (amandemen) UUD 1945. Desakan kuat untuk mengubah UUD 1945, salah satu latar belakangnya adalah konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokrasi, termasuk dalam meningkatkan kemampuan untuk mewadahi pluralisme dan mengelola konflik yang timbul karenanya.

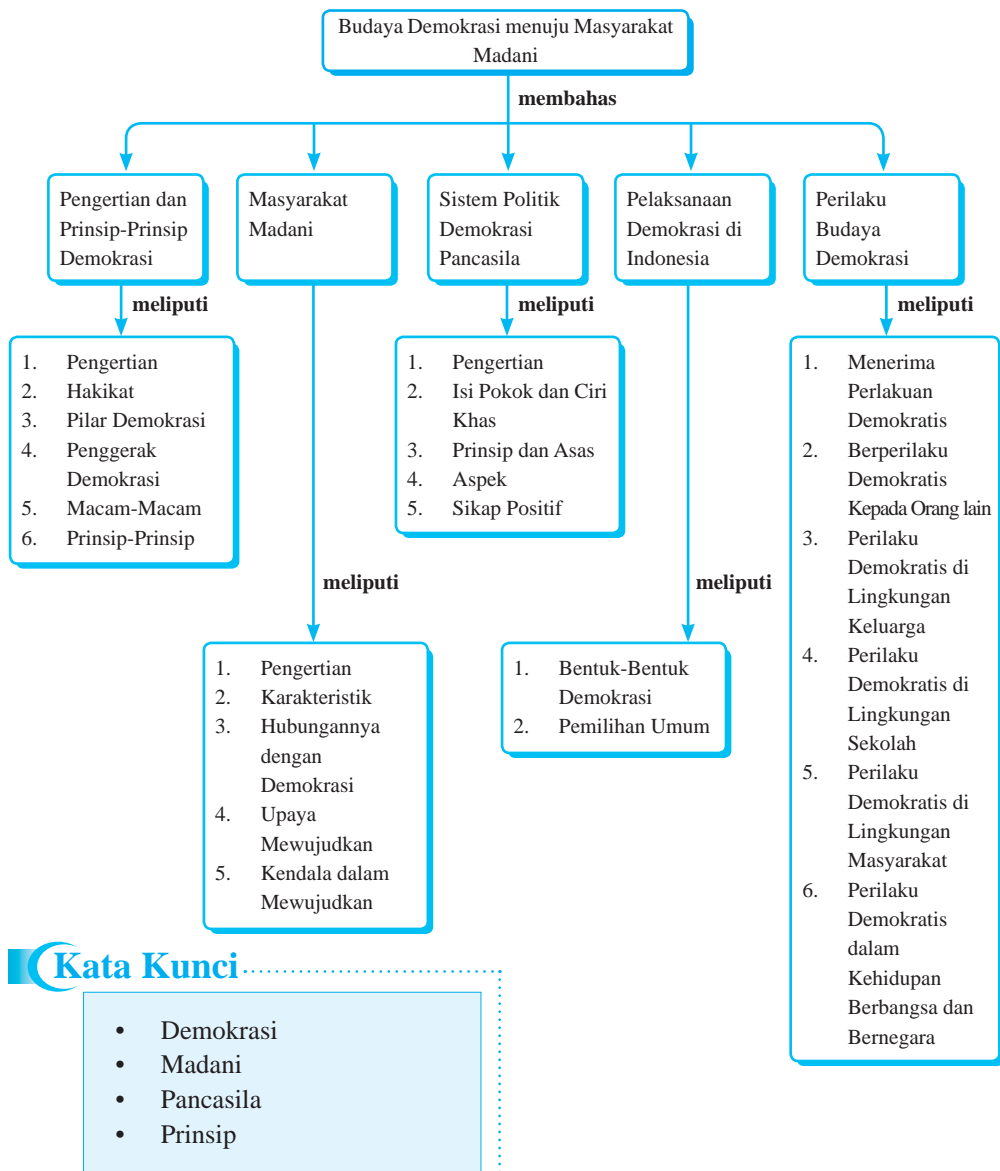


Gambar 2.1

Sumber: [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id)

# Peta Konsep

## BAB 2







## Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, sikap dan perilaku masyarakatnya selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

### 1. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Athena dianggap sebagai negara yang pertama kali menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Perkembangan istilah demokrasi terjadi seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan suatu negara yang berdasarkan pada konsep dan prinsip trias politika. Dalam demokrasi, kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### Tokoh

#### Gusdur Terima Gelar Bapak Demokrasi Papua



Sumber: wordpress.com

Warga Papua memberikan penghargaan berupa gelar Bapak Demokrasi Papua kepada presiden ke-4 RI, almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberian gelar tersebut ditandai oleh penyerahan cendera mata berupa dua burung cenderawasih dalam kotak kaca kepada anak almarhum, Inayah Wahid.

Penghargaan itu diberikan dalam acara memperingati 10 tahun kembali nama Papua yang digelar di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura, yang juga ditandai oleh peluncuran buku berjudul *Hai Tanahku Papua, Untukmu Pahlawan* yang diterbitkan Konsensus Nasional Papua.

Ny. Lilik CH Wahid, adik almarhum yang mendampingi Inayah, mengajak agar masyarakat Papua bekerja keras guna mencapai kesejahteraan dan memperbaiki diri sendiri.

“Kita sudah capek berwacana dan beretorika. Kini saatnya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan,” ajak Ny. Lilik Wahid seraya menambahkan, dirinya yang saat ini berada di Komisi I DPR siap membantu Papua.

Sementara itu, Inayah, putri bungsu Gus Dur, mengatakan, dirinya bersama keluarga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan rakyat Papua terhadap ayahandanya.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut menuturkan, Gus Dur berjasa bagi Papua dengan telah mengembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian Jaya.

*Sumber: Kompas.com*

## 2. Hakikat Demokrasi

Pada hakikatnya, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*value*).

Hendry B. Mayo mengemukakan tentang nilai-nilai dalam demokrasi, antara lain:

- menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*),
- menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*),
- menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (membatasi pemakaian kekerasan/paksaan seminimal mungkin (*minimum of coercion*),
- mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*),
- menjamin tegaknya keadilan,
- memajukan ilmu pengetahuan,
- pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai

tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal.



Sumber: wordpress.com

Gambar 2.2 Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan tersebut antara lain:

1. kebebasan untuk berpendapat,
2. kebebasan untuk membuat kelompok,
3. kebebasan untuk berpartisipasi,
4. kesetaraan antarwarga,
5. saling percaya,
6. kerja sama.

Akan tetapi, mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dilaksanakan dengan batasan-batasan untuk saling menghormati. Hal paling penting inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah saat ini guna mengurangi kesalahpahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Bila tidak, kesalahpahaman seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat

### 3. Pilar Demokrasi

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica*. Prinsip ini membagi ketiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara. Tiga jenis lembaga tersebut adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga lembaga saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip keseimbangan.

Peran ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah:

- Lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif.
- Lembaga-lembaga pengadilan berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif.
- Lembaga-lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Keputusan legislatif dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Para wakil rakyat ini wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya.



*Sumber: vivanews.com*

*Gambar 2.3 Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.*

Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari dominasi salah satu lembaga atas lembaga yang lain. Beberapa fakta sejarah mencatat bahwa kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif hingga mampu menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

## Aktivitas Mandiri

Pemilu diharapkan menjadi kegiatan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Pemilu yang demikian tentunya harus berlangsung dengan damai dan demokratis. Pemilu yang berjalan lancar dan tertib, demokratis, serta berlangsung tanpa gejolak, kekerasan, dan pertumpahan darah merupakan prestasi luar biasa bagi bangsa Indonesia.

***Coba Anda cermati makna dari kalimat di atas!  
Apa komentar Anda menanggapi kalimat di atas!***

#### 4. Lembaga dan Masyarakat sebagai Penggerak Demokrasi

Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia saat ini belum bisa terwujud. Anggapan yang muncul, demokrasi lebih diidentikkan kepada hal-hal bersifat politis, sehingga yang terjadi isu-isu demokratis tersebut lebih berkembang pesat di kalangan partai politik. Dalam pelaksanaannya demokrasi, belum bisa menyentuh kepada lembaga atau masyarakat.

Saat ini lembaga dan masyarakat belum bisa menerapkan pendekatan demokrasi dalam berorganisasi atau bermasyarakat. Mereka masih memakai atau lebih suka menerapkan pendekatan adat dan budaya masing-masing. Hal tersebut karena adat dan budaya dianggap sudah menjadi kebiasaan dan lebih mudah dikenal masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak sadar bahwa pendekatan-pendekatan adat dan budaya masing-masing tersebut tidak bisa dipakai jika dihadapkan dengan adat dan budaya yang lain. Seringkali timbul tindakan-tindakan destruktif yang dilatarbelakangi oleh adat dan budaya. Misalnya, jika timbul permasalahan di Yogyakarta, tidak mungkin bila diselesaikan menggunakan pendekatan adat atau budaya Batak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, mengingat Indonesia memiliki keragaman masyarakat yang sangat tinggi, demokrasi yang menjadi asas negara saat ini diharapkan bisa memancarkan nilai-nilai demokratisnya agar lebih universal dan dapat menjadi solusi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang ada.

Menurut Dahl, terdapat beberapa keuntungan demokrasi selain contoh sederhana di atas, yaitu:

- a. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
- b. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi manusia yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
- c. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
- d. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
- e. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
- f. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
- g. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan.
- h. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
- i. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
- j. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Hal-hal di atas menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat untuk mewujudkannya. Sukses di bidang politik tidak menjadi jaminan keseluruhan masyarakat menerapkan nilai-nilai demokrasi. Perlu adanya langkah-langkah intensif dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut.



## 5. Macam-Macam Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

### a. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

#### 1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

#### 2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar”, yang berhaluan Marxisme-komunisme.



Sumber: [www.earth-photography.com](http://www.earth-photography.com)

Gambar 2.4 Negara-negara Eropa Timur pernah menerapkan sistem demokrasi proletar.

### b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

### 1) *Demokrasi langsung*

Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

### 2) *Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)*

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).



*Sumber: wordpress.com*

Gambar 2.5 Parlemen merupakan representasi perwakilan rakyat dalam suatu negara.

### 3) *Demokrasi perwakilan sistem referendum*

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

#### **Info Khusus**



*Sumber: wordpress.com*

Menurut John Locke, ada dua asas terbentuknya negara. Pertama, *pactum unionis* yaitu perjanjian antarindividu untuk membentuk negara. Kedua, *pactum suvjectionis*, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, for the people*).

*Sumber: id.wikipedia.org*



### **c. Berdasarkan titik perhatian**

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

#### **1) Demokrasi formal**

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

#### **2) Demokrasi material**

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

#### **3) Demokrasi gabungan**

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.

## **6. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal**

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya.

Menurut Inu Kencana Syafie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain:

### **a. Adanya pembagian kekuasaan**

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

### **b. Pemilihan umum yang bebas**

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif.

Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi.

Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.



Sumber: [www.swaberita.com](http://www.swaberita.com)

Gambar 2.6 Pemilu menjadi cara bagi warga negara untuk memilih wakil rakyat.

#### **c. Manajemen yang terbuka**

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

#### **d. Kebebasan individu**

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

#### **e. Peradilan yang bebas**

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

#### **f. Pengakuan hak minoritas**

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membedakan satu sama lain.

#### **g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum**

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

#### **h. Supremasi hukum**

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

#### **i. Pers yang bebas**

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

#### **j. Beberapa partai politik**

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik.

Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.



*Sumber: i.yting.com*

*Gambar 2.7 Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya*

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu:

**a. Masalah pembentukan negara**

Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

**b. Dasar kekuasaan negara**

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat.

**c. Susunan kekuasaan negara**

Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

**d. Masalah kontrol rakyat**

Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

## Arena Diskusi

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya, Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga yang dipilih dari rakyat. Dengan demikian, secara hierarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu.

Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1955 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan.

*Sumber: [www.politikita.com](http://www.politikita.com)*

Indonesia kembali masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.

Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Lakukan studi pustaka mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia!
2. Berikan penilaian mengenai pelaksanaan pemilihan umum tersebut!
3. Diskusikan bersama kelompok Anda!

Reformasi menuntut perubahan dalam semua aspek kehidupan, khususnya bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Masyarakat mengharapkan terwujudnya perubahan total dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang. Terwujudnya kedaulatan rakyat, menjadi ciri kehidupan bernegara yang demokratis. Kehidupan bernegara yang demokratis, merupakan arah yang hendak dicapai dalam perubahan di bidang politik.

Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, diperlukan terciptanya masyarakat madani. Kehidupan masyarakat madani ditandai dengan adanya keterbukaan di bidang politik. Kehidupan masyarakat madani juga memiliki tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

### 1. Pengertian Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani sebenarnya merupakan istilah baru dari hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas. Ia adalah seorang filosof kontemporer dari Malaysia. Di Indonesia, istilah masyarakat madani atau *civil society* baru populer pada dasawarsa 1990-an. Pada awalnya, istilah masyarakat madani di Indonesia bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim. Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia itu berkunjung ke Indonesia membawa istilah *masyarakat madani* sebagai terjemahan *civil society*. Istilah masyarakat madani disampaikan dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah di acara Festival Istiqlal, 26 September 1995.

Namun sebenarnya, istilah tersebut dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya. Ia menyebut dengan istilah *societies civillis*. Pada awalnya, istilah tersebut identik dengan negara. Namun dalam perkembangannya, istilah *societies civillis* dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi, berhadapan dengan negara, serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.

Menurut W.J.S. Poerwadarminto, kata masyarakat berarti suatu pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan yang tertentu. Sedangkan kata madani berasal dari bahasa Arab yaitu *madinah*, yang artinya kota. Dengan demikian masyarakat madani secara etimologis berarti masyarakat kota. Meskipun demikian, istilah kota tidak merujuk semata-mata kepada letak geografis, tetapi justru kepada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota. Dari sini kita paham bahwa masyarakat madani tidak asal masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu yang berperadaban.



Gambar 2.8

Sumber: malaysia123.com  
Istilah masyarakat madani disampaikan Dato Anwar Ibrahim pada simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah di acara Festival Istiqlal, 26 September 1995.

Menurut rumusan PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai *human dignity* atau hak-hak tanggung jawab manusia. Adapun dalam frasa bahasa Latin, masyarakat madani merupakan padanan frasa *civillis societies*. Artinya adalah suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Dalam bahasa Inggris, masyarakat madani dikenal dengan istilah *civil society*. Artinya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Dalam perkembangannya, istilah masyarakat madani dipahami para ahli berdasarkan lingkungan masing-masing. Definisi tersebut merupakan hasil analisis dan kajian dari fenomena masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian masyarakat madani.

**a. Zbighiew Rau**

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lainnya guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani menurut Zbighiew Rau adalah:

- 1) individualisme,
- 2) pasar (market),
- 3) pluralisme.

**b. Han Sung Joo**

Masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasi isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *civil society* ini

**c. Anwar Ibrahim**

Masyarakat madani adalah masyarakat ideal yang memiliki peradaban maju dan sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat, yaitu masyarakat yang cenderung memiliki usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan untuk mengikuti undang-undang bukan nafsu, demi terlaksananya sistem yang transparan.

**d. Nurcholish Madjid**

Masyarakat madani adalah suatu tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan).

**e. A.S. Hikam**

A.S. Hikam mendefinisikan pengertian masyarakat madani berdasarkan istilah *civil society*. Menurutny, *civil society* didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan:

- a. Kesukarelaan (*voluntary*), artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
- b. Keswasembadaan (*self generating*), artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi.



- c. Keswadayaan (*self supporting*), artinya kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain.
- d. Kemandirian yang tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara.
- e. Keterkaitan dengan norma-norma hukum, yang artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dirangkum bahwa masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembaga-lembaga yang mandiri dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.



Sumber: wordpress.com

Gambar 2.9 Masyarakat madani memiliki keswadayaan yang tinggi.

## Tokoh

### Nurcholish Madjid dan Masyarakat Madani



Sumber: wordpress.com

Cak Nur merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual Islam terbesar di Indonesia. Nurcholish Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam artikelnya "Menuju Masyarakat Madani".

Nurcholish Madjid yang mencoba melihat civil society berkaitan dengan masyarakat kota madinah pada zaman Rasulullah. Menurut Madjid, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris) baru dimulai dengan The Toleration Act of 1689.

Sumber: islamkuno.com



## 2. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani atau yang disebut orang barat civil society mempunyai prinsip pokok pluralisme, toleransi, dan hak asasi (human right), termasuk di dalamnya adalah demokrasi. Bagi bangsa Indonesia, masyarakat madani menjadi suatu cita-cita bagi negara. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu masyarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.

Menurut Bahmueller, terdapat beberapa karakteristik masyarakat madani, di antaranya:

- Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
- Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
- Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
- Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
- Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.
- Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
- Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari beberapa karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis yang para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.

Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya *democratic governance* (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai keamanan sipil (*civil security*), tanggung jawab sipil (*civil responsibility*), dan ketahanan sipil (*civil resilience*)). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani, yaitu:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
- Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antarkelompok.
- Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
- Adanya persatuan antarkelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan.

- f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
- g. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmasyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya.

Tanpa prasyarat tersebut, masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada kekuasaan masyarakat sipil yang sempit. Hal tersebut tidak ubahnya dengan sistem militerisme yang antidemokrasi dan sering melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani. Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah semangat kelompok yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa.

### **Arena Diskusi**

Dalam mewujudkan masyarakat madani, terdapat sikap-sikap yang saling bertentangan satu sama lain. Kesemua sikap perlu dipahami agar setiap masyarakat dapat memilih sikap yang mendukung ke arah terwujudnya masyarakat madani dan bukan sebaliknya.

Beberapa sikap yang saling bertentangan tersebut adalah:

1. Sentralisme dan lokalisme
2. Pluralisme dan rasisme
3. Elitisme dan komunalisme
  - Menurut pendapat Anda, sikap mana yang perlu dikembangkan dan sikap mana yang perlu dihindari?
  - Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas!

### **3. Hubungan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi**

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat *koeksistensi* atau *saling mendukung*. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar.

Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Masyarakat madani mensyaratkan adanya *civic engagement*, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya.

Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi.

#### 4. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Di Indonesia, sudut pandang pemahaman masyarakat madani dapat dirumuskan secara sederhana. Rumusan tersebut yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sahnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur. Bentuk-bentuk hubungan sosial tersebut yaitu toleransi dan pluralisme. Keduanya merupakan wujud ikatan keadaban (*bond of civility*). Maka dari itu, toleransi dan pluralisme menjadi bagian untuk mewujudkan nilai-nilai keadaban.

Guna mewujudkan terciptanya masyarakat madani, diperlukan berbagai upaya sebagai berikut:

##### a. Meningkatkan usaha menciptakan pemerintahan yang baik

Terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*) merupakan tuntutan masyarakat pada era reformasi. Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani yang sehat. Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah pemerintahan yang efisien dan efektif, profesional, berwibawa, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ciri khas dari pemerintahan yang bersih adalah dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*), dapat memimpin (*capable*), pemerintahan bersih (*clean government*).



Sumber: [www.presidentri.go.id](http://www.presidentri.go.id)

Gambar 2.10 Demi terciptanya masyarakat madani, diperlukan terwujudnya *good government*.

Melalui pemerintahan yang baik, masyarakat dapat menciptakan pembangunan secara merata. Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkatkan. Peningkatan taraf hidup, berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan merupakan salah satu karakteristik masyarakat madani.

#### ***b. Meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan***

Sebagaimana prinsip trias politika, sautu pemerintahan yang ideal terbagi ke dalam 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya terwadahi dalam lembaga-lembaga negara. Ketiga lembaga harus mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, dapat tercipta tingkat keseimbangan hubungan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legeslatif, dan kekuasaan yudikatif. Di dalam menjalankan perannya, lembaga legislatif menjadi cerminan aspirasi masyarakat yang diwakili. Dengan demikian, kehidupan yang demokratis lebih terjamin. Makin terjamin demokrasi warga negara, berarti makin dekat bangsa Indonesia ke arah terwujudnya masyarakat madani.

#### ***c. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian***

Masyarakat madani menuntut pemerataan kehidupan ekonomi yang lebih merata. Dengan adanya pemerataan, kegiatan perekonomian menjadi hak semua warga negara. Kegiatan ekonomi tidak hanya menjadi milik sekelompok kecil anggota masyarakat. Kegagalan dalam menerapkan pemerataan ekonomi, dapat menciptakan kehidupan perekonomian yang tidak demokratis. Namun sebaliknya, pemerataan kegiatan perekonomian, dapat menjamin kehidupan ekonomi yang demokratis. Makin demokratis suatu bangsa, berarti makin mudah mewujudkan terciptanya masyarakat madani.

#### ***d. Meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers***

Di dalam kehidupan masyarakat madani, pers memiliki peran untuk melakukan kontrol sosial. Namun tentunya, fungsi kontrol harus dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan etika jurnalistik.

Kontrol sosial yang dilakukan pers hanya dapat terwujud bila terdapat perlindungan terhadap pers. Terciptanya kebebasan pers, yaitu berkembangnya media massa baik cetak maupun elektronik yang sanggup berfungsi mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melakukan fungsi kontrol sosial.

Kebebasan pers merupakan salah satu syarat demokrasi. Makin banyak syarat demokrasi terpenuhi, berarti makin mudah membawa masyarakat ke arah masyarakat madani.

#### ***e. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial***

Terbentuknya lembaga penegak hukum harus mampu mencerminkan berlakunya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju suatu tatanan masyarakat madani atau *civil society* Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan semangat reformasi. Di dalamnya terkandung semangat untuk mewujudkan ketaatan kepada hukum untuk semua orang dan bukan hanya untuk kepentingan penguasa. Setiap orang sama di depan hukum, sehingga dituntut kedisiplinan yang sama terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.

Terciptanya perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, mampu menghilangkan diskriminasi di bidang hukum. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga hukum berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial, merupakan karakteristik masyarakat madani.

**f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan**

Pendidikan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu diciptakan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang baik, menekankan pada aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan berbangsa. Identitas kebangsaan hanya bertahan jika sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang mengacu pada nilai-nilai kultural bangsa dilakukan melalui lembaga pendidikan.

Makin baik sistem pendidikan, makin banyak pula tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan prinsip-prinsip masyarakat madani.

**g. Menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa**

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Keanekaragaman budaya tersebut menciptakan pula keanekaragaman pemikiran, pola-pola perilaku, dan tradisi. Kesemuanya memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan dilestarikan. Untuk itulah, bangsa Indonesia perlu menghayati dan mengamalkan semangat kebhinnekatunggalikaan.

Perbedaan yang dimiliki setiap suku bangsa merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan budaya daerah akan memberikan sumbangan bagi perkembangan rasa kesatuan bangsa Indonesia. Pluralisme bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kebanggaan sebagai identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar. Bila bangsa Indonesia dapat menghargai pluralisme, berarti salah satu syarat menjadi masyarakat madani telah terpenuhi. Masyarakat plural merupakan ciri masyarakat madani.



*Sumber: blogdetik.com*

*Gambar 2.11 Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan prinsip-prinsip masyarakat madani.*

### Pemetaan Civil Society

Pemetaan tentang civil society pernah dilakukan oleh Michael W. Foley dan Bob Edwards yang menghasilkan Civil Society I dan Civil Society II. Namun dalam perkembangannya, terdapat analisis yang mencakup dari kedua aspek (Civil Society I dan II), hingga menghasilkan kombinasi atau tipe Civil Society III.

1. Dalam wacana Civil Society I lebih menekankan aspek horizontal dan biasanya dekat dengan aspek budaya.
2. Wacana dalam Civil Society II memfokuskan pada aspek vertikal dengan mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara dan erat dengan aspek politik.
3. Pembahasan Civil Society III merupakan upaya untuk mempertemukan Civil Society I dan Civil Society II.

*Sumber: [www.politikKita.co](http://www.politikKita.co)*

## 5. Kendala dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Terciptanya masyarakat madani, menjadi cita-cita ideal setiap bangsa. Namun tentunya, cita-cita tersebut perlu diwujudkan dengan usaha keras. Diperlukan juga daya tahan yang tinggi untuk mengatasi berbagai kendala, baik kendala yang berkaitan dengan struktur sosial, maupun kendala yang berkaitan dengan keadaan masyarakat.

Berbagai permasalahan bangsa juga menjadi kendala dalam mewujudkan terciptanya masyarakat madani. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani antara lain:

- a. terjadinya krisis perekonomian,
- b. masih kuatnya perilaku korupsi,
- c. ancaman disintegrasi bangsa,
- d. belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia,
- e. belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia,
- f. kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku,
- g. rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara,
- h. kurangnya perangkat hukum,
- i. rendahnya kesadaran hukum.

Berbagai kendala tersebut perlu diatasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Usaha untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Untuk itulah, cara untuk menanggulangi kendala juga harus dipikirkan bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi kendala. Pemerintah dan masyarakat juga harus bersama-sama melaksanakan cara-cara tersebut secara konsekuen.

### Partisipasi Warga Solo Tertinggi Pelaksanaan Pilkada di Jateng

Rabu, 28/04/2010 09:00 WIB - cka/yok

SOLO,-Tingkat partisipasi masyarakat Kota Solo dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) rupanya yang paling tinggi di Jawa Tengah. Dalam proses pemilihan yang berlangsung Senin (26/4) lalu, diketahui sebanyak 71 persen masyarakat Solo ikut berpartisipasi dalam Pilkada.

“Sejauh ini ternyata Solo yang paling tinggi partisipasi masyarakatnya dalam Pilkada di Jateng,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Fikri Fakhri, Selasa (27/4). Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Kantor Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Solo.

DPRD Jateng memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kota Solo terhadap partisipasi masyarakatnya. Menurutnya, dari 17 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada di tahun ini, Kota Solo masih berada di tingkat teratas sehubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

“Dari beberapa kabupaten/kota yang sudah menggelar Pilkada, sebelumnya yang tertinggi Kabupaten Purbalingga dengan partisipasi sebesar 66 persen. Namun kemudian ternyata Kota Solo lebih tinggi lagi (tingkat partisipasi-red) dengan 71 persen,” papar dia.

.....  
.....

*Sumber: harianjoglosemar.com*

Dari artikel di atas kita dapat memahami sebagian kecil dari dinamika demokrasi dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa di atas memberikan gambaran bagi kita mengenai perilaku demokratis yang diterapkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, tanpa kekerasan dan kecurangan. Demokrasi memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara damai di Indonesia.

## Aktivitas Mandiri

1. Carilah referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan masyarakat madani!
2. Buatlah presentasi yang berkaitan dengan masyarakat madani! (Bila perlu gunakan powerpoint)
3. Presentasikan di hadapan teman-teman sekelas Anda!
4. Buatlah rangkuman dari keseluruhan hasil presentasi!



Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah/ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi yang dianut di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.



*Sumber: wordpress.com*

*Gambar 2.12 Demokrasi Pancasila dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.*

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, merupakan dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Dalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip demokrasi bukan prinsip-prinsip kediktatoran. Dengan demikian, sistem politik yang sesuai dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila.

### **1. Pengertian Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dengan sila yang lainnya.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Beberapa pengertian tersebut yaitu:

#### **a. Menurut Ensiklopedia Indonesia**

Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

#### **b. Menurut Prof. Dardji Darmadihardja, S.H.**

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

**c. Menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H.**

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.

## **2. Isi Pokok dan Ciri Khas Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila merupakan ide atau gagasan yang ingin diterapkan oleh para pendiri negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotongroyongan mempunyai ciri khas yang membedakan demokrasi yang lainnya.

Ciri khas demokrasi Pancasila adalah:

- Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas.
- Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.

Isi pokok demokrasi Pancasila adalah:

- Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.
- Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.
- Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

## **Aktivitas Mandiri**

***Anda tentunya telah memahami pengertian demokrasi Pancasila. Sekarang coba Anda analisis hal-hal yang terkait dengan demokrasi Pancasila! Selanjutnya, buatlah definisi demokrasi Pancasila menurut pendapat Anda! Jelaskan pula ciri khas demokrasi Pancasila berdasarkan definisi yang Anda buat!***

Sementara itu dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila berlandaskan:

- a. Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan.
- b. UUD 1945
  - 1) Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “ ... maka disusunlah suatu Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ....”
  - 2) Batang Tubuh  
Pasal 1 Ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar.
- c. Tap MPR RI No. XII/MPR/1998 tentang pembahasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden.
- d. Undang-undang, yang terdiri:
  - 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat,
  - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Parpol,
  - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemilu,
  - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

### 3. Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terdiri dari:

- a. *Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa*, maksudnya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. *Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia*, maksudnya dalam demokrasi Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- c. *Demokrasi yang berkedaulatan rakyat*, maksudnya kepentingan rakyat banyak harus diutamakan daripada kepentingan pribadi.
- d. *Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara*, maksudnya bahwa dalam demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi.
- e. *Demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan*, maksudnya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing.
- f. *Demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah*, maksudnya bahwa negara menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. *Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum*, maksudnya bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

- h. *Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak*, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.
- i. *Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat*, maksudnya adalah demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin.
- j. *Demokrasi yang berkeadilan sosial*, maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, ada dua asas yaitu:

- a. *Asas kerakyatan*, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
- b. *Asas musyawarah untuk mufakat*, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama.



Sumber: wordpress.com

Gambar 2.13 Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu asas demokrasi Pancasila.

#### 4. Aspek Demokrasi Pancasila

Ada beberapa aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, yaitu:

##### a. Aspek material (segisi/subtansi)

Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Maka dari itu, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.

### ***b. Aspek formal***

Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.

Menurut Prof. S. Pamudji, Demokrasi Pancasila mengandung aspek sebagai berikut:

#### ***a. Aspek formal***

Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila membahas persoalan dan cara rakyat menunjuk wakil-wakil dalam badan-badan perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.

#### ***b. Aspek material***

Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat serta martabat manusia, menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut.

#### ***c. Aspek normatif***

Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengungkap seperangkat norma atau kaidah yang mengatur dan membimbing manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Norma-norma yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain norma agama, norma hukum, norma persatuan dan kesatuan, dan norma keadilan.

#### ***d. Aspek optatif***

Mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV.

#### ***e. Aspek organisasi***

Dalam aspek ini, organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

#### ***f. Aspek kejiwaan***

Aspek kejiwaan mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila memberi motivasi dan semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan.

Selain itu, demokrasi Pancasila juga mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. lembaga-lembaga negara,
- b. partai politik dan golongan karya,
- c. otonomi daerah,
- d. pola pengambilan keputusan/tata cara musyawarah,
- e. pemilihan umum,
- f. peraturan perundangan/sumber tertib hukum,
- g. pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia,
- h. sistem pembagian kekuasaan.

## • Nilai-Nilai Pancasila

*Demokrasi merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Para founding father menyadari bahwa demokrasi merupakan budaya luhur yang harus terus dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila, terutama sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan sila tersebut. Dalam pelaksanaannya, demokrasi harus dijiwai sila-sila lainnya.*

### 5. Sikap Positif dalam Rangka Pengembangan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila perlu harus dikembangkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dan dukungan warga negara terhadap pemerintahan. Peran aktif warga negara tersebut dapat tercermin dalam sikap positif terhadap pembangunan demokratis. Sikap positif warga negara dapat meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat.

Sikap positif warga negara tersebut antara lain:

- a. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada menumbuhkembangkan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta politik masyarakat, termasuk upaya pemantapan keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokratis dan tegaknya hukum berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 demi terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, kemantapan mekanisme demokrasi Pancasila, serta kemantapan mekanisme suksesi kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945.
- d. Turut mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
- e. Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut berguna untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam pembangunan nasional.
- f. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui wadah penyalur aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mendukung otonomi daerah yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan adanya sikap-sikap yang positif terhadap pengembangan demokrasi Pancasila, diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang demokratis sebagaimana ide atau gagasan para pendiri negara sejak awal.

Di samping itu, untuk tetap menciptakan iklim demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dijahui sikap-sikap politik yang dapat merusak suasana demokratis. Sikap-sikap politik tersebut antara lain:

**a. Liberalisme**

Sikap politik liberalisme menginginkan kebebasan individu dalam seluruh bidang kehidupan. Liberalisme ini menganut prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang mutlak dan tidak ada suatu kekuasaan yang boleh melanggar hak-hak tersebut. Dalam liberalisme, negara berfungsi sebagai pelindung dari hak-hak kebebasan individu tersebut tanpa harus ikut mencampurinya.

**b. Radikalisme**

Sikap politik radikalisme merupakan perwujudan sikap ketidakpuasan, dendam dan benci terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan landasan filsafat yang membenarkan ketidakpuasannya. Radikalisme menginginkan pembahasan segala sesuatu sampai pada akar permasalahannya. Untuk memperjuangkan rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, kaum radikal membuat program yang tepat dan biasanya berupa kesatuan/aritik dengan membandingkan keadaan sekarang yang mengecewakan dengan bentuk masyarakat yang ideal. Radikalisme ini pada akhirnya melahirkan revolusi, baik dalam bidang politik maupun sosial.

**c. Konservatisme**

Konservatisme merupakan suatu doktrin yang menghendaki dan mengusahakan terus berlangsungnya situasi dan kondisi yang sudah berlangsung sekian lama (*status quo*). Kaum konservatif biasanya menentang perubahan-perubahan besar dalam masyarakat. Dasar pemikiran konservatisme adalah agama atau adat istiadat yang sudah melembaga. Konservatisme menolak adanya perubahan dan revolusi yang berarti dalam masyarakat.

**d. Anarkisme**

Anarkisme menginginkan kebebasan yang mutlak tanpa adanya pembatasan apapun bagi setiap individu di dalam seluruh aspek kehidupan. Doktrin ini menganggap bahwa kekuasaan negara hanya akan mengekang kebebasan individu dan menganggap bahwa ketertiban masyarakat hanya merupakan suatu cita-cita yang tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, rakyat tidak memerlukan negara dalam setiap tindakannya. Kaum anarki yakin bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh negara, dapat dilaksanakan sendiri dengan lebih baik secara bersama-sama.

## **Arena Diskusi**

***Lakukan kegiatan berikut ini!***

- 1. Buatlah kelompok dengan anggota 3-5 orang!***
- 2. Amati atau carilah peristiwa-peristiwa di sekitar Anda!***
- 3. Identifikasikan peristiwa yang tidak mendukung tumbuh dan berkembangnya demokrasi Pancasila!***
- 4. Identifikasikan peristiwa yang mendukung tumbuh dan berkembangnya demokrasi Pancasila!***
- 5. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan Anda!***





## Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak awal berdirinya. Perkembangan sistem demokrasi berlangsung sejak tahun 1945 hingga masa sekarang. Berbagai model demokrasi pernah diterapkan di Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

### 1. Bentuk-Bentuk Demokrasi yang Berlaku di Indonesia

Berikut ini adalah perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi.

#### a. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 )

Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fisik di Indonesia. Bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Karena itulah, demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu.

Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 (dihapus berdasarkan amandemen IV tahun 2002 ). Pada pasal tersebut tertulis *“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”*. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat antara lain:

- 1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan KNIP menjadi Lembaga Legislatif.
- 2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
- 3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Presidensial menjadi Parlementer.

#### b. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal (1950 - 1959)

Pada masa antara tahun 1950-1959, Indonesia memberlakukan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Pada masa demokrasi liberal, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Setiap partai hanya memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Masa demokrasi liberal ditandai dengan berubahnya sistem kabinet ke sistem parlementer. Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri.



Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki pada masa pelaksanaan demokrasi parlemen, yaitu:

- 1) Berkembangnya partai politik pada masa tersebut. Pada masa ini, terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu multipartai. Melalui pelaksanaan pemilu, berarti negara telah menjamin hak politik warga negara.
  - 2) Tingginya akuntabilitas politik.
  - 3) Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif.
- Adapun kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal adalah:
- 1) Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante digunakan sebagai ajang konflik kepentingan.
  - 2) Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru.
  - 3) Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik untuk memahami proses politik.

### Info Khusus

Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umumnya akan ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi. Hal tersebut yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektivitas kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru, sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum akan mampu menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Tantangan bagi konsolidasi demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan tidak justru hanyut oleh permasalahan-permasalahan itu.

*Sumber: [www.ginanjari.com](http://www.ginanjari.com)*

Kegagalan sistem parlementer dibuktikan dengan kegagalan parlemen menyusun konstitusi negara. Sidang konstituante mampu memenuhi harapan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

- a. menetapkan pembubaran konstituante,
- b. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950,
- c. pembentukan MPRS dan DPAS.



*Sumber: [wordpress.com](http://wordpress.com)*

Gambar 2.14 Dekrit Presiden 1959 menjadi penanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia.

### c. *Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin (1959 - 1965)*

Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenal dengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata *dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”.

Ciri umum demokrasi terpimpin antara lain:

- 1) dominasi seorang pemimpin atau presiden,
- 2) terbatasnya peran partai politik,
- 3) berkembangnya pengaruh komunis atau PKI.

Terdapat beberapa penyimpangan konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, di antaranya:

- a. pemusatan kekuasaan di tangan presiden,
- b. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah,
- c. pengangkatan presiden seumur hidup,
- d. rangkap jabatan yang dilakukan presiden,
- e. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.
- f. konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis),
- g. terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan,
- h. kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis.
- i. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN seharusnya dibuat oleh MPR.

### d. *Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966 - 1998)*

Berakhirnya pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama. Orde berganti dengan Orde Baru. Masa pemerintahan baru ini berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.



Sumber: wordpress.com

Gambar 2.15 Presiden Suharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun.

Segala macam penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dibenahi oleh Orde Baru. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Masa sejak tahun 1969 menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk hidup dengan harapan.

Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahapan pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun) dilaksanakan menyeluruh di wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR/MPR. Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru juga terjadi berbagai penyimpangan, antara lain:

- a. Terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus pada otoriter.
- b. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata.
- c. Merebaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintahan.
- d. Terjadi monopoli di bidang perekonomian oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
- e. Tidak adanya pembatasan jabatan presiden.

*e. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998 - sekarang)*

Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:

- a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.
- b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN
- d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
- e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan.

Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu:

- a. banyaknya partai politik peserta pemilu,
- b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,
- c. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.
- d. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas *luber dan jurdil*,
- e. pemilihan kepala daerah secara langsung,
- f. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.

## 2. Pemilihan Umum di Indonesia

Terbukanya gerbang era reformasi pada tahun 1998, mengobarkan semangat demokrasi yang makin kuat di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dulu sempat lama terbenung di era Orde Baru, menjadi agenda utama pemerintahan reformasi. Oleh karena itu, dibutuhkan program-program guna menyosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut.

Pemilihan umum yang *luber dan jurdil*, menjadi gerbang pembuka pelaksanaan kehidupan bernegara yang bersih. Pemilu juga menjadi pintu gerbang pembuka sosialisasi dan transformasi nilai demokrasi. Terealisasinya pemilu langsung oleh rakyat biasa menjadi bukti nyata suksesnya agenda tersebut. Akan tetapi di lain sisi masih banyak terjadi peristiwa atau fenomena yang menyimpang bahkan sama sekali tidak demokratis. Masih banyak sekali terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan atau kebebasan pers yang berujung pada pertikaian dan saling membuka aib.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa peristiwa dan fenomena tersebut adalah akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

### a. Peristiwa pemilu di Indonesia

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 dipersiapkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

- 1) *Tahap pertama*, adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
- 2) *Tahap kedua*, adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pemilu diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama setelah Orde Baru. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu 1971 adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik. Dengan demikian, hanya terdapat dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu Golongan Karya (Golkar).

Dengan adanya fusi partai politik, pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru hanya diikuti 3 kontestan. Pemilu dengan tiga kontestan berlangsung pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pada tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi. Pada masa ini berlangsung pemilu pertama pada tahun 1999. Pemilu 1999 dilaksanakan pada tahun pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Hal tersebut sama seperti yang berlangsung pada masa Orde Baru. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatra Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan datangnya perlengkapan pemungutan suara.



*Sumber: wordpress.com*

*Gambar 2.16 Pemerintahan Presiden B.J Habibie berhasil melaksanakan Pemilu 1999 dengan aman dan damai..*

Pemilu pada masa reformasi berlangsung kembali pada tahun 2004 dan 2009. Mulai pelaksanaan Pemilu 2004, terdapat perubahan tujuan pelaksanaan pemilu. Pemilu tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat, akan tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara.

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

## Arena Diskusi

***Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan di depan kelas!***

1. Bagaimana dengan pelaksanaan demokrasi saat ini, apakah sudah lebih baik dari kurun waktu sebelumnya? Bagaimana tanggapan Anda?
2. Pelaksanaan demokrasi saat ini dilihat dari kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat memang lebih terbuka dibanding dengan kurun waktu sebelumnya (Orde Baru). Akan tetapi kebebasan tersebut seakan-akan tanpa batas sehingga akhirnya terjadi situasi perdebatan politik dan hukum yang berkepanjangan.  
Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasan Anda!

## Info Khusus

### Peserta Pemilu 2009

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi	Status PT
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.870	3,77%	17	3,04%	Lolos
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40%	0	0,00%	Tidak lolos
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,72%	0	0,00%	Tidak lolos
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406	4,46%	26	4,64%	Lolos
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%	Tidak lolos
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%	Tidak lolos
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7,88%	57	10,18%	Lolos

No.	Partai	Jumlah suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi	Status PT
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	46	8,21%	Lolos
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%	Tidak lolos
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%	Tidak lolos
12	Partai Persatuan Daerah	550.581	0,53%	0	0,00%	Tidak lolos
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	28	5,00%	Lolos
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%	0	0,00%	Tidak lolos
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0	0,00%	Tidak lolos
17	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0	0,00%	Tidak lolos
18	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%	Tidak lolos
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%	Tidak lolos
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%	Lolos
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%	Lolos
25	Partai Damai Sejahtera	1.541.592	1,48%	0	0,00%	Tidak lolos
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%	0	0,00%	Tidak lolos
27	Partai Bulan Bintang	1.864.752	1,79%	0	0,00%	Tidak lolos
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14,03%	94	16,79%	Lolos
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
30	Partai Patriot	547.351	0,53%	0	0,00%	Tidak lolos
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	148	26,43%	Lolos
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.665	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47%	0	0,00%	Tidak lolos
41	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0	0,00%	Tidak lolos
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
43	Partai Sarikat Indonesia	140.551	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
44	Partai Buruh	265.203	0,25%	0	0,00%	Tidak lolos
<b>Jumlah</b>		<b>104.099.785</b>	<b>100,00%</b>	<b>560</b>	<b>100,00%</b>	

Sumber: id.wikipedia.org



### **b. Asas-asas pemilu**

Pemilihan umum di Indonesia menganut *asas luber* yang merupakan singkatan dari *langsung, umum, bebas, dan rahasia*. Asas *luber* sudah diberlakukan sejak masa Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula *asas jurdil*. Jadi asas pemilu menjadi *luber dan jurdil*. *Jurdil* merupakan akronim dari kata *jujur dan adil*. Asas *jujur* mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas *adil* adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas *jujur dan adil* mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

## **Aktivitas Mandiri**

***Menurut pendapat Anda, bagaimana perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia? Tuangkan pendapat Anda dalam bentuk ulasan singkat, kemudian kumpulkan hasilnya pada guru!***



## **Perilaku Budaya Demokrasi**

Perilaku demokratis adalah perilaku seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Sikap atau perilaku yang demokratis dapat mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Perilaku demokratis pada umumnya akan muncul dalam bentuk sebagai berikut:

### **1. Menerima Perlakuan yang Demokratis dari Orang Lain**

Contoh sikap menerima perlakuan yang demokratis dari orang lain di antaranya:

- menerima kritikan dengan lapang dada,
- menghargai pendapat dari orang lain,
- menyampaikan pendapat secara arif dan bijaksana,
- menghargai makna dialog dengan tidak mendominasi suatu pembicaraan,
- menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.

### **2. Berperilaku Demokratis kepada Orang Lain**

Contoh sikap berperilaku demokratis kepada orang lain di antaranya:

- tidak suka memaksakan kehendak,
- tidak suka memotong pembicaraan orang lain,
- tidak bersikap egois,
- akomodatif terhadap kepentingan umum,

- e. lebih mengutamakan kemampuan nalar dan akal sehat dalam berpendapat,
- f. santun dan tertib dalam memberikan pendapat dan gagasan,
- g. peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Secara khusus sikap demokrasi diartikan sebagai kesiapan atau kecenderungan untuk bertindak laku dengan mengutamakan kepentingan bersama, menghargai dialog yang kreatif dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Perilaku demokratis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat awal seorang anak menerima pendidikan demokrasi. Kebiasaan dalam keluarga ini dapat menjadi bekal ketika anak melakukan pergaulan di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **3. Perilaku Demokratis di Lingkungan Keluarga**

Pengenalan sikap demokratis dapat dimulai dari rumah. Setiap keluarga dapat menerapkan sikap demokratis bagi seluruh anggotanya. Beberapa contoh penerapan sikap demokratis dalam keluarga antara lain:

- a. saling menghargai pendapat,
- b. saling menghormati dan menyayangi satu sama lain,
- c. mendiskusikan permasalahan,
- d. dapat berbagi peran dalam keluarga,

### **4. Perilaku Demokratis di Lingkungan Sekolah**

Sekolah juga menjadi tempat anak mengenal, mengetahui, dan melaksanakan perilaku demokratis. Teori mengenai demokrasi diajarkan di sekolah. Anak juga dapat menerapkan teori yang telah dipelajari di sekolah.

Contoh perilaku budaya demokratis yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah:

- a. memilih ketua kelas,
- b. membuat struktur organisasi kelas,
- c. memilih ketua OSIS,
- d. membuat struktur organisasi kelas,
- e. berdiskusi,
- f. bermain bersama teman,
- g. menyusun program kerja OSIS.

### **5. Perilaku Demokratis di Lingkungan Masyarakat**

Penerapan perilaku demokratis makin dibutuhkan dalam pergaulan di masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Contoh perilaku budaya demokratis dalam lingkungan masyarakat adalah:

- a. memilih ketua RT, ketua RW, hingga kepala desa,
- b. melakukan musyawarah desa,
- c. menghargai perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan,
- d. mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.

## **6. Perilaku Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

### **a. Pemilihan umum**

Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Mulai tahun 2004, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah serta pasangan presiden dan wakil presiden. Bagi negara, pemilu menjadi tonggak pelaksanaan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat melaksanakan haknya untuk memilih wakil di parlemen serta pemimpin negara.

Pelaksanaan pemilu menunjukkan perilaku demokratis dalam suatu negara. Melalui pemilu, pelaksanaan pemerintahan dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan, tekanan, dan pengaruh pihak lain.

### **b. Pemilihan kepala daerah**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) menunjukkan pelaksanaan demokrasi masyarakat di daerah. Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pilkada dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pilkada menjadi indikator pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Dalam pilkada, masyarakat berhak memiliki pasangan pemimpin daerah sesuai dengan ketetapan hati masing-masing. Di tingkat provinsi, rakyat memilih gubernur dan wakil gubernur, di tingkat kabupaten, rakyat memilih bupati dan wakil bupati, di tingkat kota, rakyat memilih wali kota dan wakil wali kota.

### **c. Pembagian kekuasaan**

Dalam pemerintahan yang demokratis, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui pembagian kekuasaan. Seperti yang berlaku di Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

### **d. Kebebasan pers**

Pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Pers diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam proses demokratisasi. Pers perlu memperoleh kebebasan agar mampu melaksanakan perannya. Pers yang dilindungi kebebasannya adalah pers yang bertanggung jawab dan konstruktif.

### **e. Pluralisme**

Pluralisme menunjukkan keberagaman suatu bangsa. Perilaku demokratis ditunjukkan dengan adanya penghargaan terhadap keberagaman. Pluralisme harus dijamin oleh negara. Tidak ada pembeda antara kelompok mayoritas maupun minoritas. Semua suku, agama, ras, dan golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama di berbagai bidang kehidupan.

### **f. Kesetaraan hukum**

Perilaku demokratis ditunjukkan dengan kesetaraan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Penerapan hukum didasarkan pada fakta hukum dengan dilandasi norma hukum yang berlaku.

**g. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul**

Perilaku demokratis ditunjukkan dengan terjaminnya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kebebasan yang dimiliki harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kebebasan harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Kebebasan dilaksanakan dengan mengingat dan memperhatikan kebebasan orang lain.

### Refleksi

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik serta terwujudnya harapan masyarakat yaitu adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerja sama antarkelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.

Setelah mempelajari materi tentang Budaya Demokrasi menuju Masyarakat Madani, coba Anda renungkan dan pahami kembali makna dari penerapan budaya demokrasi. Bagaimana perilaku yang perlu diterapkan agar bangsa Indonesia mampu mewujudkan masyarakat madani yang demokratis? Sikap apa saja yang perlu dikembangkan? Sikap apa yang perlu dihindari? Prasyarat apa saja yang perlu dipenuhi?

### Rangkuman

- Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
- Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan.
- Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno.
- Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral.
- Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, membawa keuntungan bagi masyarakat.
- Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica.
- Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari dominasi salah satu lembaga atas lembaga yang lain.
- Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia saat ini belum bisa terwujud.
- Keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.



## Pilihan Ganda

**I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!**

1. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* dan *kratos/kratein*.  
Demos berarti ....
  - a. rakyat
  - b. bangsa
  - c. pemerintah
  - d. lembaga
  - e. negara
2. Pada masa Yunani Kuno, Negara Athena menerapkan sistem demokrasi ....
  - a. referendum
  - b. demokrasi liberal
  - c. demokrasi langsung
  - d. demokrasi perwakilan
  - e. demokrasi tidak langsung
3. *Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*.  
Pengertian demokrasi di atas dikemukakan oleh ....
  - a. Sigmund Freud
  - b. Aristoteles
  - c. Huntington
  - d. Abraham Lincoln
  - e. Louis IV
4. *Institutionalized peacefull settlement of conflict*, berarti ....
  - a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
  - b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
  - c. menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (membatasi pemakaian kekerasan/paksaan seminimal mungkin)
  - d. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
  - e. menjamin terselenggaranya perubahan secara alami dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
5. Asas pokok yang harus melandasi penerapan pemerintahan yang demokratis adalah ....
  - a. mufakat dan votting
  - b. permusyawaratan dan keadilan sosial
  - c. keterbukaan dan efektivitas
  - d. asas langsung dan tidak langsung
  - e. partisipasi rakyat serta pengakuan harkat dan martabat manusia
6. Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah ....
  - a. kebebasan individu
  - b. transparansi
  - c. persamaan hak
  - d. kedewasaan sikap
  - e. asas kekeluargaan

7. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lainnya guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.  
Pernyataan di atas dikemukakan oleh ....
- John Locke
  - Machiavelli
  - Zbighiew Rau
  - Cicero
  - A.S. Hikam
8. Menurut A.S. Hikam, *civil society* didefinisikan sebagai ....
- keterjaminan hak sosial dan hak individu
  - pemerataan pembangunan dan kesepahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
  - wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi
  - kerelaan dalam menyikapi setiap perubahan
  - kekuasaan di tangan masyarakat sipil
9. Self generating berkaitan dengan ....
- kesukarelaan
  - keswasembadaan
  - keswadayaan
  - kemandirian
  - norma-norma hukum
10. Berikut ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, kecuali ....
- democratic governance
  - democratic civilian
  - civil security
  - civil responsibility
  - civil resistant
11. Ciri khas dari pemerintahan yang bersih tercantum di bawah ini, kecuali ....
- dipercaya
  - mampu berkuasa
  - dapat diterima
  - dapat memimpin
  - pemerintahan bersih
12. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.  
Pernyataan di atas dikemukakan oleh ....
- Ramlan Surbakti
  - A.S. Hikam
  - Prof. Dardji Darmadihardja, S.H.
  - Mochtar Kusumaatmadja
  - Hendry B. Mayo

13. Berikut ini tercantum ciri khas demokrasi Pancasila, kecuali ....
- Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas.
  - Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.
  - Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
  - Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.
14. Berdasarkan aspek formal demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara ....
- melaksanakan kehendak rakyat
  - pembagian kekuasaan
  - pengambilan keputusan
  - pengawasan kelembagaan
  - pemerataan kekuasaan
15. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang tercantum dalam demokrasi Pancasila, kecuali ....
- amandemen undang-undang dasar negara
  - partai politik dan golongan karya
  - pola pengambilan keputusan/tata cara musyawarah
  - pemilihan umum
  - sistem pembagian kekuasaan
16. Prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang mutlak dan tidak ada suatu kekuasaan yang boleh melanggar hak-hak tersebut terkandung dalam ....
- vandalisme
  - liberalisme
  - sosialisme
  - anarkisme
  - aristokrasi
17. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 berisi tentang ....
- Pembentukan Partai Politik
  - Perubahan KNIP menjadi Lembaga Legislatif
  - Pengesahan Badan Konstituante
  - Pembekuan Komite Nasional
  - Perubahan Sistem Pemerintahan Presidensial menjadi Parlementer.
18. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah. Konsepsi tersebut terjadi pada masa ....
- demokrasi liberal
  - demokrasi terpimpin
  - orde baru
  - reformasi
  - awal kemerdekaan



19. Berikut ini beberapa hal yang dianggap sebagai penyimpangan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, kecuali ....
- a. terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus menjurus pada otoriter.
  - b. desentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata.
  - c. merebaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintahan.
  - d. terjadi monopoli di bidang perekonomian oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
  - e. tidak adanya pembatasan jabatan presiden.
20. Salah satu upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi adalah ....
- a. membatasi partai politik peserta pemilu
  - b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui lembaga perwakilan
  - c. pelaksanaan pemilu secara berkala
  - d. pemilihan kepala daerah secara langsung
  - e. pengaturan penyampaian aspirasi

## **Uraian**

### **II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!**

1. Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan bagi masyarakat. Apa saja keuntungan-keuntungan tersebut?
2. Apa manfaat prinsip *trias politica* dalam kehidupan demokrasi?
3. Apa yang menjadi tolok ukur tingkat pelaksanaan demokrasi di suatu negara?
4. Jelaskan kaitan antara penerapan kehidupan yang demokratis dengan terciptanya masyarakat madani!
5. Sebutkan contoh kebebasan dalam demokrasi!
6. Jelaskan harapan masyarakat yang berkaitan dengan reformasi dan demokrasi!
7. Apa saja sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani menurut Zbighiew Rau?
8. Jelaskan konsep *civil society* menurut bangsa Barat!
9. Bagaimana keterkaitan antara lembaga penegak hukum dengan terbentuknya masyarakat madani? Jelaskan!
10. Sebutkan kendala dalam mewujudkan masyarakat madani!
11. Apa landasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
12. Apa saja isi pokok demokrasi Pancasila?
13. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.  
Jelaskan maksud pernyataan di atas!
14. Uraikan yang dimaksud dengan konservatisme!
15. Apa saja penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin?



## Uji Kreativitas

1. Buatlah diagram yang menjelaskan mengenai hubungan antara demokratisasi dengan masyarakat madani!
2. Buatlah dalam kertas karton dengan ukuran besar (tampak bila ditempel di papan tulis)!
3. Tugas dapat pula Anda buat dengan memanfaatkan media komputer dan LCD!
4. Jelaskan diagram yang Anda buat dihadapan teman-teman Anda!



## Studi Kasus

1. Pahami cuplikan artikel berikut ini!
2. Susunlah pendapat Anda berdasarkan hasil analisis dari tema artikel yang telah Anda pahami!

### Landasan Teori:

1. Materi tentang Budaya Demokrasi menuju Masyarakat Madani.
2. Referensi yang membahas tentang Demokrasi.
3. Referensi yang membahas tentang Masyarakat Madani
4. Wawancara dengan narasumber

### Bahan Kajian:

Dahl memperkuat gagasan bahwa konsolidasi demokrasi menuntut budaya demokrasi yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi. Ia melandaskan penekanannya pada pentingnya budaya demokrasi pada asumsi bahwa semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan menghadapi krisis, dan budaya demokrasi yang tertanam dengan kuatlah yang akan menolong negara-negara demokrasi melewati krisis tersebut.

Implikasinya proses demokratisasi tanpa budaya demokrasi yang mengakar menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional atau konflik sosial, atau krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan yang terpecah. Sejalan dengan pemikiran Dahl, Huntington memfokuskan pada isu budaya demokrasi dalam hubungan antara kinerja dan efektivitas pemerintah demokratis baru dan legitimasinya, sebagai bentuk kepercayaan publik dan elit politik terhadap sistem nilai demokrasi.

Budaya demokratis harus berarti adanya pemahaman bahwa demokrasi bukanlah hanya sekedar pembagian kekuasaan sesuai dengan trias politika. Karena itu, konsolidasi demokrasi terjadi bila masyarakat menyadari bahwa demokrasi merupakan solusi dari masalah tirani.

Perilaku demokratis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat awal seorang anak menerima pendidikan demokrasi. Kebiasaan dalam keluarga ini dapat menjadi bekal ketika anak melakukan pergaulan di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Sumber:* [www.ginanjari.com](http://www.ginanjari.com)

# Bab

## 3

## Keterbukaan dan Jaminan Keadilan

### Pendahuluan

Sebagai warga masyarakat, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan adalah mengikuti pertemuan warga di kampung masing-masing. Banyak permasalahan yang dapat dibicarakan antarwarga kampung, seperti membahas rencana perbaikan jalan, membuat perencanaan pembangunan talud, menyusun jadwal kerja bakti, membuat jadwal ronda malam, dan sebagainya.

Dalam mengikuti rapat warga, setiap warga memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Tentunya pendapat tersebut disampaikan dengan baik. Pendapat juga harus disampaikan dengan jujur dan terbuka. Setiap anggota rapat tentunya berhak untuk mengeluarkan pendapat secara bebas dan terbuka demi tercapainya keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan di antara anggota rapat, diharapkan terjalinnya komunikasi di antara seluruh anggota rapat. Dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dan ketimpangan terhadap hasil keputusan rapat.

Apabila keterbukaan sudah membudaya dalam berbagai kehidupan, maka makin besar kemungkinan keadilan dapat terwujud. Hal tersebut karena setiap anggota rapat tidak ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan.

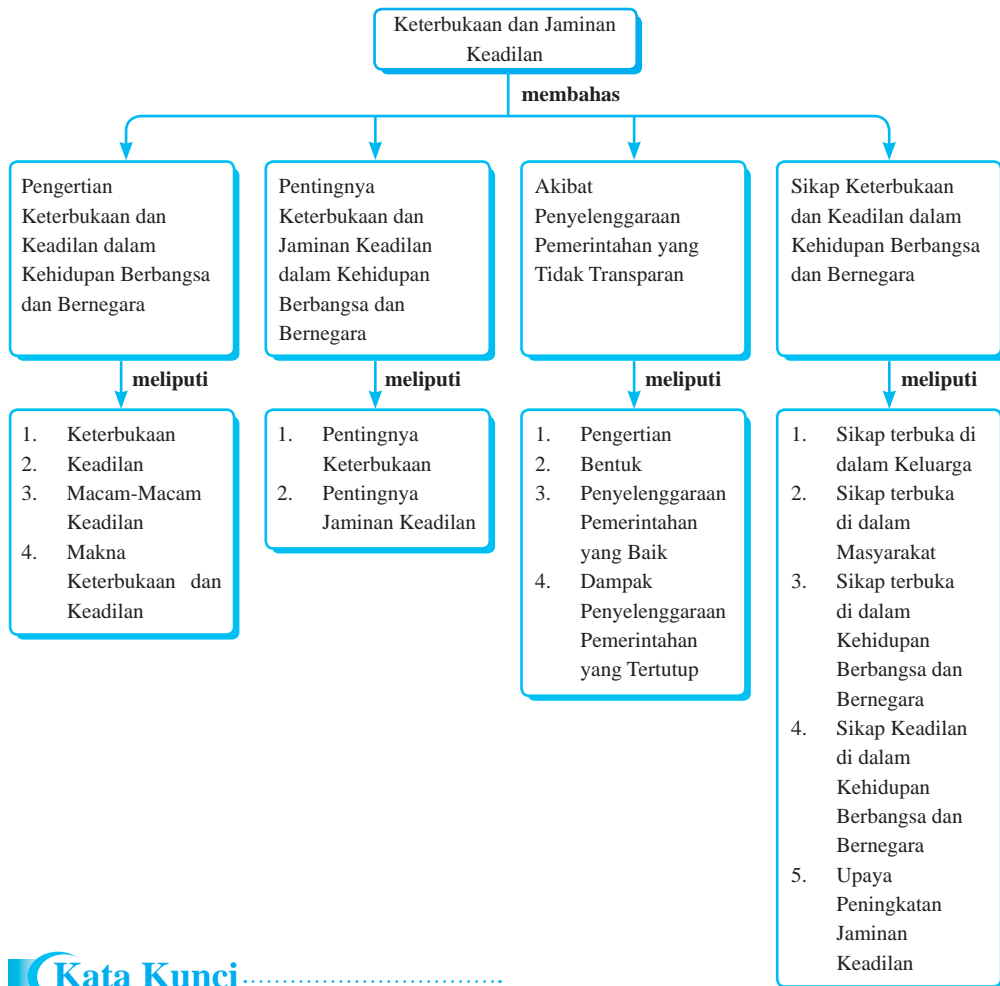


Sumber: [epress.anu.edu.au](http://epress.anu.edu.au)

Gambar 3.1

# Peta Konsep

## BAB 3



### Kata Kunci

- Keterbukaan
- Keadilan
- Pemerintah
- Pemerintahan
- Transparan



## Pengertian Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Keterbukaan dan keadilan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua hal tersebut dapat menghindarkan kesalahpahaman, baik antara sesama anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Kesalahpahaman dapat menimbulkan terjadinya konflik. Pada permasalahan kebangsaan, konflik masyarakat dapat menyebabkan perpecahan bangsa.



Sumber: [www.fica.org](http://www.fica.org)

Gambar 3.2 Konflik dalam masyarakat dapat disebabkan oleh kesalahpahaman.

Terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara keterbukaan dan keadilan. Keterbukaan dapat tercipta bila ada jaminan keadilan. Sebaliknya, keadilan dapat tercipta apabila ada keterbukaan.

### 1. Pengertian Keterbukaan

Menurut etimologi bahasa, keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya. Adapun keterbukaan dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, keterbukaan berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia. Keterbukaan sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena keterbukaan merupakan prasyarat bagi adanya komunikasi.

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam suatu kelompok. Di dalamnya, setiap anggota kelompok dituntut untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan anggota lainnya. Dalam melakukan interaksi, manusia melakukan komunikasi dengan orang lain baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, manusia berinteraksi antarindividu, antara individu dengan kelompok sosial, dan antara kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya. Secara vertikal, interaksi mengandung arti komunikasi di bawah sistem kekuasaan tertentu yaitu antara manusia sebagai warga negara dengan pemerintah atau antara penguasa dengan yang dikuasai.

Apabila dikaitkan dengan struktur kekuasaan tertentu, keterbukaan berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat, ide-ide, maupun gagasan sebagai wujud dari aspirasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, warga masyarakat juga harus menerima pendapat, saran, dan pembaruan dalam masyarakat demi tercapainya kemajuan bersama. Masyarakat harus sadar bahwa menutup diri hanya akan menghambat kemajuan. Budaya menutup diri membuat manusia cenderung berpikir picik dalam memandang suatu masalah, serta tidak mau menerima saran, kritik maupun pembaruan.

Keterbukaan juga diperlukan bagi pemerintah terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Pemerintah harus transparan dalam menerapkan suatu kebijakan serta tidak boleh memaksakan pelaksanaan suatu kebijakan tertentu kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut misalnya pemerintah harus memberitahukan kepada rakyat alasan dan langkah serta strategi pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diambil sesuai dengan batas-batasnya. Di samping itu, pemerintah pun harus mau mendengar kritik maupun saran dari rakyat dan menjawab segala pertanyaan dari rakyat.

Dalam hal keterbukaan, pemerintah harus menjadi pelopor bagi masyarakat dalam menciptakan keterbukaan demi terciptanya tatanan sistem politik yang demokratis. Meskipun keterbukaan sangat diperlukan, namun perlu diketahui pula batas dan tanggung jawabnya.

## Aktivitas Mandiri

***Menurut pendapat Anda, apa pengaruh keterbukaan terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan bersama kelompok Anda!***

## 2. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Ada beberapa pengertian mengenai keadilan yang pada dasarnya sama, antara lain:

- a. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, keadilan mengandung arti sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku/perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang menjadi haknya dan semestinya harus diterima oleh pihak lain.



- b. Menurut pendapat W.J.S Poerwadarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.
- c. Berdasarkan *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila*, keadilan diartikan sebagai keadaan yang menggambarkan di mana orang atau kelompok masyarakat atau negara memberi kepada setiap orang segala sesuatu yang menjadi haknya atau yang semestinya diterima sehingga setiap orang atau warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa rintangan.
- d. Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan adalah sesuatu keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama dihadapan hukum.

### Info Khusus

#### Pengertian Keadilan

1. **Aristoteles:** keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia .
2. **Plato:** keadilan berhubungan dengan diri manusia dalam mengendalikan diri dan perasaan dengan akalnya.
3. **Socrates:** keadilan keadilan akan tercipta bilamana setiap warga negara telah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. **Kong Hu Chu:** keadilan terjadi apabila setiap orang melaksanakan kewajibannya masing-masing yaitu anak sebagai anak, bapak sebagai bapak dan raja sebagai raja.

Sumber: [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

### 3. Macam-Macam Keadilan

Secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial.

#### a. Keadilan individual

Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Misalnya, seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya, sesuai kebutuhannya. Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya, tindakan ibu tersebut dikatakan tidak adil meskipun ia memberi secara sama rata.

Ada juga keadilan yang tidak tergantung dari kehendak individu orang-orang yang langsung bersangkutan. Misalnya, seorang pemilik pabrik makanan yang tidak dapat menaikkan upah buruhnya, karena tergantung harga produksi di pasaran. Sebagai seorang individu ia bukan orang yang tidak adil, namun secara objektif ia dipandang tidak adil karena memberi upah yang rendah pada buruhnya. Jadi, keadilan individual tidak hanya tergantung dari kemampuan individu yang langsung bersangkutan, namun juga tergantung dari struktur proses dalam masyarakat.

### **b. Keadilan sosial**

Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Adanya keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya/ketiadaan masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.

Keadilan sosial juga dapat dinilai dari meratanya pembangunan di berbagai daerah sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama. Dengan demikian, keadilan sosial juga dipandang sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.



*Sumber:* [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)

*Gambar 3.3 Pemerataan pembangunan merupakan contoh terciptanya keadilan sosial.*

Selain uraian di atas, itu ada beberapa jenis keadilan. Jenis-jenis keadilan menurut beberapa ahli antara lain:

#### **a. Aristoteles**

Aristoteles membagi keadilan menjadi empat jenis, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional.

##### **1) Keadilan komutatif**

Keadilan komutatif yaitu perlakuan sama terhadap semua orang dengan tidak melihat jasanya. Contohnya, setiap peserta didik memperoleh tugas yang sama, tanpa melihat kepandaian masing-masing.

##### **2) Keadilan distributif**

Keadilan komutatif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang dibuatnya. Contohnya yaitu pemberian nilai pada peserta didik sesuai dengan prestasi yang dimilikinya.

##### **3) Keadilan kodrat alam**

Keadilan kodrat alam yaitu memberikan sesuatu sesuai yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya yaitu setiap perbuatan baik dan jahat akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan tersebut.

#### 4) Keadilan konvensional

Keadilan konvensional yaitu apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan. Contohnya yaitu setiap warga negara telah menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan sebagainya.

### Tokoh

#### Aristoteles



Sumber: [biografiasyvidas.com](http://biografiasyvidas.com)

Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang hidup antara tahun 384 SM-322 SM. Bersama dengan Sokrates dan Plato, Aristoteles dianggap tiga orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat.

Aristoteles lahir di Stagira, sebuah kota di wilayah Chalcidice, Thracia, Yunani (dahulunya termasuk wilayah Makedonia tengah). Pada usia 17 tahun, Aristoteles bergabung menjadi murid Plato. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal, dan menjadi guru bagi Alexander Agung dari Makedonia. Saat Alexander berkuasa di tahun 336 SM, Aristoteles kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum. Ia memimpin akademi hingga tahun 323 SM.

Aristoteles banyak menulis tentang masalah logika. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif (deductive reasoning), yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif (inductive thinking). Selain itu, tulisannya juga banyak memberikan kontribusi untuk bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan politik.

Sumber: [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

#### b Plato

Plato membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural atau keadilan hukum.

##### 1) Keadilan moral

Keadilan moral yaitu keadilan yang didasarkan pada keselarasan, yang didasarkan pada pendapat bahwa keadilan timbul karena adanya penyesuaian yang memberi tempat yang selaras pada bagian-bagiannya.

##### 2) Keadilan prosedural atau keadilan hukum

Keadilan prosedural atau keadilan hukum yaitu sarana untuk melaksanakan keadilan moral.

### **c. Keadilan dalam filsafat politik**

Dalam filsafat politik, keadilan dibedakan menjadi 3, yaitu:

#### **1) Keadilan utilitaris**

Keadilan utilitaris maksudnya keadilan yang menekankan pada suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan kegunaan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian orang berdasarkan moral.

#### **2) Keadilan intuisisionis**

Keadilan intuisisionis maksudnya keadilan yang didasarkan pada intuisi (kebenaran yang tidak dapat dibuktikan). Keadilan ini tidak melihat baik atau buruk pemikiran logika. Oleh sebab itu, keadilan intuisisionisme mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- a) kurang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudi,
- b) bersifat sangat subjektif, karena tergantung pada orang yang memiliki kelebihan menangkap keadilan secara intuitif.

Keadilan intuisisionis tidak tepat diterapkan dalam negara demokratis karena keadilan tergantung pada persepsi intuitif dari sang pemimpin. Dalam negara demokratis, keadilan tergantung pada pemikiran logika masyarakat.

#### **3) Keadilan sebagai fairness**

Keadilan sebagai fairness maksudnya keadilan yang didasarkan pengalaman bahwa manusia merupakan yang rasional dan bermoral. Dalam konsep keadilan ini, manusia dituntut untuk selalu rasional, mempunyai kemampuan nalar yang baik, dan bermoral. Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam penentuan keadilan karena ukuran tergantung pada daya nalar masyarakat dan moral masyarakat.

Dengan adanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi adanya jaminan keadilan setiap orang. Bagi bangsa Indonesia jaminan keadilan telah tercantum dalam dasar negara maupun konstitusi negara. Beberapa contoh prinsip keadilan tersebut antara lain:

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea I, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ....”
- b. Pembukaan UUD 1945 alinea II, “.... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia ....”
- c. Tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- d. Pancasila sila kedua dan sila kelima.

Jaminan keadilan tersebut berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk mendapat keadilan dari negara. Selanjutnya, jaminan keadilan tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. dalam UUD 1945 tercantum pada Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 34,
- b. Undang-undang Nomor 39 tentang HAM pada Pasal 3 Ayat 2.

## Aktivitas Mandiri

***Coba jelaskan pendapat Anda mengenai pengaruh keterbukaan terhadap upaya dalam menegakkan keadilan di dalam masyarakat!***

### 4. Makna Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bagi bangsa Indonesia, kebulatan tekad dan semangat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara telah muncul terjadi dalam Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Peristiwa bersejarah tersebut mempunyai arti penting bagi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat penuh. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut karena pada saat itu, pemuda-pemuda dari beragam suku bangsa menyatakan satu tekad satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Dengan pernyataan untuk hidup bersama dalam satu wadah negara, bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah dari bumi pertiwi untuk mencapai kemerdekaan.

Pada masa sekarang, semangat Sumpah Pemuda harus menjadi pembangkit semangat dalam berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Mengingat kehidupan sebagai satu bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, maka perlu kita tanamkan kepada generasi penerus bangsa sejak dini.

Setelah diikrarkannya Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki babak baru kehidupan berbangsa, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, secara otomatis telah terwujud Negara Indonesia yang terdiri dari kesatuan wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Konsekuensi logisnya adalah bahwa orang-orang Indonesia yang dahulunya berada di bawah kekuasaan penjajah beralih menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban.



Sumber: wordpress.com

Gambar 3.4 Kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, dimulai sejak Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi interaksi antarwarga negara. Dalam interaksi tersebut, akan ditemukan banyak perbedaan baik itu bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Untuk menjaga hubungan yang baik, maka perlu adanya rasa saling menghargai, menghormati, percaya, dan sikap keterbukaan. Dengan sikap keterbukaan tersebut, diharapkan keadilan yang menjadi dambaan setiap manusia dapat terwujud sehingga jaminan keadilanpun diperolehnya.

Dalam kaitannya hubungan antarwarga negara dengan pemerintah, keterbukaan dijadikan landasan dalam mengambil tindakan atau menentukan kebijakan politik tertentu yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Semua warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah diambil secara terbuka dan tidak bertentangan dengan perasaan keadilan.

### **Nilai-Nilai Pancasila**

*Keadilan dan keterbukaan menjadi syarat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan menjadi hak setiap warga negara. Keadilan ditegakkan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Norma hukum dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil.*

### **Aktivitas Mandiri**

***Coba identifikasikan kebiasaan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat Anda yang sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keadilan!***



### **Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Hal tersebut karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan adat istiadat. Sebagai bangsa yang majemuk, tentunya rawan terhadap masalah-masalah sosial yang menjurus ke dalam perpecahan bangsa. Apabila antara anggota kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain tidak saling menghargai, menghormati, dan memercayai, dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan

Berawal dari pemahaman di atas, maka keterbukaan dan keadilan mempunyai peranan penting dalam menciptakan hubungan yang baik antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antara warga negara dengan pemerintah. Sikap keterbukaan dapat menghilangkan kesalahpahaman antara berbagai pihak, sehingga persatuan dan kesatuanpun dapat terjaga. Adapun dengan keadilan, semua orang akan memperoleh haknya sama sebagai warga negara. Apabila keadilan dapat terwujud dengan baik, maka persatuan dan kesatuan bangsa makin kokoh.

#### **1. Pentingnya Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Sesuai kodratnya, manusia melaksanakan peran sebagai makhluk sosial. Peran tersebut ditunjukkan dengan perilaku manusia untuk saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Keinginan untuk selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain tersebut



didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan tujuan bersama. Sebagai warga negara, bentuk interaksi dilakukan di antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah.

Hubungan antarwarga negara maupun dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik apabila dilandasi saling menghormati, menghargai, memercayai, dan saling terbuka. Dengan demikian, dapat dihindari diri berbagai permasalahan sosial seperti pertentangan, kesalahpahaman, dan konflik. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keterbukaan mempunyai peranan yang besar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya keterbukaan, di antara warga negara dan pemerintah saling memberikan kontribusi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Keterbukaan merupakan syarat bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat negara terbentuk karena kesepakatan kelompok-kelompok masyarakat.

Adanya keterbukaan dalam suatu negara menunjukkan kemampuan suatu negara menciptakan pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan dalam kemasyarakatan dan kenegaraan menjadi ciri pokok demokrasi. Keterbukaan berarti, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat, menyampaikan kritik, saran, koreksi, usul, dan untuk melakukan pengawasan, serta berhak membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan bersama sebagai bangsa.

Keterbukaan dalam pemerintahan dapat diterapkan dengan bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan. Pemerintah menyampaikan dan memberitahukan kepada rakyat segala kegiatan yang akan dilakukan untuk menentukan kebijakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga harus mau menerima segala macam kritik, saran dan usul demi kepentingan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang terbuka dan transparan, menjauhkan tindak penyalahgunaan maupun penyelewengan wewenang, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik, serta persatuan dan kesatuanpun makin kokoh.



*Sumber: infokorupsi.com*

*Gambar 3.5 Keterbukaan dalam pemerintahan dapat diterapkan dengan bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan.*



Kelangsungan hidup semangat persatuan dan kesatuan bangsa sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara, terutama dalam proses-proses politik yang menyangkut kepentingan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan sikap dan kemampuan untuk menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

- a. kemampuan menemukan, memelihara, dan menjaga kepentingan hidup bersama,
- b. kemampuan bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat istiadat,
- c. kemampuan menghargai dan menjunjung tinggi HAM,
- d. kemampuan menjaga nilai dan norma masyarakat,
- e. kemampuan menjadi bagian hidup masyarakat banyak,
- f. kemampuan untuk menjaga sikap dan perilaku diberbagai situasi.

## **2. Pentingnya Jaminan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Terciptanya suatu keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah bangsa termasuk bangsa Indonesia. Keadilan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia bukan keadilan yang diperuntukkan oleh sekelompok orang saja atau penguasa, namun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang menjadi dambaan seluruh umat manusia diharapkan mampu memberi jaminan keadilan bagi seluruh warga negara. Jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah berupa dasar negara, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan. Seperti jaminan keadilan yang terkandung dalam Pancasila sila ke-5, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Berpedoman pada sila tersebut, bangsa Indonesia ingin mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara.

Keadilan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya pada bidang tertentu saja, akan tetapi seluruh bidang yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui pembangunan di segala bidang. Keadilan akan tampak apabila hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia dan mampu menjamin kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Terwujudnya keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dengan adanya keadilan, seluruh masyarakat dapat merasa sama sebagai satu bangsa dan satu negara. Semua masyarakat diperlakukan sama, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masalah ketidakadilan yang membawa perpecahan bangsa akan dapat dihindarkan.

Di masa sekarang, masalah ketidakadilan yang sangat jelas adalah kemiskinan dan ketergantungan struktural yang terwujud dalam struktur proses politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan tersebut dapat memunculkan masalah disintegrasi bangsa. Hal tersebut tampak dengan munculnya gerakan separatis yang memiliki tujuan memisahkan diri dari NKRI. Contohnya adalah Gerakan Separatis Papua yang ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Mereka ingin mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Pengikut

gerakan separatis ini merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Indonesia. Mereka menganggap pemerintah Indonesia mengeruk kekayaan rakyat Papua yang dipusatkan di Jakarta.

Oleh karena itu, perlu diupayakan terciptanya keadilan yang merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk menciptakan keadilan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa pemerintah memiliki kewajiban melindungi seluruh rakyat dan memberi rasa keadilan sebagai dasar pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

## Arena Diskusi

*Perilaku seperti apa yang menurut Anda sesuai dengan prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Diskusikan bersama kelompok Anda!*

Untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah harus memberi jaminan keadilan dalam bentuk:

### **a. Pemerataan kesejahteraan hidup rakyat**

Masalah ketidakadilan yang paling jelas saat ini adalah kemiskinan dan ketergantungan struktural yang terwujud dalam struktur proses politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki struktur yang ada agar tercipta keadilan.

### **b. Mengembangkan rasa keadilan di bidang hukum**

Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945

### **c. Memberikan kesempatan yang sama dalam berpolitik**

Hal ini sesuai dengan pasal 28 UUD 1945

### **d. Memberi kebebasan warga negara dalam mengembangkan kebudayaan**

Hal ini sesuai dengan pasal 32 UUD 1945.

Jaminan keadilan diberikan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk memberi rasa kesamaan perlakuan bagi seluruh rakyat Indonesia diberbagai aspek kehidupan. Dengan adanya jaminan keadilan tersebut diharapkan negara Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keadilan mempunyai arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu:

### **a. Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial**

Dengan adanya jaminan keadilan setiap anggota masyarakat dapat saling memperhatikan kewajiban masing-masing dan diharapkan mampu menunjukkan perilaku positif antara lain:

- 1) memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa dengan orang lain,
- 2) tidak bersikap egois,
- 3) saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia,
- 4) mampu menyesuaikan diri dengan keadaan,
- 5) memiliki rasa kebersamaan dan persatuan yang kuat,
- 6) mengendalikan diri pada setiap tindakan dan kesempatan,
- 7) memiliki kepedulian dengan orang lain.

### **b. Memberi rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat**

Dengan adanya jaminan keadilan, masyarakat diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Jaminan keadilan diperlukan sebagai landasan pokok untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan hidup sehingga terciptalah keamanan dan ketertiban hidup dimasyarakat.

### **c. Menumbuhkan sikap kebersamaan hidup**

Dengan adanya jaminan keadilan, seluruh lapisan masyarakat akan merasa mendapatkan perlakuan yang sama sebagai makhluk pribadi dan sosial. Sebagai makhluk sosial manusia akan senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan menimbulkan kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, sehingga akan dapat menumbuhkan sikap kebersamaan hidup bermasyarakat.

### **d. Mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan**

Dengan adanya jaminan keadilan seluruh anggota masyarakat akan saling menghargai, menghormati, bekerja sama dan saling mengasihi, serta memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

### **e. Meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan**

Dengan adanya jaminan keadilan, seluruh anggota masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun adat istiadat. Karena memang pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

## **Potret Nusantara**

### **Laporan Kekayaan**

#### **Jubir Mengaku Presiden Sudah Beri Contoh**

*KOMPAS, Suhartono*

*Senin, 23 Agustus 2010 / 21:10 WIB*

JAKARTA, KOMPAS- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan contoh kepada para pejabat lainnya untuk sepenuhnya menyerahkan laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara. Contoh diberikan pada awal Maret lalu. Selain memberikan contoh, Presiden Yudhoyono juga disebutkan sudah mengingatkan para menteri dan pejabat pemerintah di daerah untuk melaporkannya.

“Dengan contoh dan imbauan tersebut, seharusnya para pejabat sudah menyerahkan laporan harta kekayaannya. Tidak ada alasan mereka menunda-menunda lagi. Dan, saya kira, mereka tidak ada yang menunda, tandas Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Senin (23/8) malam ini.

Menurut Julian, waktu itu, bersama Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri pada tanggal 4 Maret lalu di Kantor P residen, Kompleks Istana, Jakarta, Presiden telah menyerahkan laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara. Presiden juga telah mengingatkan harta kekayaan masing-masing penyelenggara negara oleh pejabat pemerintah lainnya, termasuk Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Julian menambahkan, waktu itu Presiden menegaskan, dengan penyerahan laporan harta kekayaan tersebut, ia sudah mencontohkan tradisi politik yang baik. Ini dinilai juga sesuatu yang sangat diharapkan oleh rakyat dan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Presiden menginginkan negara kita semakin bersih, yaitu dengan terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada jajaran pemerintah, jelas Julian.

*Sumber: Kompas.com*

Penggalan di atas menjadi teladan yang baik bagi bangsa Indonesia. Presiden sebagai pemimpin tertinggi di memberikan contoh yang baik mengenai keterbukaan. Presiden melaporkan harta kekayaan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Gambaran perilaku tersebut hendaknya dicontoh semua pejabat negara. Jabatan bukan menjadi media memperkaya diri tetapi merupakan amanat rakyat yang harus dilaksanakan.



## **Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan**

Negara Indonesia terbentuk atas kesepakatan bersama dan itikad baik oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam satu wadah NKRI. Hal tersebut berarti rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Namun untuk melaksanakan kedaulatan tersebut, rakyat tidak langsung memerintah dan menyelenggarakan kehidupan kenegaraan sendiri. Mereka memercayakan kekuasaan kepada para wakilnya

Penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia dijalankan oleh pemerintah . Dalam negara demokrasi, pemerintah merupakan lembaga yang disertai tugas oleh rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah berisi orang-orang yang disertai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pelaksanaan pemerintahan saat ini lebih diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia, lembaga perwakilan rakyat, masalah demokratisasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Pemerintah harus bebas dari KKN dan harus mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih, efektif, dan efisien.



Sumber: [www.primaironline.com](http://www.primaironline.com)

Gambar 3.6 Pemberantasan korupsi menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, berwibawa, bersih, efektif, dan

## 1. Pengertian Penyelenggara Negara

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV tertulis bahwa “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan tujuan negara diperlukan suatu lembaga untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu *Pemerintah Negara Indonesia*. Selain itu, juga tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan “Oleh karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara...”. Berarti penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh para penyelenggara negara.

Terdapat 2 pengertian penyelenggara negara, yaitu:

- Penyelenggara negara dalam arti luas, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Penyelenggara negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah (eksekutif).

Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penyelenggara negara terdiri dari:

- Penyelenggara di bidang eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, camat, wali kota, bupati.
- Penyelenggara negara di bidang legislatif, yaitu ketua MPR dan DPR, para anggota MPR, DPR, DPRD, DPD.
- Penyelenggara negara di bidang yudikatif, yaitu hakim, jaksa, penyidik dan panitera.

Jadi jelaslah bahwa yang menjadi penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pemerintah negara.

## 2. Bentuk-Bentuk Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara bergantung pada 2 hal, yaitu:

### a. Berdasarkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara,

Berdasarkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, bentuk pemerintahan negara dibedakan menjadi 3, yaitu:

### 1) *Bentuk pemerintahan monarki*

Bentuk pemerintahan monarki merupakan bentuk pemerintahan yang tertua. Monarki berasal dari bahasa Yunani, *mono* dan *archein*. Mono berarti satu dan *archein* berarti pemerintah. Jadi bentuk pemerintahan monarki adalah suatu praktik pemerintahan dengan kekuasaan yang dipegang oleh satu orang raja/ratu/kaisar. Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan rakyat harus patuh dan tunduk. Akibatnya, dapat terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat.

### 2) *Bentuk pemerintahan oligarki*

Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan negara dipegang beberapa orang.

### 3) *Bentuk pemerintahan demokrasi*

Demokrasi lahir sebagai tindakan perlawanan atas sistem pemerintahan oligarki yang gagal menyejahterakan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan negara dipegang rakyat. Pemerintahan ini memberikan hak-hak politik kepada warga negara secara bebas melalui demokrasi perwakilan.

### b. *Berdasarkan cara penunjukan kepala negara*

Berdasarkan cara penunjukan kepala negara, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi 2, yaitu:

#### 1) *Monarki*

Pemerintahan monarki dipegang oleh satu orang penguasa yang berlaku sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Raja berkuasa seumur hidup dan diperoleh melalui warisan secara turun-temurun, kekuasaannya mutlak.

#### 2) *Republik*

Pemerintahan republik merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dipilih oleh rakyat dan menduduki jabatan dalam kurun waktu tertentu. Kepala negara berkuasa atas rakyat sehingga kekuasaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

### 3. *Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*

Arti pemerintah berbeda dengan arti pemerintahan. Kata *pemerintah* berasal dari kata Yunani *kubernan* atau *nahkoda kapal* yang berarti menatap ke depan. Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat di masa depan, dan menentukan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat pada tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah merupakan aparat atau pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan. Jadi pada intinya pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara. Sedangkan pemerintah adalah pelaksana tugas dan kewenangan penyelenggaraan negara.

Penyelenggara pemerintahan negara yang baik (*good government*) merupakan tujuan dari bangsa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan. *Good government* ini dilandasi oleh pemahaman bahwa pemerintah adalah abdi masyarakat sehingga harus selalu siap melayani masyarakat dengan baik dalam hubungan timbal balik yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. *Good governance* ini berkaitan dengan tata penyelenggaraan yang baik.



Sumber: media.photobucket.com

Gambar 3.7 Good government berkaitan dengan tata penyelenggaraan yang baik.

Penyelenggara negara yang bersih berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 adalah penyelenggara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, dijadikan dasar dalam menyelenggarakan negara. Asas ini menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

## Aktivitas Mandiri

***Berikan contoh penyelenggaraan negara yang tidak transparan menurut pengetahuan yang Anda peroleh dalam kehidupan sehari-hari!***

Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih menurut UU No. 28 Tahun 1999 meliputi:

### a. Asas kepastian hukum

Berdasarkan asas kepastian hukum, setiap kebijakan penyelenggara negara harus mengutamakan hukum sebagai landasannya. Landasan hukum yang digunakan adalah undang-undang, keputusan, dan keadilan.

### b. Asas tertib penyelenggaraan negara

Berdasarkan asas tertib penyelenggara negara, setiap pengendalian penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan.

### c. Asas kepentingan umum

Berdasarkan asas kepentingan umum, setiap penyelenggaraan negara harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

### d. Asas keterbukaan

Berdasarkan asas keterbukaan, setiap penyelenggara negara harus membuka diri terhadap masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan negara, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



#### *e. Asas proporsionalitas*

Berdasarkan asas proporsionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan negara.

#### *f. Asas profesionalitas*

Berdasarkan asas profesionalitas, setiap penyelenggara negara harus mengedepankan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *g. Asas akuntabilitas*

Berdasarkan asas akuntabilitas, setiap negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan negara yang dilakukan kepada rakyat.

### Info Khusus

United Kingdom Overseas Development Administration (UK/ODA) menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut:

#### 1. Legitimasi

Legitimasi menekankan pada kebutuhan terhadap sistem pemerintahan yang mengoperasikan jalannya pemerintahan dengan persetujuan dari yang diperintah (rakyat), dan juga menyediakan cara untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan tersebut.

#### 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan performan perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungannya dengan kebebasan media.

#### 3. Kompetensi

Pemerintah harus menunjukkan kapasitasnya untuk membuat kebijakan yang efektif dalam setiap proses pembuatan keputusannya, agar dapat mencapai pelayanan publik yang efisien. Pemerintah yang baik membutuhkan kapabilitas manajemen publik yang tinggi, dan menghindari penghamburan dan pemborosan, khususnya pada anggaran militer yang tinggi. Pemerintah harus menunjukkan perhatiannya pada biaya pembangunan sosial, seperti: antikemiskinan, kesehatan, dan program-program pendidikan.

#### 4. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Pemerintah memiliki tugas (bukan hanya yang terdapat pada konvensi-konvensi internasional) untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politik yang berhubungan dengan kemajemukan institusi.

*Sumber: [transparansi.or.id](http://transparansi.or.id)*

Selain itu, penyelenggara negara juga harus mematuhi prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu:

- a. prinsip kepastian hukum,
- b. prinsip keseimbangan,
- c. prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan,
- d. prinsip bertindak cermat/saksama,
- e. prinsip motivasi untuk setiap keputusan,
- f. prinsip jangan menyalahgunakan kewenangan,
- g. prinsip permainan yang tulus,
- h. prinsip keadilan/larangan bertindak sewenang-wenang,
- i. prinsip pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan,
- j. prinsip meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan,
- k. prinsip perlindungan cara hidup pribadi.

Dengan menaati semua asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diharapkan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bebas dari KKN dapat tercapai. Selain itu, juga diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang berwibawa bersih dan transparan sehingga dapat mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

#### **4. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tertutup**

Penyelenggaraan pemerintahan negara sangat berpengaruh bagi perikehidupan rakyat dalam suatu negara. Apabila penyelenggaraan pemerintahan negara tertutup yaitu pemerintah tidak mau memberikan informasi yang menyangkut kepentingan bersama dan tidak mau membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, akan berakibat buruk terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ketertutupan berarti tidak adanya komunikasi dan informasi antara rakyat dan pemerintah, sehingga baik rakyat maupun pemerintah tidak tahu apa yang diinginkan oleh rakyat dan rakyatpun tidak tahu apa yang akan dilakukan pemerintah.

Dengan ketertutupan tersebut, rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik, koreksi, saran bahkan pemerintah tidak mau dikontrol. Keadaan semacam ini memberi peluang yang besar bagi pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, seperti KKN. Apabila kondisi semacam ini dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi protes dan mosi tidak percaya dari masyarakat sehingga akan meyulut kerusuhan yang dapat mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertutup mempunyai akibat negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat-akibat tersebut antara lain:

- a. tidak diakuinya hak-hak warga negara dalam pemerintahan (hak politik),
- b. pergantian pemerintahan secara periodik tidak merata,
- c. tidak adanya kebebasan untuk berbicara, menyampaikan aspirasi, dan pendapat,
- d. pelaksanaan pembangunan yang tidak merata,
- e. tidak diakuinya hak milik warga negara,
- f. kekuasaan dipegang oleh satu rezim tertentu,
- g. hukum negara tidak dijalankan dengan baik,
- h. terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan,
- i. merajalelanya tindak korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya.

## Aktivitas Mandiri

**Lakukan wawancara dengan beberapa warga masyarakat di desa tempat tinggal Anda mengenai keterbukaan antara warga masyarakat dengan perangkat desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat! Tanyakan hal-hal berikut ini!**

- 1. Apakah aspirasi warga masyarakat telah tersalurkan sebagaimana mestinya atau belum?**
- 2. Apakah kebijakan pemerintah desa selama ini sudah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat?**

**Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari hasil wawancara yang telah Anda lakukan!**



## Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, manusia selalu ingin menjalin hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Terdapat beberapa kendala dalam jalinan hubungan antarmanusia, di antaranya adalah struktur masyarakat heterogen, yaitu masyarakat dengan keanekaragaman perbedaan dan kepentingan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menciptakan konflik di antara anggota masyarakat. Untuk itu, diperlukan sikap keterbukaan agar terjalin hubungan yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Sikap keterbukaan dapat mengarahkan orang pada sikap toleransi antarmanusia, sehingga dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan serasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sikap keterbukaan harus dapat diterapkan oleh semua pihak baik rakyat sebagai warga negara maupun penguasa negara. Dengan berlandaskan sikap keterbukaan tersebut, bangsa Indonesia diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia.

### 1. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga menjadi tempat seorang manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup pertama kali. Keluarga juga menentukan sikap dan karakter seseorang dalam kehidupan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama dan berinteraksi. Mengingat kehidupan keluarga mempunyai peranan besar dalam pembangunan sikap dan karakter seseorang, maka sikap terbuka mulai ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga.

Sikap terbuka perlu dikembangkan dalam lingkungan keluarga agar setiap anggota keluarga dapat memahami maksud dan tujuan keluarga tersebut. Dengan sikap terbuka antara seluruh anggota keluarga, dapat menciptakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan keluarga yang harmonis dapat dicapai apabila terjadi:

- a. komunikasi secara terbuka dan demokratis antaranggota keluarga,
- b. masing-masing anggota mampu mengetahui hak dan kewajibannya.

Komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua menumbuhkan sikap saling memahami. Pada akhirnya, antaranggota keluarga dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Penanaman sikap terbuka dalam lingkungan keluarga diharapkan mampu menjadi landasan untuk menerapkan sikap terbuka dalam lingkungan yang lebih kompleks.

Contoh sikap terbuka dalam lingkungan keluarga antara lain:

- a. setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya,
- b. menyelesaikan permasalahan keluarga dengan musyawarah secara terbuka dan demokratis,
- c. setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing,
- d. apabila berbuat salah menerima segala saran maupun kritik dari anggota keluarga yang lain,
- e. saling menghormati dan menghargai antaranggota keluarga,
- f. apabila ada anggota keluarga yang bersalah, ditegur secara baik dan terbuka.

## 2. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Bermasyarakat

Masyarakat terdiri dari kumpulan keluarga yang memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan yang bermacam-macam. Dalam masyarakat, kita berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang dan karakteristik pribadi masing-masing. Sikap terbuka diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konflik kepentingan. Keterbukaan dijadikan landasan/dasar untuk melakukan interaksi dan komunikasi dalam pergaulan di masyarakat.

Sikap keterbukaan dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai dan bekerja sama antaranggota masyarakat. Keterbukaan dapat dilakukan oleh masyarakat jika:

- a. masing-masing anggota masyarakat memahami hak dan kewajibannya,
- b. setiap individu dapat memelihara keinginan dan kebutuhan bersama,
- c. setiap anggota masyarakat saling menghargai dan menghormati serta menjamin hak-hak orang lain,
- d. setiap anggota masyarakat mampu hidup menyatu dengan anggota lainnya,
- e. setiap anggota masyarakat harus mampu bekerja sama dengan orang lain secara terbuka.

Contoh sikap terbuka dalam kehidupan masyarakat antara lain:

- a. mau menerima kritik dan saran orang lain,
- b. saling mengingatkan apabila ada yang berbuat salah,
- c. memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi secara terbuka,
- d. tidak bergunjing, apabila ada yang salah ditegur secara terbuka,
- e. mengajukan usulan, pendapat, dan saran dalam rapat desa secara terbuka.



Sumber: wordpress.com

Gambar 3.8 Sikap keterbukaan dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai, dan bekerja sama antaranggota masyarakat.

### 3. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain serta antara warga negara dengan pemerintah. Sikap terbuka dalam hidup berbangsa dapat kita wujudkan dengan menumbuhkembangkan sikap saling menghormati, menghargai, memercayai, dan keadilan antarwarga. Sikap-sikap tersebut diwujudkan tanpa membedakan latar belakang suku bangsa, agama, maupun budaya.

Sikap terbuka dalam hidup bernegara dapat wujudkan dengan keikutsertaan warga negara untuk menentukan kehidupan negara, di antaranya:

- a. kesediaan memberikan saran, kritik, koreksi, kontrol, aspirasi maupun pendapatnya,
- b. membicarakan secara terbuka masalah-masalah kebijakan negara yang menyangkut kepentingan bersama.

Di samping itu, pemerintah juga harus terbuka kepada rakyat atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Pemerintah harus bersedia menerima saran kritik, koreksi dari warga negaranya, dan harus mau menjawab semua hal yang menyangkut kepentingan bersama. Sikap terbuka pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap negaranya. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah.

Sikap keterbukaan dapat dilaksanakan oleh bangsa dan negara apabila setiap warga negara:

- a. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
- b. mengakui hukum dan pemerintahan negara,
- c. menyadari tanggung jawabnya, saling menghargai, menghormati, dan menjamin hak-hak orang lain,
- d. mampu bekerja sama dengan warga negara lain dan saling terbuka,
- e. mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu:

- a. mengadakan kegiatan yang bermanfaat yang diikuti seluruh anggota suku bangsa seperti pentas seni dan olahraga yang didukung oleh pemerintah,
- b. mengadakan dialog antara berbagai suku bangsa dan pemerintah yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara secara terbuka,
- c. membentuk organisasi/kelompok lintas budaya yang didukung oleh pemerintah,
- d. mengadakan kunjungan antardaerah di seluruh Nusantara dengan seizin pemerintah.

Mengingat keterbukaan mempunyai peranan besar dalam kelangsungan hidup suatu bangsa, maka sikap keterbukaan perlu ditumbuhkembangkan dalam berbagai lingkungan. Oleh karena itu, keterbukaan mempunyai arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu:

- a. meningkatkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara,
- b. menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan,
- c. mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan,

- d. mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan,
- e. memperkuat dukungan rakyat terhadap penyelenggara negara,
- f. meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan,
- g. mempermudah hubungan kerja sama dengan bangsa lain.

#### 4. Sikap Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan keadilan sosial sangat diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan keadilan tersebut harus meliputi segala bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam bidang politik jaminan keadilan dituangkan dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan untuk berorganisasi. Dalam bidang ekonomi, dituangkan dalam Pasal 27 ayat 2 yang memberi pengakuan secara adil untuk mengembangkan ekonominya, berarti setiap warga negara dijamin untuk berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu hidup yang layak. Di bidang sosial budaya, setiap warga negara diberi hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Di samping itu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar proses pendidikan. Di bidang pertahanan dan keamanan, setiap warga negara ikut serta menjaga, membela, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila terancam. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1. Dengan adanya jaminan keadilan dalam semua aspek kehidupan tersebut diharapkan setiap warga negara dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi dan seimbang, sehingga tujuan nasional bangsa Indonesia dapat tercapai.

Di lain pihak, sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan jaminan keadilan. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan juga harus meliputi segala aspek kehidupan yaitu poleksosbudhankam (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) agar terjadi hubungan timbak balik yang harmonis dan seimbang. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan antara lain:

##### a. Dalam bidang politik, antara lain:

- 1) memberi kesempatan dan kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, aspirasi, baik berupa saran maupun kritik,
- 2) tidak memaksakan pendapat kepada orang lain,
- 3) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menduduki jabatan tertentu,
- 4) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk ikut serta dalam pemilu.



Sumber: wordpress.com

Gambar 3.9 Pemilu menjadi media bagi warga negara dalam mewujudkan partisipasinya dalam bidang politiknya.

**b. Dalam bidang ekonomi, antara lain:**

- 1) memberi kesempatan kepada orang lain untuk berusaha,
- 2) memberi kesempatan setiap orang untuk memiliki sesuatu,
- 3) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati hasil usahanya,
- 4) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mencapai hidup yang layak.

**c. Dalam bidang sosial dan budaya, antara lain:**

- 1) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengikuti pendidikan,
- 2) memberi kesempatan kepada orang lain untuk berprestasi dalam bidang pendidikan,
- 3) memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati sarana dan prasarana pendidikan dan ikut gerakan GNOTA,
- 4) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan kreativitasnya,
- 5) melindungi fakir miskin dan anak terlantar.

**d. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara lain:**

- 1) ikut membela negara apabila mendapat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam,
- 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
- 3) ikut aktif dalam kegiatan siskamling,
- 4) tidak melakukan perbuatan makar.

**e. Dalam bidang hukum, antara lain:**

- 1) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapat pembelaan,
- 2) menaati semua peraturan yang berlaku,
- 3) tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku seperti tidak melakukan KKN,
- 4) tidak mengganggu jalannya peradilan.

**f. Dalam bidang agama, antara lain:**

- 1) memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya,
- 2) memberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya,
- 3) tidak menghina agama dan kepercayaan orang lain,
- 4) tidak mencampuradukkan agama.

Dengan adanya keikutsertaan masyarakat untuk menentukan dan memberi pengawasan kepada pemerintah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang menjadi kesepakatan bersama rakyat dan pemerintah, upaya peningkatan jaminan keadilan dapat terwujud.

## **Arena Diskusi**

Anda telah mempelajari beberapa contoh sikap partisipasi keadilan dalam aspek poleksosbud dan hankam. Coba Anda jelaskan dampak yang terjadi bila tidak ada partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sikap keadilan dalam aspek-aspek tersebut! Diskusikan bersama kelompok Anda!

## **5. Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan**

Keadilan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya keadilan individu, akan tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dapat diukur dari pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia dapat ditempuh dengan langkah nyata



yaitu pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Tujuan dari Pembangunan Nasional Indonesia adalah mencapai masyarakat adil, makmur, merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya keadilan dalam pemerataan hasil pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan keadilan di segala bidang kehidupan.

#### **a. Prinsip-prinsip menegakkan keadilan**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia diusahakan untuk benar-benar mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukan sekelompok orang tertentu. Pembangunan yang dilaksanakan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang melandasi Pembangunan Nasional Indonesia agar arah dan tujuannya tidak menyimpang. Prinsip-prinsip sosial yang melandasi pembangunan nasional Indonesia antara lain:

- 1) Asas adil dan merata, artinya bahwa pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan usaha bersama dan harus merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, artinya bahwa pembangunan nasional harus seimbang antara kebutuhan material maupun spiritual.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut diharapkan pelaksanaan dan hasil pembangunan nasional dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dampak positifnya adalah menghindarkan munculnya masalah-masalah ketidakadilan yang mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan ancaman disintegrasi bangsa.



*Sumber: wordpress.com*

*Gambar 3.10 Penerapan prinsip sosial dapat menghindarkan bangsa dari masalah-masalah yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.*

#### **b. Landasan Keadilan bagi Masyarakat Indonesia**

Jaminan keadilan bagi masyarakat Indonesia terdapat dalam:

- 1) Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima.
- 2) Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea I, II, dan IV.
- 3) Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 34.
- 4) Tap MPR No.II/MPR/1999 tentang GBHN, terutama dalam bidang hukum yang menegaskan pentingnya “menegakkan hukum secara konsisten” untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM.

- 5) Pasal 3 Ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu “*Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di dalam hukum*”.
- 6) UU No.5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman dengan Kejam.
- 7) UU RI No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 8) Perpu No.1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.

## Refleksi

Indonesia menganut sistem demokrasi. Salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi keterbukaan adalah keharusan bagi setiap lembaga negara untuk memberikan informasi yang terbuka kepada seluruh masyarakat. Manfaat keadilan adalah tegaknya hukum dan kokohnya lembaga peradilan.

Prasyarat apa saja yang perlu dipenuhi agar Indonesia dapat berdiri sebagai negara demokrasi yang kokoh? Bagaimana peran serta warga masyarakat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis?

## Rangkuman

- Keterbukaan dan keadilan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada permasalahan kebangsaan, konflik masyarakat dapat menyebabkan perpecahan bangsa.
- Terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara keterbukaan dan keadilan.
- Keterbukaan adalah suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan sejujurnya sebagai landasan untuk berkomunikasi.
- Keterbukaan berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia.
- Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak.
- Keadilan adalah suatu keadaan di mana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.
- Keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial.
- Bagi bangsa Indonesia jaminan keadilan telah tercantum dalam dasar negara maupun konstitusi negara.
- Keterbukaan dan keadilan mempunyai peranan penting dalam menciptakan hubungan yang baik antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antara warga negara dengan pemerintah.

- Penyelenggara negara dalam arti luas, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Penyelenggara negara dalam arti sempit, yaitu pemerintah (eksekutif).
- Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat, memperkirakan arah perkembangan masyarakat di masa depan, dan menentukan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat pada tujuan yang telah ditetapkan.
- Pemerintah merupakan aparat atau pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan negara.
- Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan.



## Pilihan Ganda

**I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!**

1. Suatu sikap dan perasaan untuk selalu bertoleransi serta mengungkapkan kata-kata dengan jujur sebagai landasan untuk berkomunikasi disebut ....
  - a. keterusterangan
  - b. keharmonisan
  - c. keterbukaan
  - d. keadilan
  - e. keseimbangan
2. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai fungsi sebagai ....
  - a. sarana memperoleh kekuasaan
  - b. jalan pintas untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan
  - c. sarana mempertahankan kekuasaan
  - d. sarana untuk memperoleh hak-hak pribadi
  - e. sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Keadilan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan secara sama.  
Pernyataan tersebut merupakan pengertian keadilan menurut ....
  - a. Franz Magnis Suseno
  - b. Dr. Quraish Shihab
  - c. W.J.S Poerwadarminto
  - d. Aristoteles
  - e. Plato
4. Seorang siswa yang rajin dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Ia pun dapat memperoleh nilai yang bagus. Siswa tersebut memperoleh keadilan ....
  - a. komutatif
  - b. konvensional
  - c. kodrat alam
  - d. distributif
  - e. prosedural
5. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam ....
  - a. Pembukaan UUD 1945 alinea I
  - b. Pembukaan UUD 1945 alinea II
  - c. Pancasila sila ke-2
  - d. Pancasila sila ke-4
  - e. Pancasila sila ke-5
6. Keterbukaan tidak hanya diperlukan dalam masyarakat saja, tetapi juga pemerintah. Keterbukaan tersebut dapat diwujudkan dengan....
  - a. merahasiakan kebijakan yang diambil
  - b. tidak mau menerima aspirasi dari rakyat
  - c. menolak kontrol dari rakyat
  - d. tidak mau membicarakan masalah penting yang menyangkut kepentingan rakyat
  - e. menyampaikan kebijakan yang diambil demi kepentingan umum melalui media

7. Dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah harus memberi jaminan keadilan dalam bentuk memberi kesempatan yang sama dalam berpolitik yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal ....
  - a. 27 Ayat 1
  - b. 27 Ayat 2
  - c. 28
  - d. 30 Ayat 1
  - e. 31 Ayat 1
8. Akibat dari pemerintah yang tertutup bagi kehidupan bangsa dan negara tercantum berikut ini, kecuali....
  - a. pelaksanaan pembangunan tidak merata
  - b. kekuasaan negara dipegang oleh satu rezim
  - c. terhambatnya hak berbicara warga negara
  - d. hak-hak warga negara dalam pemerintahan (politik) diakui
  - e. tidak diakuinya hak milik warga negara
9. Penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kenegaraan kepada rakyat.  
Pernyataan tersebut sesuai dengan asas ....
  - a. akuntabilitas
  - b. profesionalitas
  - c. proporsionalitas
  - d. keterbukaan
  - e. kepastian hukum
10. Wujud partisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dalam bidang ekonomi yaitu ....
  - a. memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat
  - b. memberi hak dan kebebasan kepada setiap orang untuk memiliki sesuatu
  - c. memberi bantuan korban bencana alam
  - d. memberi pengayoman kepada seluruh masyarakat
  - e. saling menghormati antarsesama manusia
11. Situasi yang tampak pada masyarakat kota adalah kecenderungan hidup tertutup. Kondisi tersebut mendorong setiap individu untuk bersikap....
  - a. meraih prestasi yang diinginkan
  - b. bersikap takut
  - c. tata krama pada siapapun
  - d. rendah diri
  - e. bersikap diam pada situasi lingkungan hidupnya
12. Keterbukaan merupakan bagian hidup setiap orang yang dijalankan dengan ....
  - a. kesadaran untuk bersosialisasi
  - b. rasa keadilan dan kemanusiaan
  - c. ketergantungan pada kondisi lingkungan
  - d. menjunjung tinggi kepentingan pribadi
  - e. kekuatan eksistensi diri

13. Semangat persatuan dan kesatuan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, utamanya di bidang ....
  - a. sosial
  - b. ekonomi
  - c. budaya
  - d. hankam
  - e. politik
14. Pemerintah demokrasi memberikan hak-hak warga negara secara bebas terutama dalam bidang politik melalui demokrasi ....
  - a. terpimpin
  - b. langsung
  - c. liberal
  - d. perwakilan
  - e. tak langsung
15. Di bawah ini merupakan kelemahan dasar dari keadilan intuisionis, kecuali ....
  - a. manusia diturunkan martabatnya seperti hewan
  - b. keadilan intuisionis bersifat subjektif
  - c. tergantung pada orang yang memiliki kelebihan menangkap keadilan secara intensif
  - d. merendahkan martabat manusia
  - e. tak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16. Pembangunan merupakan upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan ....
  - a. nasional
  - b. nasionalis
  - c. intuitif
  - d. elegan
  - e. pragmatis
17. Menurut konsep keadilan fairnesis, manusia dituntut untuk berpikir ....
  - a. nasional
  - b. nasionalis
  - c. intuitif
  - d. elegan
  - e. pragmatis
18. Makna yang tersirat dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945, adalah pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia dalam bidang ....
  - a. politik dan sosial budaya
  - b. ekonomi, sosial budaya, dan hukum
  - c. hukum dan pendidikan
  - d. sosial budaya dan hankam
  - e. politik dan hukum
19. Dalam negara hukum, setiap warga negara tidak diberi jaminan ....
  - a. perlindungan HAM
  - b. kepastian hukum
  - c. perlindungan terhadap pelanggaran hukum
  - d. pengakuan HAM
  - e. peradilan bebas dan tidak memihak

20. Istilah peradilan yang bebas adalah peradilan yang ....
- bebas menentukan hukum menurut kehendak sendiri
  - memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.
  - menentukan hukum terhadap pelanggaran hukum
  - terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
  - sesuai kebiasaan masyarakat.

## **Uraian**

### *II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!*

- Sebut dan jelaskan jaminan keadilan yang diberikan oleh bangsa Indonesia kepada warga negaranya!
- Sebut dan jelaskan arti penting keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
- Berilah pendapat Anda, pihak-pihak yang harus memelopori budaya sikap terbuka! Berilah alasan atas jawaban Anda dengan contoh!
- Jelaskan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan!
- Sebutkan salah satu dasar hukum jaminan keadilan dari pemerintah kepada seluruh warga negara!
- Apa peran media massa dalam mewujudkan keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
- Jelaskan pelaksanaan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara!
- Jelaskan yang dimaksud dengan asas adil dan merata!
- Berkaitan dengan apa saja keterbukaan?
- Meliputi bidang apa saja jaminan keadilan untuk menjaga keutuhan NKRI?

## **Uji Kreativitas**

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdiri pada 10 Agustus 1998 disepakati berdirinya Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). MTI didirikan oleh 33 orang dari beragam latar belakang kaum profesional, wartawan, mahasiswa, pemuka bisnis, birokrat, dan perwira ABRI/TNI yang berpikiran maju.

Visi utama yang diemban MTI adalah “*Menjadi pelopor terwujudnya Sistem Integritas Nasional, dengan mendorong praktek-praktek yang bersih dan sehat di bidang bisnis, pemerintahan, dan masyarakat dalam arti seluas-luasnya*”. Visi itu diterjemahkan dalam Misi dan Strategi untuk mengupayakan perubahan sistemik dalam proses pembuatan kebijakan publik yang menyertakan partisipasi dan kontrol segenap elemen masyarakat. Selanjutnya Misi MTI dijabarkan dalam berbagai program yang secara garis besar meliputi bidang Kajian, Komunikasi, dan Kelembagaan.

*Sumber: [transparansi.or.id](http://transparansi.or.id)*



1. Buatlah materi presentasi sesuai dengan visi MTI!
2. Lakukan kajian pustaka dan wawancara sebagai sumber data!
3. Presentsikan hasilnya di depan kelas!

## **Studi Kasus**

### **Langkah Kegiatan:**

1. Pahami cuplikan artikel berikut ini!
2. Susunlah pendapat Anda berdasarkan hasil analisis dari tema artikel yang telah Anda pahami!

### **Landasan Teori:**

1. Materi tentang Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa.
2. Referensi yang membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Wawancara dengan narasumber.

### **Bahan Kajian:**

#### **Keterbukaan terhadap Pers, Hidupnya Kembali Demokrasi**

Selama bertahun-tahun pers menjadi alat manipulasi kebenaran dari pihak yang berkepentingan. Selama itu, pers jauh dari kebebasan pemberitaan kebenaran dan keterbukaan, seolah-olah kebebasan pers terpasung oleh kepentingan kelompok tertentu. Pers yang merupakan lembaga yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang untuk menggunakan fungsi keterbukaan menyampaikan kebenaran publik dirampas hak-haknya. Bahkan pada masa orde lama dan orde baru banyak media yang dibungkam oleh pemerintah karena menyuarakan kebenaran yang dianggap mengancam eksistensi sebuah kekuasaan rezim tertentu. Tentu saja hal ini menimbulkan protes keras dari masyarakat, terutama golongan terpelajar. Mereka memprotes keberadaan negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis, akan tetapi jauh dari kebebasan pers.

Puncaknya adalah adanya reformasi yang salah satunya menuntut adanya kebebasan terhadap pers untuk menyerukan kebenaran tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan reformasi tersebut seakan-akan pers bebas dari belenggu kepentingan politik tertentu. Media massa yang sebelumnya dianggap membahayakan kekuasaan maupun ideologi bangsa, kini dapat menjalankan fungsinya kembali secara bertanggung jawab. Karena memang harus diingat bahwa media massa sering juga menyuarakan kebenaran dalam suatu masalah, memberitakan fakta yang terjadi di masyarakat, menyampaikan masalah kehidupan, dan bahkan mendukung program pembangunan pemerintah.

### **Penguatan Analisis:**

1. Buatlah forum diskusi di kelas untuk membandingkan hasil analisis Anda dengan analisis teman-teman Anda!
2. Lakukan presentasi pendapat di kelas!
3. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelas!



### Latihan Tertulis

**1. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!**

1. Politik berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti ....
  - a. urusan publik
  - b. masalah pemerintahan
  - c. urusan negara
  - d. masalah negara
  - e. urusan masyarakat
2. *Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan.*  
 Pernyataan tersebut merupakan pengertian budaya politik menurut ....
  - a. Gabriel Almond
  - b. Sydney Verba
  - c. Almond dan Verba
  - d. Robert K.Carr
  - e. Rusadi Kantaprawira
3. Tokoh yang mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat budaya politik abangan, santri, dan priyayi adalah ....
  - a. Gabriel Almond
  - b. Sydney Verba
  - c. Almond dan Verba
  - d. Robert K.Carr
  - e. Clifford Geertz
4. *Budaya politik yang paling dominan di Indoensia adalah etnis Jawa.*  
 Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari ....
  - a. Affan Gaffar
  - b. Rusadi Kantaprawira
  - c. Herbert Feith
  - d. Robert K.Carr
  - e. Clifford Geertz
5. *Sosialisasi politik adalah komunikasi yang dipelajari manusia dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.*  
 Pernyataan tersebut merupakan pengertian sosialisasi politik dari ....
  - a. S.N. Eisentadt
  - b. David F. Aberle
  - c. Gabriel Almond
  - d. Irvin L. Child
  - e. Denis Kavanagh
6. Proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya disebut ....
  - a. budaya politik
  - b. sistem politik
  - c. partisipasi politik
  - d. sosialisasi politik
  - e. agen politik

7. Cara sosialisasi politik yang banyak dilakukan oleh kelompok militer adalah dengan cara ....
  - a. imitasi
  - b. konstruksi
  - c. instruksi
  - d. motivasi
  - e. regenerasi
8. *Masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif.*

Pernyataan tersebut merupakan pengertian masyarakat madani menurut ....

  - a. Zbigniew Rew
  - b. Han-Sung
  - c. Kim Sun Hyuk
  - d. Thomas Paine
  - e. Nurcholis Madjid
9. Pengertian masyarakat madani adalah ....
  - a. masyarakat kaya
  - b. masyarakat yang makmur
  - c. masyarakat mapan
  - d. masyarakat yang sejahtera
  - e. masyarakat yang beradab
10. Dalam negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi berada di tangan ....
  - a. MPR
  - b. Presiden
  - c. DPR
  - d. Rakyat
  - e. DPD
11. Pemilu pada masa orde lama dilaksanakan pada tahun ....
  - a. 1955
  - b. 1971
  - c. 1977
  - d. 1999
  - e. 2004
12. Berikut ini yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah ....
  - a. adanya partai politik
  - b. adanya badan-badan peradilan
  - c. adanya perlindungan hak asasi manusia
  - d. adanya pemilihan umum yang bebas-rahasia
  - e. DPR sebagai pemegang badan legislatif dan berfungsi sebagai pengontrol jalannya pemerintahan
13. Perilaku demokratis dalam lingkungan keluarga tercermin dalam sikap berikut ....
  - a. berani menulis artikel, pendapat, dan opini di majalah dinding
  - b. selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS
  - c. mengikuti kegiatan rembug desa
  - d. mengikuti kegiatan kerja bakti
  - e. saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga

14. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara merupakan pengertian asas pemilu secara ....
  - a. langsung
  - b. umum
  - c. bebas
  - d. rahasia
  - e. jujur
15. Keadilan moral dan keadilan prosedural merupakan pembagian keadilan menurut ....
  - a. Sokrates
  - b. Plato
  - c. Charles E. Merriam
  - d. Aristoteles
  - e. Kong Hu Chu
16. Suatu keadilan yang berhubungan dengan distribusi dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan disebut ....
  - a. keadilan distributif
  - b. keadilan komutatif
  - c. keadilan kodrat
  - d. keadilan konvensional
  - e. keadilan moral
17. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri keterbukaan adalah ....
  - a. selalu curiga terhadap arus perubahan
  - b. mempunyai sikap toleransi
  - c. hati-hati dalam menerima informasi
  - d. transparan dalam kebijakan publik
  - e. tidak merahasiakan sesuatu
18. Suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu negara yang memiliki cara-cara dan sistem yang berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata dengan baik disebut ....
  - a. pemerintah
  - b. pemerintahan
  - c. pemerintahan yang baik
  - d. keterbukaan
  - e. keadilan
19. Prinsip pemerintahan di mana tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya disebut ....
  - a. akuntabilitas
  - b. berkeadilan
  - c. transparansi
  - d. legitimasi
  - e. daya tanggap
20. Salah satu faktor yang dapat menjamin tercapainya suatu kebenaran dan keadilan adalah ....
  - a. terjaminnya kesejahteraan penegak hukum
  - b. diberlakukannya hukum secara pandang bulu
  - c. adanya jaminan dan kepastian hukum
  - d. terbukanya proses pengadilan yang bebas
  - e. tersedianya pembela bagi tersangka yang tidak mampu

## II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Jelaskan macam-macam budaya politik yang berkembang di Indonesia!
2. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik?
3. Apa yang dimaksud budaya politik partisipan?
4. Sebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dan berilah contohnya masing-masing!
5. Jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi komunis dan demokrasi liberal!
6. Jelaskan asas-asas pelaksanaan pemilu di Indonesia!
7. Sebutkan penyimpangan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama!
8. Apa arti pentingnya keterbukaan dan keadilan?
9. Jelaskan perbedaan pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit!
10. Sebutkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dari UNDP!



## Praktik Kewarganegaraan

- I. *Di antara langkah-langkah dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi yang dianggap paling efektif adalah melalui jalur pendidikan. Karena hampir semua generasi saat ini pernah menyentuh jalur tersebut, jadi apabila bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah, maka akan menghasilkan hasil yang signifikan dan luas. Salah satu acuan ideologis pendidikan selain mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban atau mendukung diseminasi nilai keunggulan adalah mengembangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keagamaan. Pendidikan demokrasi sebagai upaya sadar untuk membentuk kemampuan warga negara dalam berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masyarakat semakin baik dalam memahami nilai-nilai demokrasi, maka akan makin memberikan partisipasi positif terhadap negara dari segala aspek.*

***Tuliskan tanggapan Anda terhadap pernyataan di atas!***

- II. *Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam agenda transformasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan, selain melalui pendidikan formal di sekolah, pemerintah juga merencanakan program nonformal dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta diskusi-diskusi tentang yang telah diprogram oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). Salah satu agenda utama KID adalah agenda “Simpul Demokrasi”.*

Gagasan KID untuk membentuk semacam Simpul Demokrasi didasarkan pada pertimbangan bahwa demokrasi dapat didorong maju dengan menggunakan berbagai cara yang semakin memungkinkan berjalannya proses-proses yang membuka partisipasi rakyat secara lebih luas. Secara umum tujuan dari pendidikan Simpul Demokrasi adalah menumbuhkan kultur demokrasi di kalangan muda strategis melalui sebuah mekanisme pendidikan politik yang berbasis kepada kepentingan rakyat. Karena pendidikan adalah jalan utama untuk memperkuat kesadaran tentang bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu dibangun.

***Menurut pendapat Anda, mampukah metode di atas diterapkan di Indonesia dan mampukah metode di atas membawa bangsa Indonesia menuju ke arah masyarakat madani? Jelaskan pendapat Anda!***

# Bab

## 4

# Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

## Pendahuluan

Sebagai manusia, apakah Anda dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Pernahkah Anda melakukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain? Apa yang mendorong Anda melakukan hubungan dan kerja sama dengan orang lain? Dalam hal apa, Anda membutuhkan kerja sama dengan orang lain?

Pada dasarnya manusia berhubungan dengan orang lain karena sifat monodualisme yang dimiliki. Sebagai makhluk monodualis, manusia memiliki peran ganda sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Seperti halnya manusia, negara juga perlu melakukan hubungan dengan negara lain. Hal tersebut karena tidak ada satu negara pun yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan negara lain. Hubungan yang dilakukan antarnegara tersebut bertaraf internasional. Hubungan internasional mencakup seluruh aspek kehidupan.

Bagi bangsa Indonesia, hubungan dengan negara lain dilandasi oleh prinsip-prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan demi kepentingan pembangunan dan peran serta bangsa Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



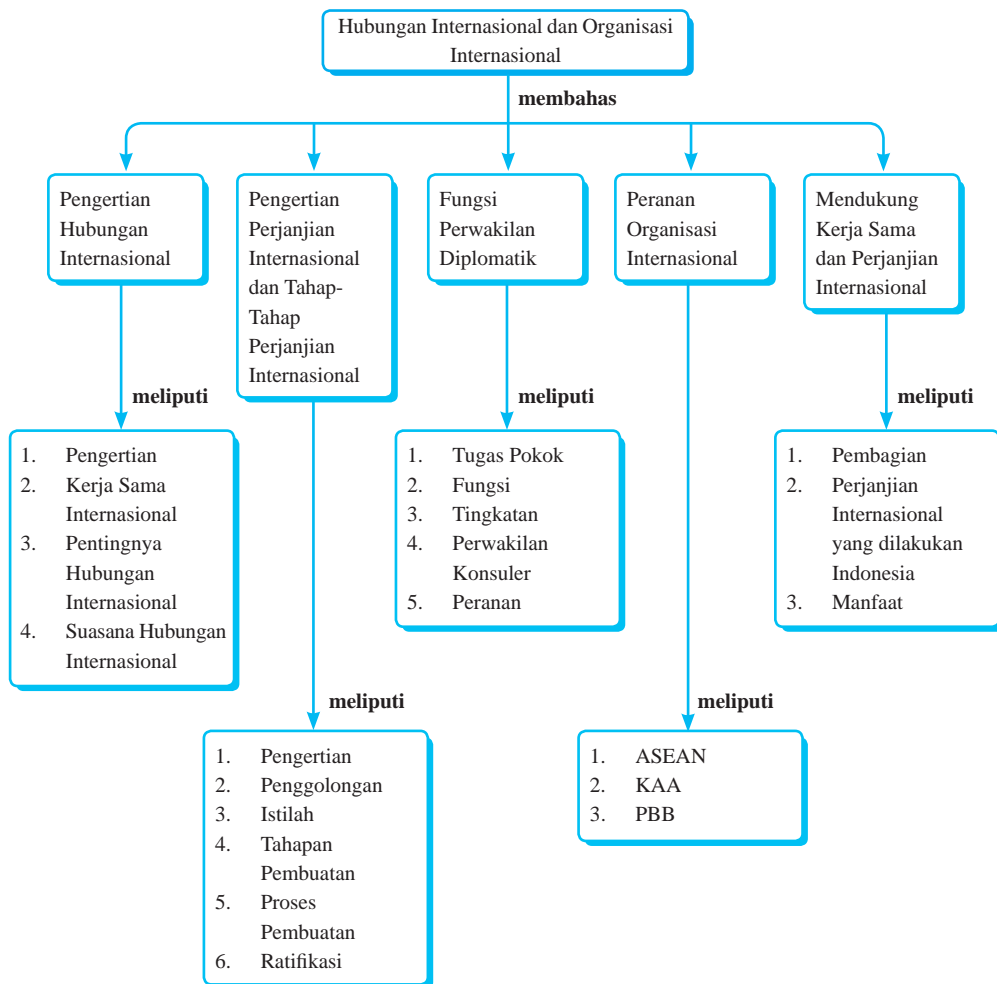
Gambar 4.1

Sumber: beritasore.com



# Peta Konsep

## BAB 4



### Kata Kunci

- Hubungan
- Perjanjian
- Organisasi
- Diplomatik
- Konsuler



## Pengertian Hubungan Internasional

Dalam rangka mencukupi kebutuhan warga negara, setiap negara perlu menjalin kerja sama dengan negara lain. Kerja sama antarnegara tersebut dinamakan kerja sama internasional. Melalui kerja sama internasional, hubungan antarnegara dapat terselenggara dalam berbagai bentuk dan kepentingan.

Hubungan internasional dapat dilakukan pada seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Bagi suatu negara, hubungan internasional dilakukan berdasarkan kepentingan nasional. Melalui kerja sama internasional, setiap negara dapat mengembangkan kesejahteraan dan keamanan bersama-sama.

### 1. Pengertian Hubungan Internasional

Istilah hubungan internasional mengandung makna yang beragam. Terdapat beberapa definisi hubungan internasional, di antaranya:

#### a. *Mohtar Mas'ood*

Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara.

#### b. *John Houston*

Menurut John Houston, hubungan internasional merupakan sebuah studi yang membahas tentang interaksi di antara anggota-anggota dalam komunitas internasional atau mengenai tingkah laku aktor-aktor yang terlibat.

#### c. *Robert Strauuz dan Stefan T. Rossony*

Robert Strauuz dan Stefan T. Rossony mengemukakan bahwa hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara negara, serta mengkaji tindakan anggota suatu masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat atau negara lain.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks. Hal tersebut karena hubungan internasional menyangkut semua aspek kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang melintasi batas-batas negara.



Sumber: beritasore.com

Gambar 4.2 Hubungan internasional menyangkut semua aspek kehidupan sosial umat manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang melintasi batas-batas negara.

### 2. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan perwujudan dari hubungan antarbangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan. Keberhasilan mewujudkan tujuan nasional dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa.

Pernyataan tersebut, sejalan dengan kerja sama internasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan kerja sama internasional dilakukan agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke,
- b. pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. pembentukan satu persahabatan yang baik dengan semua negara di dunia.

Dalam melaksanakan kerja sama dengan bangsa lain, bangsa Indonesia harus berorientasi pada:

- a. kepentingan nasional,
- b. menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang,
- c. mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk,
- d. meningkatkan kemandirian bangsa dan bekerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Kerja sama internasional harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

#### **a. Posisi geografis**

Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang dunia. Letak geografis tersebut membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk menghindari dampak negatif yang dapat terjadi, diperlukan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan maupun negara dalam satu kawasan.

#### **b. Sejarah perjuangan**

Bangsa Indonesia telah merasakan penderitaan panjang selama masa penjajahan. Melalui kerja sama internasional, bangsa Indonesia dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

#### **c. Jumlah penduduk**

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal kekuatan bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, besarnya jumlah penduduk juga dapat mendatangkan kelemahan-kelemahan dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain. Melalui kerja sama internasional, dapat diupayakan berbagai usaha untuk menanggulangi permasalahan kependudukan yang dihadapi bangsa Indonesia.

#### **d. Kekayaan alam**

Bangsa Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun tidak semua kekayaan alam dapat diolah sendiri. Keterbatasan teknologi merupakan salah satu kendala yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan bangsa lain untuk mempercepat alih teknologi.

#### **e. Militer**

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, membutuhkan penanganan yang lebih rumit dalam hal keamanan. Banyak terjadi pelanggaran perbatasan yang dilakukan bangsa lain. Untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia, diperlukan kekuatan militer, baik personil maupun peralatan. Keterbatasan peralatan perang dapat terpenuhi dengan kerja sama internasional.

#### *f. Situasi internasional*

Indonesia hidup bertetangga dengan negara lain, baik dengan negara yang berbatasan langsung maupun negara dalam satu kawasan. Situasi yang terjadi di negara tetangga maupun negara dalam satu kawasan, dapat membawa dampak bagi Indonesia. Kerja sama internasional diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif yang terjadi.

#### *g. Kualitas diplomasi*

Upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara tidak hanya ditentukan dengan kekuatan militer. Kepiawaian para diplomat untuk berdiplomasi dalam forum internasional juga dapat mempengaruhi. Para diplomat yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif, dapat menghasilkan diplomasi yang menyasar dan berkualitas.

#### *h. Pemerintahan yang bersih*

Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain sangat diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Makin baik pemerintahan, makin baik penyelenggaraan negara yang dilakukan. Penyelenggaraan negara tersebut juga berkaitan dengan upaya menjalin hubungan dengan bangsa lain.

#### *i. Kepentingan nasional*

Kepentingan nasional Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pun harus mengabdikan pada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa. Untuk itu, kerja sama internasional yang dilakukan harus mampu mendukung terwujudnya kepentingan nasional.



*Sumber:* [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id)

*Gambar 4.3 Departemen Luar Negeri memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerja sama internasional.*

Misi negara untuk membina kerja sama yang baik dengan negara lain, diperlukan peranan Departemen Luar Negeri. Dalam rangka mewujudkan kerja sama internasional yang sehat, Departemen Luar negeri mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Berkewajiban membawa aspirasi nasional ke tengah pergaulan antarbangsa.
- b. Membantu presiden dan bersama-sama dengan aparaturnya melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan berorientasi pada kepentingan nasional.

- c. Melakukan pengawasan dan menerima laporan pertimbangan, saran, dan pendapat baik diminta maupun tidak mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas perwakilan diplomatik.
- d. Sebagai perangkat vital politik luar negeri yang mampu mengolah bahan dari semua sumber menjadi rumusan langkah-langkah yang akan ditempuh.
- e. Dalam hubungannya dengan tugas diplomatik negara lain di Indonesia, menteri luar negeri bertanggung jawab atas:
  - 1) pengangkatan anggota-anggota misi, kedatangan, pemberangkatan, atau berakhirnya tugas mereka.
  - 2) kedatangan atau pemberangkatan orang-orang yang termasuk anggota keluarga atau misi serta kapan berhentinya,
  - 3) kedatangan dan pemberangkatan para pembantu yang diperbantukan kepada pejabat diplomatik,
  - 4) penempatan warga negara penerima (WNI) sebagai anggota misi atau sebagai pembantu pribadi yang mempunyai hak istimewa dan hak kekebalan.

### Info Khusus

#### **Pengembangan Investasi, Indonesia Lirik Brunei**

*Laporan wartawan KOMPAS Orin Basuki  
Jumat, 19 Maret 2010 / 11:43 WIB*

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mulai melirik potensi pengembangan investasi dengan Brunei Darussalam, terutama pada tiga sektor utama, yakni infrastruktur, energi, dan produk halal. Indonesia menawarkan kemungkinan investasi bersama antara perusahaan bentukan Kementerian Keuangan, yakni Pusat Investasi Pemerintah atau PIP dengan perusahaan Brunei.

Demikian hasil kunjungan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu ke Brunei pada 15 Maret 2010 yang dipublikasikan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Pada kesempatan itu, Anggito bertemu dengan Ketua Brunei Economic Development Board (BECD), Dato Timothy Ong. BECD merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah Brunei untuk mempromosikan Brunei sebagai negara tujuan investasi, yang juga mempunyai kewenangan dalam kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia mempromosikan iklim investasi di dalam negeri, kondisi makroekonomi yang kondusif, dan kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian. Itu dijadikan sebagai senjata andalan Indonesia untuk menarik calon investor dari Brunei.

Secara khusus, Indonesia juga menawarkan kepada para calon investor untuk memanfaatkan peluang investasi dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur seperti energi (10,000 MW) dan jalan tol (Trans Jawa). Bentuk investasi lain yang ditawarkan Indonesia adalah *portofolio investment* seperti pembelian surat berharga, khususnya Sukuk.

Meskipun masih ada pada tahap penjajakan, kerja sama investasi ini diharapkan dapat berlanjut untuk saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Sejauh ini, bidang-bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara bersama adalah energi, infrastruktur, dan *halal products*.

Sumber: *kompas.com*

## Aktivitas Mandiri

***Carilah artikel dalam media massa yang memberitakan kerja sama antarnegara, kemudian rumuskan hal-hal berikut ini!***

1. alasan kerja sama
2. tujuan diadakannya kerja sama
3. manfaat dari kerja sama internasional

### 3. Pentingnya Hubungan Internasional

Pada dasarnya, kerja sama internasional dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Adanya dua negara atau lebih yang menghadapi hal tertentu dan merupakan kepentingan bersama. Contohnya: Indonesia dengan Malaysia melakukan kerja sama bidang pendidikan dalam bentuk pertukaran pelajar.
- b. Adanya usaha kerja sama yang dijalani dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional. Contoh organisasi atau lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Association of South East Asian Nations (ASEAN), Organizing of Petroleum Exporting Countries (OPEC), dan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC).
- c. Munculnya isu-isu yang berkaitan dengan ekspansi teknologi dan perdagangan, sehingga memerlukan ketentuan dan peraturan baru yang membantu menangani masalah melalui konferensi dan pertemuan-pertemuan ad hoc (sementara). Contohnya antara lain konferensi hukum laut internasional, dan penentuan zona ekonomi eksklusif (ZEE).
- d. Dua negara atau lebih yang mempunyai banyak transaksi terus-menerus tetapi tidak perlu organisasi resmi untuk kerja sama. Dasarnya adalah semua hubungan di antara unit-unit dapat diramalkan berjalan damai, dan apabila muncul konflik biasanya akan diselesaikan dengan kompromi.

Mengingat bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat memenuhi mencukupi kebutuhan warga negaranya, maka setiap negara perlu membina hubungan dengan negara lain. Bagi setiap bangsa, pelaksanaan kerja sama internasional diperlukan untuk:

- a. mewujudkan kepentingan nasional, terutama di bidang politik dan hubungan luar negeri di dalam pergaulan internasional,
- b. menjalin persahabatan yang lebih erat antara Indonesia dengan negara lain demi terwujudnya ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan perdamaian abadi,
- c. menempatkan perwakilan di luar negeri,
- d. mewujudkan kerja sama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

### 4. Sarana Hubungan Internasional

Interaksi antarnegara dapat terjalin melalui hubungan internasional. Interaksi tersebut dapat terjadi secara formal maupun informal. Untuk mendukung proses hubungan internasional, diperlukan sarana.

Sarana hubungan internasional dibedakan menjadi 2, yaitu sarana formal dan sarana informal.

#### *a. Sarana formal*

Sarana informal berkaitan dengan berbagai lembaga negara yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah. Lembaga ini bertanggung jawab atas proses hubungan internasional. Aktivitas yang dilakukan lembaga formal diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.

Sarana formal dalam hubungan internasional yaitu:

1) Departemen luar negeri

Departemen Luar Negeri merupakan lembaga kementerian yang dipimpin seorang menteri luar negeri. Lembaga ini bertanggung jawab kepada pemimpin lembaga eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri.

Departemen Luar Negeri bertanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam menjalankan perannya, Departemen Luar Negeri memiliki lembaga sebagai pelaksana kebijakan, seperti perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.

2) Perwakilan diplomatik

Korps diplomatik dipimpin oleh kepala misi diplomatik. Kepala misi diplomatik terdiri dari duta besar, duta, dan kuasa usaha.

3) Perwakilan konsuler

Perwakilan konsuler merupakan perwakilan suatu negara di luar negeri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) memelihara kepentingan negara melalui hubungan tingkat daerah,
- b) bersifat nonpolitik,
- c) tidak mempunyai hak ekstrateritorial.

#### *b. Sarana informal*

Sarana informal dalam hubungan internasional memiliki aturan dan prosedur yang sangat luas secara nasional maupun internasional. Sarana informal tidak hanya dilakukan oleh negara. Sarana ini memberi ruang gerak yang sangat luas pada para pelakunya.

Sarana informal dalam hubungan internasional antara lain:

1) Alat komunikasi yang canggih

Kemajuan sarana komunikasi seolah-olah mampu menghilangkan batas geografis antarnegara. Komunikasi dapat dilakukan antarnegara dengan mudah. Sarana yang digunakan pun beragam, seperti internet dan telepon.

2) Even olahraga

Olahraga menjadi salah satu sarana hubungan internasional, baik di tingkat regional maupun internasional. Even olahraga ini diselenggarakan secara rutin. Beberapa even olahraga sebagai sarana hubungan internasional antara lain Sea Games, Asian Games, dan Olimpiade.

3) Sarana informal lain

Sarana informal lain dalam hubungan internasional seperti pertukaran pelajar lembaga pendidikan dan pertukaran tenaga ahli antarinstansi.



## Arena Diskusi

Aliran idealisme dalam melakukan hubungan internasional mempunyai pandangan-pandangan sebagai berikut:

1. Setiap bangsa memiliki kepentingan yang sama terhadap perdamaian dunia.
2. Setiap bangsa yang mengganggu perdamaian dunia, berarti bangsa tersebut telah bertingkah laku tidak rasional dan tidak bermoral.
3. Realitas manusia akan semakin kompleks. Begitu juga dengan kualitas manusia akan semakin baik.
4. Perdamaian merupakan suatu proses yang tidak dapat dihalangi realisasinya oleh kekuatan apapun.
5. Perdamaian merupakan hal multak dalam hubungan internasional.

*Sumber: one.indoskripsi.com*

Menurut pendapat Anda, sesuaikah pendapat aliran idealisme tersebut dengan pelaksanaan hubungan internasional yang dilaksanakan pemerintah Indonesia? Diskusikan bersama kelompok Anda!

## B Pengertian Perjanjian Internasional dan Tahap-Tahap Perjanjian Internasional

Bangsa-bangsa di dunia sudah lama melaksanakan hubungan dengan bangsa lain. Ketentuan atas hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihak telah dibuat. Aturan-aturan tersebut harus ditaati oleh pihak yang mengadakan hubungan/perjanjian. Ketentuan ini dinamakan *Pacta Sunt Servanda*.

Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam perjanjian internasional, diatur juga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional. Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, *perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum Internasional lainnya*.

Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting karena ada beberapa alasan yang perlu dipahami, yaitu:

1. perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis.
2. perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama, di antara para subjek hukum internasional.

Dari dua alasan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian internasional mengikat secara erat pihak-pihak yang terlibat.



*Sumber: l.yimg.com*

Gambar 4.4 Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama.

## 1. Pengertian Perjanjian Internasional

Ada beragam pengertian perjanjian internasional menurut beberapa ahli, antara lain:

### a. *Openheimer-Lauterpacht*

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.

### b. *G. Schwarzenberger*

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek dan hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional.

### c. *Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.*

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

### d. *Konferensi Wina tahun 1969*

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.

## Tokoh

### Mochtar Kusumaatmadja



Sumber: wordpress.com

Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta, 17 April 1929. Beliau adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988.

Selain itu ia adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Definisinya yang menyatakan bahwa *"Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan"*, dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Doktrin ini menjadi mazhab yang dianut di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga saat ini.

Pria yang memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun ini dikenal piawai dalam mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan. Dia cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Diplomat penggemar olahraga catur dan berkemampuan berpikir cepat namun lugas ini, memang suka berkelakar.

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu.

Sumber: id.wikipedia.org

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui peranan perjanjian internasional mempunyai dalam masyarakat internasional. Peranan tersebut, yaitu:

- a. merupakan perjanjian antarbangsa/antarnegara atau antarsubjek hukum lainnya yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu,
- b. merupakan tatanan norma pokok dalam mengatur hubungan antarbangsa/antarnegara dalam masyarakat internasional.
- c. menjamin kepastian hukum dalam rangka mengatur persoalan bersama yang timbul dalam masyarakat internasional,
- d. mengatur kerja sama antarbangsa/antarnegara di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, tapal batas wilayah dua negara, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya,
- e. dapat berbentuk perjanjian bilateral maupun multilateral, tergantung pada permasalahannya atau jenis perjanjian.

## 2. Penggolongan Perjanjian Internasional

Penggolongan perjanjian internasional dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain:

### a. Menurut subjeknya

Menurut subjeknya, perjanjian internasional dibedakan menjadi 2, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.

- 1) Perjanjian bilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara.
- 2) Perjanjian multilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara.

### b. Menurut fungsinya

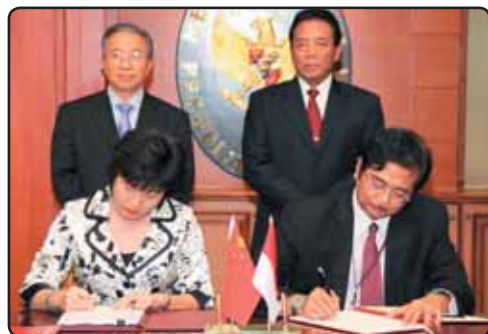
Menurut fungsinya, perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 2, yaitu perjanjian yang membentuk hukum dan perjanjian yang bersifat khusus.

- 1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
- 2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.

### c. Menurut prosesnya

Menurut prosesnya, terdapat 2 macam perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang bersifat penting dan perjanjian yang bersifat sederhana.

- 1) Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
- 2) Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahapan, yaitu perundingan dan penandatanganan.



Sumber: [www.indonesianembassy-china.org](http://www.indonesianembassy-china.org)

Gambar 4.5 Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.

### 3. Istilah Perjanjian Internasional

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian internasional, banyak istilah yang biasa digunakan. Di antara istilah-istilah tersebut yaitu:

- a. *Traktat (treaty)*, adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama. Misalnya, *Perjanjian Celah Timor*.
- b. *Persetujuan (agreement)*, adalah suatu perjanjian/persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Misalnya *agreement* tentang ekspor impor komoditas tertentu.
- c. *Konvensi (convention)*, adalah suatu perjanjian yang bersifat multilateral. Misalnya, Konvensi Hukum Laut Internasional.
- d. *Protokol (protocol)*, adalah suatu perjanjian yang kurang resmi dibandingkan traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Contohnya, Protokol Den Haag tahun 1930.
- e. *Piagam (statuta)*, adalah himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional. Misalnya, *Statuta of The International Court of Justice* pada tahun 1945 dan Piagam Kebebasan Transit yang dilampirkan pada Convention of Barcelona tahun 1921.
- f. *Charter*, adalah suatu piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu.
- g. *Deklarasi (declaration)*, adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau menciptakan hukum baru.
- h. *Modus vivendi*, adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan secara permanen.
- i. *Covenant*, adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa.
- j. *Ketentuan penutup (final act)*, adalah dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi.
- k. *Ketentuan umum (general act)*, adalah traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi.
- l. *Pakta (pact)*, adalah suatu perjanjian oleh beberapa negara secara khusus dan membutuhkan ratifikasi.

### Aktivitas Mandiri

***Pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah dengan negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena akan mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya.***  
***Setujukah Anda dengan pernyataan di atas? Jelaskan pendapat Anda!***

### 4. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

#### a. *Perundingan (negotiation)*

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tertentu yang berkepentingan, di mana sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan peninjauan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan negosiasi, suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (*full powers*). Selain mereka, juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar.

#### b. *Penandatanganan (signature)*

Penandatanganan naskah perjanjian dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk penandatanganan teks perundingan yang bersifat multilateral dianggap sah apabila 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun demikian, perjanjian belum dapat diberlakukan masing-masing negara sebelum diratifikasi.

#### c. *Pengesahan (ratification)*

Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Dengan dilakukannya ratifikasi terhadap perjanjian internasional, secara resmi perjanjian internasional dapat berlalu dan berkekuatan hukum. Adapun prosedur dari ratifikasi tersebut antara lain:

- 1) Penandatanganan naskah perjanjian oleh badan eksekutif, yang kemudian disampaikan kepada badan legislatif untuk meminta persetujuan.
- 2) Selanjutnya oleh badan eksekutif dibuat piagam ratifikasi, sedangkan bagi perjanjian multilateral, piagam ratifikasi diserahkan kepada pihak (negara) penyimpan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

### **Nilai-Nilai Pancasila**

*Bangsa Indonesia menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kedamaian dan kesejahteraan dapat tercipta oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mampu mempengaruhi kedamaian dan kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kualitas hubungan dengan negara tetangga. Pemerintah berusaha menjalin kerja sama yang baik dengan semua negara tetangga. Berbagai forum kerja sama dan kerja sama bilateral ditempuh pemerintah.*

## **5. Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional**

Sehubungan dengan proses pembuatan perjanjian internasional, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

#### a. *Persyaratan perjanjian internasional*

Negara yang mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian. Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentingan nasionalnya. Persyaratan adalah pernyataan dari suatu negara untuk dapat terikat pada perjanjian multilateral dengan pembatasan khusus.

Mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional terdapat dua teori yang berkembang, yaitu:

**1) Teori kebulatan suara**

Persyaratan dalam perjanjian internasional hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. Contohnya:

Setiap mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, PBB memerlukan kebulatan suara dari seluruh anggota untuk menetapkan.

**2) Teori Pan - Amerika**

Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Contoh:

Dengan adanya NATO atau AFTA, setiap negara peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang dibentuk tersebut.

**b. Berlakunya perjanjian internasional**

Konvensi Wina pada tahun 1969 Pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah:

- 1) Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.
- 2) Pada saat peserta perjanjian mengikatkan diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya.

**c. Pembatalan perjanjian internasional**

Berdasarkan konvensi Wina 1969, perjanjian internasional dapat dibatalkan apabila:

- 1) negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya,
- 2) adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat,
- 3) adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian,
- 4) terdapatnya penyalahgunaan atau kecurangan, baik melalui kecurangan atau penyuapan,
- 5) adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta,
- 6) bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

**d. Berakhirnya perjanjian internasional**

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Pengantar Hukum Internasional menyatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional tersebut,
- 2) masa berlakunya perjanjian internasional itu sudah habis,
- 3) salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian tersebut,
- 4) adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian itu,
- 5) adanya perjanjian baru antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian terdahulu,
- 6) syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi,
- 7) perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

## 6. Ratifikasi (Pengesahan) Perjanjian Internasional di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut paham dualisme dalam pengesahan perjanjian internasional. Artinya Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan lainnya. Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk perundang-undangan

Di Indonesia pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang yang dibuat antara pemerintah dan DPR. Menurut UUD 1945, kewenangan membuat perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 Ayat 2, yaitu *“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*.

Pasal 11 Ayat 2 UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian internasional adalah UU No. 24 Tahun 2000. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2000 disahkan (diratifikasi) melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tidak serta merta menjadikan perjanjian internasional tersebut menjadi hukum nasional Indonesia melainkan hanya menjadikan Indonesia sebagai negara yang terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Agar perjanjian internasional dapat berlaku menjadi hukum nasional, maka perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang disepakati. Misalnya, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui undang-undang, selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di konvenan tersebut dalam undang-undang yang lebih spesifik.

Pengesahan perjanjian internasional diatur dalam pasal 9 UU No. 24 Tahun 2000. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara,
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia,
- c. kedaulatan atau hak daulat negara,
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup,
- e. pembentukan kaidah hukum baru,
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

### Arena Diskusi

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya biasanya memuat materi yang bersifat teknik atau suatu pelaksanaan dari perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/diplomasi, dan melalui cara lainnya yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Bersama kelompok Anda, carilah bentuk perjanjian internasional yang demikian! Carilah dari berbagai sumber, seperti koran, majalah, ataupun internet!





## Fungsi Perwakilan Diplomatik

Pelaksanaan politik luar negeri merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pelaksanaan politik luar negeri secara praktik dan teori sangat erat hubungannya dengan kerja sama. Sebab kerja sama merupakan suatu bentuk perwujudan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bangsa Indonesia selalu menjaga dan menjunjung tinggi hasil kerja sama dengan negara lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Perwujudannya yaitu Indonesia mengirimkan duta dan konsul serta menerima duta dan konsul negara lain sebagai perwakilan negara yang bersangkutan.

Indonesia ikut aktif serta bersikap terbuka terhadap perjanjian internasional. Indonesia juga melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Dalam rangka menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan negara lain, Indonesia membuka perwakilan tetap sebagai lembaga resmi yang menangani kegiatan luar negeri. Perwakilan tetap ini diselenggarakan oleh dinas-dinas diplomatik atau konsuler. Akan tetapi, pelaksanaan hubungan kerja sama tersebut bersifat demokratis dan terbuka. Ini berarti bahwa bila negara kita ingin menerima atau mengirim perwakilan diplomatik, terlebih dahulu harus melalui persetujuan wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.



Sumber: media.vivanews.com

Gambar 4.6 Kedutaan besar menjadi simbol negara di negara lain.

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut tentang peranan perwakilan Indonesia di luar negeri dalam membina hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

### 1. Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik

Tugas pokok perwakilan diplomatik Indonesia adalah:

- menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing (membawa suara resmi negaranya),
- mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya,
- mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain,
- apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian pos-pos, dan sebagainya.

### 2. Fungsi Perwakilan Diplomatik

Fungsi perwakilan menurut Kongres Wina 1961 adalah:

- Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
- Melindungi kepentingan negara penerima dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional.
- Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

- d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
- e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

## Aktivitas Mandiri

***Dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, pembukaan, dan batang tubuh UUD 1945. Berikan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan pernyataan di atas!***

### 3. Tingkatan Perwakilan Diplomatik

Seseorang yang diberi tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara biasanya disebut seorang diplomat. Perwakilan diplomatik mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

#### a. Duta besar (*ambassador*)

Duta besar adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh merupakan seorang diplomat yang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan,
- 2) melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah,
- 3) memberikan laporan, pertimbangan, saran, dan pendapat baik diminta atau tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kepada menteri luar negeri,
- 4) melakukan pembinaan semua staf agar tercapai kesempurnaan tugas masing-masing.

Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh merupakan seorang diplomat yang mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan perwakilan diplomatik,
- 2) mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan penyempurnaan kegiatan perwakilan,
- 3) melakukan tindakan-tindakan otorisasi, yaitu berwenang mengatur penggunaan anggaran.

#### b. Duta (*Ggerzant*)

Duta adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara, duta diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya.

#### c. Menteri residen

Menteri residen adalah perwakilan diplomatik yang dianggap bukan wakil pribadi kepala negara dan hanya mengurus urusan negara. Menteri residen tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana dia bertugas.



Sumber: [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

Gambar 4.7 Duta besar adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.

**d. Kuasa usaha (*charge d'affair*)**

Kuasa usaha adalah perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dari pegawai negeri lainnya. Kepala usaha dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Kepala usaha tetap yang menjabat sebagai kepala dari suatu perwakilan.
- 2) Kepala usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan ketika pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.

**e. Atase**

Atase adalah pejabat pembantu dari Duta Besar. Atase terdiri atas dua bagian, yaitu:

**1) Atase pertahanan**

Atase dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan departemen luar negeri di suatu kedutaan besar. Atase militer bertugas memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada *duta besar berkuasa penuh*.

**2) Atase teknis**

Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri yang tidak berasal dari departemen luar negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar. Atase ini berkuasa penuh dalam menjalankan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas dari departemennya sendiri.

**Potret Nusantara**

**Anggaran KBRI Baru Bisa Tangani 3 WNI**

*KOMPAS, Imam Prihadiyoko*

*Senin, 23 Agustus 2010 / 16:45 WIB*

JAKARTA, KOMPAS.- Anggaran Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada tahun ini, baru mampu membantu 3 orang warga negara Indonesia yang sedang menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia.

Hal ini diungkapkan Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia Tatang Razak ketika dihubungi dari Jakarta melalui pesan layanan singkat, Senin (23/8/2010).

Tatang mengakui, WNI yang ditahan terlibat kasus narkoba hampir 400 orang, tapi ancamannya beragam. Yang terancam hukuman mati pun masih harus lewat proses hukum dan belum tentu putusan finalnya hukuman mati.

“Kita juga terus mengupdate dan menangani kasus ini dengan serius. KBRI pernah mengajukan anggaran untuk pendampingan hukum kepada 177 orang yang terancam hukuman mati, tapi belum bisa dipenuhi,” ujarnya.

Menurutnya, informasi tentang ke dua orang asal Aceh yang saat ini jadi pemberitaan media telah disampaikan KBRI Kuala Lumpur ke Jakarta via brafaks no: BB-631/KL/VII/10 tanggal 30 Juli 2010. Yaitu, Bustaman bin

Bukhari dan [2] Tarmizi bin Yacob, ditahan sejak 5 April 1996, berdasarkan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya.

.....  
.....

*Sumber: Kompas.com*

Penggalan artikel di atas menunjukkan peran kedutaan Indonesia di negara lain. Semua misi diplomatik memiliki komitmen untuk melindungi warga negara di luar negeri. Namun tentunya, perlindungan yang dilakukan berdasarkan atas fakta hukum. Perwakilan diplomatik harus menghormati hukum yang berlaku di negara lain. Perlindungan terhadap warga negara dan penghormatan terhadap hukum negara lain harus dilaksanakan secara seimbang dan objektif.

#### **4. Perwakilan Konsuler**

Dalam bidang politik, hubungan diplomatik suatu negara diwakili oleh kedutaan besar. Dalam bidang nonpolitik, hubungan diplomatik suatu negara diwakili oleh perwakilan konsuler (korps konsuler).

##### **a. Tingkatan konsuler**

Tingkatan-tingkatan yang ada dalam suatu perwakilan konsuler adalah:

##### **1) Konsul jenderal**

Konsul jenderal adalah wakil resmi sebuah negara yang ditugaskan di luar wilayah metropolitan atau ibu kota sebuah negara di luar negeri. Kantor tempat konsul bertugas disebut konsulat atau konsulat jenderal.

##### **2) Konsul dan wakil konsul**

Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada Konsul Jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada Konsul atau Konsul Jenderal yang kadang-kadang disertai pimpinan kantor konsuler.

##### **3) Agen konsul**

Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas mengatur hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota yang termasuk dalam kekonsulan.

##### **b. Tugas perwakilan konsuler**

Tugas-tugas perwakilan konsuler mencakup bidang-bidang berikut ini:

- 1) Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan komoditas ekspor nonmigas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain.
- 2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yaitu melaksanakan pertukaran kebudayaan dan pelajar.

- 3) Bidang-bidang lain seperti:
- a) memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada negara pengirim,
  - b) memberikan visa dan dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim,
  - c) bertindak sebagai notaries dan pencatat sipil serta menelenggarakan fungsi administrasinya,
  - d) bertindak sebagai subjek hukum dalam praktik dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

## Aktivitas Mandiri

### ***Paspor Indonesia***

***Paspor adalah dokumen perjalanan ke luar negeri yang diterbitkan oleh pihak berwenang antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri. Paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia dinamakan Paspor Indonesia. Ada beberapa macam macam paspor Indonesia, yang masing-masing dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.***

***Sebutkan macam-macam paspor dan jelaskan perbedaan masing-masing!***

### ***c. Fungsi perwakilan konsuler***

Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan konsuler menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di wilayah negara penerima,
- 2) peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan,
- 3) pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima,
- 4) kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal perwakilan, komunikasi, dan persandian,
- 5) fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik internasional.

## **5. Peranan Perwakilan Diplomatik**

Dalam membina hubungan dan kerja sama internasional dengan negara lain, diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara. Tujuannya agar kepentingan negara dapat diperkenalkan kepada negara lain melalui jalur diplomatik.

Dalam arti luas diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai berikut:

- a. menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut,
- b. menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada,
- c. menentukan tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain,
- d. menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang nasional negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. Selain itu, diplomat dapat berfungsi sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintah negaranya. Contohnya, seorang diplomat dapat menandatangani perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan pernyataan, dan lain-lain. Diplomat juga dapat berfungsi sebagai perwakilan politik. Dalam melaksanakan fungsi sedemikian, diplomat menjadi alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerimanya.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terciptanya kerja sama dengan negara lain sangat bergantung dari pembinaan hubungan melalui perwakilan diplomatik. Makin erat hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lain, makin erat pula kerja sama yang dijalin. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mendukung setiap usaha pemerintah dalam membina hubungan baik dan kerja sama dengan negara lain. Perwujudan dukungan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. menjaga nama baik negara kita bila kita berada di negara orang lain,
- b. menghargai negara lain yang datang ke negara kita asalkan dengan niat baik,
- c. bersikap bersahabat terhadap bangsa lain yang ingin bekerja sama dengan bangsa kita, dan lain sebagainya.

### Info Khusus

Ada 3 (tiga) teori dalam hukum internasional berkaitan dengan diberikannya hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik kepada pejabat-pejabat diplomatik. Ketiga teori tersebut, yaitu:

#### **1. *Teori Exterritoriality (Teori Eksteritorialitas)***

Menurut teori ini seorang wakil diplomatik karena dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun pada kenyataannya berada di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, ia tidak tunduk pada hukum negara penerima, tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima, dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima. Menurut teori ini, seorang pejabat diplomatik tersebut adalah dikuasai oleh hukum dari negara pengirim.

Teori *exterritoriality* ini dianggap tidak sesuai dengan praktik kebiasaan pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik dalam pergaulan antarnegara. Maka dari itu, *teori exterritoriality* dalam bentuk asalnya ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

#### **2. *Teori Diplomat sebagai Wakil Negara Berdaulat atau Wakil Kepala Negara (Representative Character)***

Menurut teori ini hak-hak kekebalan dan istimewa yang didapatkan oleh perwakilan diplomatik suatu negara yaitu karena ia mewakili negaranya atau kepala negaranya di luar negeri. *Sir Gerald Fitzmaurice* mengatakan

bahwa, seorang wakil diplomatik sebagai wakil negara berdaulat, memperlihatkan ketidaksetiaan kepada negara tempat ia diakreditir dan dengan demikian ia tidak tunduk kepada hukum dan yurisdiksi negara penerima.

### **3. Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity*)**

Menurut teori ini, dasar pemberian hak-hak kekebalan dan istimewa kepada perwakilan diplomatik adalah karena seorang perwakilan diplomatik harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna, dan segala sesuatu yang dapat memengaruhi secara buruk haruslah dicegah. Teori kebutuhan fungsional ini merupakan dasar hukum yang paling banyak dianut dalam pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik.

*Sumber: www.sigittafahrudin.co.cc*



## **Peranan Organisasi Internasional dalam meningkatkan Hubungan Internasional**

Organisasi internasional merupakan organisasi yang bersifat tetap dan dibentuk atas dasar perjanjian internasional. Perjanjian tersebut memuat tujuan struktur dan tata kerja organisasi. Organisasi internasional merupakan wadah bagi negara-negara untuk melakukan hubungan internasional dalam menyelesaikan masalah negara-negara yang bersangkutan.

Organisasi internasional mempunyai peranan penting dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional ada bermacam-macam, baik dalam lingkup regional maupun internasional.

### **1. ASEAN (*Association of South East Asian Nations*)**

ASEAN merupakan suatu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Lahirnya ASEAN yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu:

- a. Indonesia, diwakili oleh Adam Malik
- b. Singapura, diwakili oleh S. Rajaratman
- c. Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak
- d. Filipina, diwakili oleh Narsisco Ramos
- e. Thailand, diwakili Thanat Khoman.

Kelima wakil negara-negara mengadakan pertemuan di Pantai Bangasem, Thailand. Pertemuan tersebut melahirkan Deklarasi Bangkok sebagai dasar pendirian ASEAN. Keanggotaan ASEAN terus bertambah, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Akan tetapi ada beberapa negara yang belum tergabung dalam ASEAN karena keanggotaannya bersifat sukarela.



### Adam Malik



Sumber: wordpress.com

Adam Malik Batubara lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917. Beliau meninggal di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984 pada umur 67 tahun. Adam Malik adalah mantan menteri pada beberapa departemen, Jabatan yang pernah dipercayakan kepada Adam Malik antara lain menteri luar negeri dan wakil presiden.

Karir Adam Malik diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Di masa mudanya, beliau sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong beliau untuk pergi merantau ke Jakarta. Kemudian beliau mendirikan Kantor Berita Antara yang kemudian menjadi Kantor Berita Nasional. Beliau mendirikan Antara bersama Albert Manumpak, Sipahoetar, Pandoe Kartawigoena, dan Mr. Soemanang yang berkantor di Jl. Pinangia 38 Jakarta Kota.

Pada tahun 1963, beliau pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu Kabinet yang bernama Kabinet Kerja sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE). Karir murni beliau sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di kabinet Ampera I pada tahun 1966. Di tahun 1971, beliau sempat memimpin sidang umum PBB ke-26 sebagai Ketua Sidang.

Pada pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk *rescheduling* utang Indonesia peninggalan Orde Lama. Adam Malik juga mewakili Indonesia sebagai pelopor terbentuknya ASEAN tahun 1967.

Atas jasa-jasa beliau, beliau dianugerahi berbagai macam penghargaan, di antaranya adalah Bintang Mahaputera kl. IV pada tahun 1971, Bintang Adhi Perdana kl.II pada tahun 1973, dan diangkat sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1999.

Sumber: id.wikipedia.org

#### a. *Persamaan bangsa Asia Tenggara*

ASEAN dibentuk dengan berdasarkan persamaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Persamaan tersebut antara lain:

##### 1) *Persamaan letak geografis*

Semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dengan demikian, berdasarkan letak geografisnya semua negara di kawasan Asia Tenggara merupakan satu regional dalam satu wilayah. Dengan adanya persamaan letak geografis tersebut mendorong negara di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan ketertiban wilayah tersebut.

## 2) *Persamaan dasar kebudayaan*

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai kebudayaan dan rumpun bahasa yang sama yaitu bahasa Melayu Austronesia. Jadi, kebudayaan dan bahasa tersebut merupakan dasar kebudayaan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya persamaan tersebut, bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara merasa menjadi satu keluarga. Kesamaan kebudayaan ini mendorong lahirnya keinginan untuk membentuk suatu organisasi yang dapat melestarikan kebudayaannya tersebut.

## 3) *Persamaan nasib*

Sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara bekas jajahan bangsa asing, kecuali Thailand. Penderitaan yang dirasakan selama masa penjajahan mendorong lahirnya semangat nasionalnya. Persamaan nasib tersebut menumbuhkan rasa solidaritas di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

## 4) *Persamaan kepentingan*

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara semuanya membutuhkan daerah perairan sebagai jalur distribusi perdagangan. Adanya persamaan kepentingan tersebut mendorong bangsa-bangsa di Asia Tenggara membentuk organisasi agar tidak ada negara yang dirugikan.



*Sumber: wordpress.com*

Gambar 4.8 Selat Malaka merupakan perairan strategis di kawasan Asia Tenggara.

## b. *Dasar pemikiran dan tujuan ASEAN*

ASEAN merupakan organisasi nonpolitik dan nonmiliter. Maksudnya adalah ASEAN tidak membahas masalah militer dan politik. Adapun dasar pemikiran ASEAN antara lain:

- 1) keinginan untuk mengadakan landasan yang pokok untuk kepentingan bersama memelihara kerja sama di Asia Tenggara,
- 2) kesadaran tentang kepentingan bersama dan masalah bersama antarnegara Asia Tenggara,
- 3) keinsafan bahwa cita-cita luhur yang hendak dicapai itu hanya dapat tercapai dengan diperbuatnya pengertian yang baik, kehidupan bertetangga yang baik dan kerja sama yang baik antara negara di kawasan itu,
- 4) menjaga stabilitas dan keamanan mereka dari campur tangan luar negeri dalam mempertahankan kepribadian mereka,
- 5) penegasan bahwa pangkalan-pangkalan asing hanya untuk sementara dan mendirikan disitu harus dengan persetujuan negara-negara yang bersangkutan dan tidak dipergunakan untuk merongrong kemerdekaan nasional wilayah itu.

Adapun tujuan ASEAN antara lain:

- 1) mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara,
- 2) memelihara perdamaian dan stabilitas regional,
- 3) bekerja sama yang aktif dan saling membantu,

- 4) saling membantu dalam bentuk fasilitas, latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, teknik, administrasi,
- 5) bekerja sama lebih efektif yang berdaya guna dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, angkutan, mempertinggi taraf hidup rakyat,
- 6) memajukan dalam bidang pendidikan,
- 7) meningkatkan kerja sama regional dan mengadakan hubungan internasional.



*Sumber: [www.presidentri.go.id](http://www.presidentri.go.id)*

*Gambar 4.9 Salah satu tujuan ASEAN adalah bekerja sama yang aktif dan saling membantu.*

### **c. Struktur ASEAN**

Untuk melaksanakan hubungan dan kerja sama ASEAN telah dibentuk dua komite, yaitu komite tetap dan komite sementara. Komite tetap membahas dan meningkatkan kerja sama diantara anggota ASEAN secara tetap dan berkesinambungan. Komisi tidak tetap mengurus, memelihara dan meningkatkan hubungan perdagangan yang lebih baik dengan MEE dan bentuk-bentuk kerja sama dengan negara lain.

Selain komite, untuk memperlancar kerja sama antaranggota maupun dengan negara-negara di luar ASEAN juga terdapat sekretariat ASEAN. Terdapat dua sekretariat ASEAN yaitu sekretariat tetap dan sekretariat nasional.

#### **1) Sekretariat tetap ASEAN**

Sekretariat tetap ASEAN berpusat di Jakarta dan dipimpin oleh seorang sekretaris tetap ASEAN. Tugasnya adalah mengkoordinasi sekretariat-sekretariat nasional yang ada di masing-masing negara anggota ASEAN.

#### **2) Sekretariat nasional ASEAN**

Sekretariat nasional ASEAN dibentuk di masing-masing negara anggota ASEAN dan dipimpin oleh seorang sekretariat nasional ASEAN. Tugasnya memperlancar tugas-tugas yang dihadapi oleh setiap negara anggota ASEAN.

### **d. Peranan ASEAN dalam rangka meningkatkan hubungan internasional**

ASEAN merupakan organisasi internasional dalam lingkup Asia Tenggara. ASEAN bermanfaat bagi negara-negara anggota khususnya dan negara-negara bukan anggota di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk dengan misi perdamaian, stabilitas dan

kesejahteraan bersama negara-negara Asia Tenggara. ASEAN merupakan jembatan penghubung bagi negara-negara Asia Tenggara untuk melakukan hubungan dan kerja sama baik antara anggota, negara-negara kawasan Asia Tenggara yang bukan anggota maupun negara-negara lain di dunia. ASEAN juga menjadi media bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bekerja sama memecahkan masalah demi tercapainya masyarakat damai, adil dan sejahtera di Asia Tenggara.

Meskipun ASEAN merupakan sarana untuk melakukan hubungan dengan dunia internasional, namun ASEAN tetap memegang teguh ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan bersama, antara lain:

- a. menentukan sendiri nasibnya tanpa campur tangan dari pihak lain
- b. berkeinginan mengembangkan hubungan damai dan saling menguntungkan dengan semua negara di dunia
- c. terus memperjuangkan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang bebas dan netral

Atas dasar ketentuan tersebut ASEAN berusaha meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain. Dengan demikian ASEAN mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan hubungan Internasional.

## 2. KAA ( Konferensi Asia Afrika)

Pasca perang dunia II mendorong PBB untuk menciptakan perdamaian dunia, namun organisasi terbesar di dunia tersebut tidak mampu menciptakan perdamaian. Apalagi dengan adanya pertentangan antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Apabila pertentangan dua negara tersebut meningkat, maka dapat mengakibatkan perang yang akan merugikan bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk negara-negara di kawasan Asia Afrika.

### a. Konferensi pendahuluan

Pada tahun 1950-an, masih banyak negara-negara di Asia Afrika yang berjuang melawan imperialisme untuk mencapai kemerdekaan. Sebagai perwujudan politik luar negeri bebas aktif, maka bangsa Indonesia mempunyai inisiatif untuk menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Oleh karena itu diadakan pembicaraan pendahuluan yang sering dikenal dengan *Konferensi Panca Negara*. Konferensi pendahuluan tersebut diadakan dua kali, yaitu:

- 1) Konferensi Kolombo di Srilanka. Konferensi di Srilanka disebut *Konferensi Panca Negara I*. Konferensi ini memutuskan bahwa KAA-1 akan diselenggarakan di Indonesia dan Indonesia dipilih sebagai penyelenggara.
- 2) Konferensi Bogor tahun 1954, diadakan di Bogor Indonesia. Konferensi Bogor disebut juga *Konferensi Panca Negara II*. Konferensi ini memutuskan:
  - a) KAA akan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955,
  - b) negara-negara yang akan diundang sebanyak 30 negara,
  - c) menetapkan rancangan agenda konferensi dan merumuskan tujuan pokok konferensi,
  - d) mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat.

### **b. Pelaksanaan KAA**

KAA dilaksanakan di gedung Merdeka Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 29 negara yang terdiri dari:

- 1) Negara-negara pengundang, terdiri dari:
  - a) Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjoyo,
  - b) India diwakili oleh Perdana Menteri J. Nehru,
  - c) Burma diwakili oleh Perdana Menteri U Nu,
  - d) Sialan diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala,
  - e) Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Ali.
- 2) Negara-negara anggota, terdiri dari:
  - a) Negara Asia, antara lain Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Jepang, RRC, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afganistan, Irak, Iran, Saudi Arabia, Syria(Suriah), Yordania, Libanon, Turki, dan Yaman.
  - b) Negara Afrika, antara lain Mesir, Sudan, Ethiopia, Liberia, Libia, dan Ghana (Pantai Emas)



*Sumber: [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)*

*Gambar 4.10 Sebagai perwujudan politik luar negeri bebas aktif, bangsa Indonesia mempunyai inisiatif untuk menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika.*

### **c. Tujuan dan keputusan KAA**

Tujuan diadakannya KAA antara lain:

- 1) mengajukan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam lapangan sosial, ekonomi dan kebudayaan,
- 2) menentang diskriminasi ras dan kolonialisme,
- 3) memperbesar peranan Asia-Afrika di dunia dan ikut mengusahakan perdamaian dunia

Keputusan KAA antara lain:

- 1) memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia-Afrika di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, misalnya memajukan perdagangan antar bangsa Asia-Afrika maupun dengan dunia Internasional, memajukan pengajaran, dan pertukaran pelatih serta guru,
- 2) membantu perjuangan menentang imperialisme ,
- 3) menjunjung hak asasi manusia dan menentang diskriminasi ras,
- 4) ikut aktif dalam mengusahakan perdamaian dunia.

Selain keputusan keputusan tersebut KAA juga menghasilkan Deklarasi Bandung. Deklarasi ini memuat sepuluh prinsip yang dikenal dengan sebutan *Dasa Sila Bandung*. Isi dari deklarasi ini adalah:

- 1) menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang tercantum dalam piagam PBB,
- 2) menghormati kedaulatan dan integritas semua anggota,
- 3) mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil,
- 4) tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain,
- 5) menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB,
- 6) a) tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak khusus bagi salah satu negara besar,  
b) tidak melakukan tekanan terhadap negara lain,
- 7) tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain,
- 8) menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hakim, ataupun cara damai lain lagi menurut pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan piagam PBB,
- 9) memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama,
- 10) menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

#### **b. Peranan KAA dalam rangka meningkatkan hubungan internasional**

KAA mempunyai peranan sangat penting dalam menjalin hubungan antara negara-negara anggota di Asia Afrika maupun dengan negara di seluruh dunia. Dengan adanya bangsa-bangsa Asia Afrika saling menjalin hubungan erat yang dimanifestasikan dalam bentuk persahabatan dan persaudaraan. KAA juga merupakan semangat bangsa-bangsa Asia Afrika untuk menggalang persatuan dan kesatuan sehingga dapat menjaga eksistensinya. Selain itu Konferensi Asia Afrika juga menjadi penegak antara blok Barat dan blok Timur yang saling berlomba-lomba menanamkan pahamnya. Konferensi Asia Afrika juga menjadi pendorong bagi negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan KAA mempengaruhi perdamaian bangsa-bangsa diseluruh dunia. Pengaruh KAA tersebut antara lain:

- 1) berkurangnya ketegangan dunia karena adanya persaingan blok barat dan blok timur yang sama-sama kuat
- 2) mulai dihapusnya diskriminasi ras di negara amerika dan australia
- 3) meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan
- 4) Belanda bingung dalam menghadapi blok Asia Afrika di PBB sebab blok Asia Afrika memberi dukungan Indonesia atas tuntutan terhadap Irian Barat.

### **Arena Diskusi**

Pengertian politik luar negeri yaitu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.



Politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas artinya politik luar negeri yang dianut Indonesia bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif artinya Indonesia memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya.

***Bersama kelompok Anda, tunjukkan bukti-bukti pelaksanaan politik bebas aktif yang dilaksanakan Indonesia!***

### 3. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-bangsa merupakan salah satu organisasi internasional yang terbesar di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB saat ini mempunyai anggota sebanyak 191 negara. PBB sebagai organisasi seluruh negara-negara di dunia, diharapkan mampu melakukan perannya yaitu untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.



Sumber: wordpress.com

Gambar 4.11 Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organisasi internasional yang terbesar di dunia.

#### a. Sejarah singkat berdirinya PBB

Tahun 1915, Amerika Serikat berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan oleh beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan “liga”. Tujuannya untuk menghindarkan ancaman peperangan. Konferensi berpendapat bahwa melalui organisasi internasional dapat dijamin perdamaian internasional. Atas usul presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson pada tanggal 10 Januari 1920 dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Tujuan Liga Bangsa-bangsa ini adalah mempertahankan perdamaian internasional dan meningkatkan kerja sama internasional.



Akan tetapi, LBB tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Perang Dunia II meletus. Perang ini terjadi karena munculnya kekuasaan kaum Nazi di bawah pimpinan Hitler dari Jerman dan kaum fasis yang dipimpin Mussolini dari Italia. Pada saat Perang Dunia II berkecamuk, sangat dibutuhkan organisasi dunia untuk mengadakan kerja sama antarbangsa untuk mengatasi kerusuhan yang melanda dunia.

Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt dan perdana menteri Inggris, Winston Churchill mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter). Piagam ini kemudian ditandatangani oleh 50 negara. Piagam Atlantik mendasari berdirinya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Organisasi baru ini menggantikan peran LBB .

Indonesia masuk PBB pertama kali pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. Pada 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB.

#### ***b. Asas organisasi dan tujuan PBB***

Dalam menjalankan roda organisasi, PBB menganut beberapa asas. Asas-asas tersebut yaitu:

- 1) Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.
- 2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.
- 3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan.
- 4) Dalam hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain.

Asas tersebut mendasari pelaksanaan roda organisasi PBB guna mewujudkan tujuannya. Adapun tujuan PBB yaitu:

- 1) memelihara perdamaian dan keamanan internasional,
- 2) mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antarbangsa,
- 3) menciptakan kerja sama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi,
- 4) menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas.

#### ***c. Struktur organisasi dan tugas PBB***

Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan organ utama PBB, yaitu Majelis Umum (General Assembly), Dewan Keamanan (Security Council), Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council), Dewan Perwalian (Trusteeship Council), Mahkamah Internasional (International Court of Justice), dan Sekretaris Jenderal.

##### ***1) Majelis Umum***

Majelis Umum adalah alat perlengkapan PBB tertinggi dengan sidang lengkap yang terdiri dari wakil-wakil semua negara anggota. Setiap anggota dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam sidang umum, tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suara. Tiap bulan September diadakan sidang umum biasa oleh Majelis Umum. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk mengatur organisasi dan administrasi PBB. Bahasa resmi yang digunakan dalam sidang umum terdiri dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Arab, dan bahasa Cina.

Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, yaitu:

- a) berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional,
- b) berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan perikemanusiaan,
- c) berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis,
- d) berhubungan dengan keuangan,
- e) penetapan keanggotaan,
- f) mengadakan perubahan piagam,
- g) memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Hakim Mahkamah Internasional.

## 2) *Dewan Keamanan*

Dewan Keamanan terdiri dari lima anggota tetap ditambah 10 anggota tidak tetap. Terdapat 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina. Anggota tetap mempunyai hak veto. Adapun anggota tidak tetap dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum.

Dewan Keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau tindakan agresif. Selanjutnya, sebagai tambahan ada suatu komite staf militer yang diperbantukan pada Dewan Keamanan. Kepala staf militer ditunjuk dari kepala staf militer di negara anggota tetap.

Dewan Keamanan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) memelihara perdamaian dan keamanan dunia internasional,
- b) mengamati dan mencegah terjadinya perselisihan,
- c) bersama majelis umum mengangkat hakim mahkamah internasional,
- d) melakukan tindakan militer terhadap agresor,
- e) mengawasi wilayah-wilayah yang sedang bersengketa.



*Sumber: photobucket.com*

*Gambar 4.12 Dewan Keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu masalah yang dianggap mengganggu perdamaian.*

### 3) *Dewan Ekonomi dan Sosial*

Pada awalnya, Dewan Ekonomi dan Sosial beranggotakan 18 negara. Kemudian dengan amandemen tahun 1963 yang berlaku tahun 1965, anggota dewan tersebut bertambah menjadi 27 negara. Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh sidang umum untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun.

Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial tidak lepas dari praktik kehidupan ekonomi dan sosial internasional. Tugas-tugas tersebut, yaitu:

- a) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial,
- b) mengembangkan ekonomi, sosial dan politik,
- c) memupuk hak asasi manusia,
- d) mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum dan anggota PBB.

### 4) *Dewan Perwalian*

Dewan Perwalian terdiri dari:

- a) anggota yang menguasai daerah perwalian,
- b) anggota tetap dewan keamanan,
- c) sejumlah anggota yang dipilih selama 3 tahun oleh sidang umum.

Tugas dan fungsi Dewan Perwalian adalah:

- a) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri.
- b) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia.
- c) Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB.

Piagam PBB menyatakan bahwa kolonialisasi harus dihapuskan. Oleh sebab itu, daerah yang belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah merdeka.

### 5) *Mahkamah Internasional*

Mahkamah Internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antarnegara bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional digunakan. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Adapun syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi seorang hakim meliputi:

- a) mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang kehakiman,
- b) mempunyai reputasi atau nama baik internasional dan terhormat,
- c) mampu memeriksa dan mengadili setiap persoalan yang diajukan,
- d) dalam mengambil keputusan berpedoman kepada sumber hukum internasional.

### 6) *Sekretariat*

Sekretariat terdiri atas sekretaris jenderal dan sekretaris jenderal pembantu yang bertugas sebagai berikut:

- a) mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh majelis umum dan badan-badan utama lainnya,
- b) melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaik-baiknya.

## Aktivitas Mandiri

**Selain badan-badan pokok PBB, ada badan khusus yang didirikan sesuai dengan Perjanjian antaranggota yang mengurus bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan badan-badan lainnya. Carilah dari referensi lain organisasi khusus PBB tersebut dan identifikasilah bergerak dalam bidang apa!**



### E Mendukung Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia

Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, “*Perjanjian internasional dan kerja sama adalah sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya*”. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan perjanjian internasional sangat penting. Selain ketentuan tersebut, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu:

1. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis.
2. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

Kerja sama dan perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam perjanjian internasional, diatur juga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional (antarnegara).

#### 1. Pembagian Macam-Macam Kerja Sama Internasional

Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerja sama, dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerja sama, yaitu:

##### a. Kerja sama bilateral

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerja sama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

##### b. Kerja sama regional

Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerja sama regional antara lain ASEAN dan Liga Arab.

##### c. Kerja sama multilateral

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan beberapa negara. Contoh kerja sama ini antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan pada bidangnya, kerja sama antara negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

**a. Kerja sama bidang ekonomi**

Kerja sama bidang ekonomi adalah bentuk kerja sama yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi negara-negara yang melakukan kerja sama. Kerja sama ekonomi ini di antaranya:

- 1) APEC (*Asia Pasifik Economis Corporation*), yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
- 2) MEE (*Masyarakat Ekonomi Eropa*), yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa.

**b. Kerja sama bidang sosial**

Kerja sama bidang sosial adalah bentuk kerja sama antara negara yang dilakukan dalam bidang sosial. Kerja sama sosial ini di antaranya:

- 1) WHO (*World Health Organization*), yaitu kerja sama antara negara anggota PBB dalam bidang kesehatan.
- 2) UNICEF (*United Nations Children and Education Fund*), yaitu kerja sama antara anggota-anggota PBB dalam menangani permasalahan anak-anak.
- 3) ILO (*Internasional Labour Organization*), yaitu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan.

**c. Kerja sama bidang pertahanan atau politik**

Kerja sama bidang pertahanan atau politik adalah kerja sama yang dilakukan dalam bidang pertahanan atau politik. Bentuk kerja sama ini di antaranya:

- 1) SEATO (*South East Asia Treaty Organization*), yaitu pakta militer yang bertujuan untuk membendung komunisme di kawasan Asia Tenggara.
- 2) ANZUS (*Australia, New Zeland, and United States*), adalah pakta militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.
- 3) NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), adalah pakta pertahanan militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di kawasan Atlantik Utara.
- 4) CENTO (*Central Treaty Organication*), adalah pakta militer yang bertujuan untuk membendung komunisme di Timur Tengah. Pakta militer ini dikenal juga dengan sebutan yang terkenal dengan *Pakta Baghdad*.
- 5) Pakta Warsawa, yaitu pakta militer yang dibentuk oleh Uni Soviet untuk membendung pengaruh Amerika di Eropa Timur.

**2. Perjanjian Internasional yang Dilaksanakan Indonesia**

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh kerja sama dan perjanjian internasional yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia baik perjanjian bilateral maupun multilateral.

**a. Contoh perjanjian bilateral yang dilaksanakan Indonesia**

Contoh kerja sama bilateral yang dilaksanakan Indonesia antara lain:

- 1) Perjanjian Indonesia-Belanda mengenai penyerahan Irian Barat yang ditandatangani di New York pada tanggal 15 Agustus 1962.
- 2) Perjanjian Indonesia-Australia, mengenai garis-garis batas wilayah antara Indonesia dan PNG, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973.

- 3) Perjanjian Indonesia-Malaysia tentang normalisasi hubungan kedua negara yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966.
- 4) Perjanjian antara Indonesia-Malaysia tentang Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969.
- 5) Perjanjian antara Indonesia-Thailand tentang Utara Selat Malaka dan Laut Andaman, ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971.
- 6) Perjanjian antara Indonesia-Singapura tentang garis batas laut teritorial di Selat Singapura ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973.
- 7) Perjanjian antara Indonesia-Papua Nugini tentang saling menghormati, persahabatan dan kerja sama RI-PNG, ditandatangani pada tahun 1987.
- 8) Perjanjian antara Indonesia-Cina tentang dwikewarganegaraan, ditandatangani tahun 1954.

**b. Contoh perjanjian multilateral yang dilaksanakan Indonesia**

Contoh kerja sama bilateral yang dilaksanakan Indonesia, antara lain:

- 1) Konvensi Jenewa tentang “Perlindungan Korban Perang” yang ditandatangani tahun 1949.
- 2) Konvensi tentang “Hukum laut” ditandatangani pada tahun 1958.
- 3) Konvensi Wina tentang “Hubungan Diplomatik” ditandatangani pada tahun 1961.

Karena perjanjian multilateral menyangkut kepentingan umum, maka perjanjian multilateral sifatnya terbuka. Artinya adalah memungkinkan negara-negara yang pertama kali pembentukan tidak ikut sebagai peserta, setelah beberapa saat bisa mengajukan diri untuk diikutsertakan sebagai anggota dari perjanjian tersebut.

**c. Kerja sama internasional yang dilaksanakan Indonesia dengan lembaga internasional**

Selain melakukan perjanjian internasional, Indonesia juga melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional. Peran aktif tersebut baik sebagai pemrakarsa berdirinya suatu lembaga internasional, maupun sebagai anggota aktif.

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia ini antara lain:

- 1) Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950.
- 2) Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika.
- 3) Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961.
- 4) Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda.
- 5) Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN.
- 6) Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulia dari Sea Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.



Sumber: [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com)

Gambar 4.13 Pengiriman Kontingen Pasukan Garuda merupakan salah satu peran serta Indonesia dalam kerja sama internasional

## Aktivitas Mandiri

*Anda telah mempelajari kerja sama internasional yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Menurut pendapat Anda, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam kerja sama tersebut? Analisislah syarat-syarat tersebut, kemudian presentasikan pendapat Anda!*

### 3. Manfaat Kerja sama Indonesia dengan Negara Lain

Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia mempunyai banyak manfaat. Manfaat yang diperoleh dari kerja sama menyangkut berbagai bidang kehidupan.

#### a. Bidang ideologi, manfaatnya antara lain:

- 1) mengetahui nilai-nilai yang dianut oleh negara lain,
- 2) menghindarkan diri dari pengaruh negatif dari nilai-nilai ideologi yang dianut negara lain,
- 3) memperoleh kesempatan untuk menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila dalam setiap berhubungan dengan negara lain.

#### b. Bidang politik, manfaatnya antara lain:

- 1) mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara lain,
- 2) mencontoh aspek-aspek positif dari kehidupan politik di negara lain,
- 3) mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain.

#### c. Bidang ekonomi, manfaatnya antara lain:

- 1) menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara lain,
- 2) dapat menikmati barang-barang yang diproduksi oleh negara lain,
- 3) terbukanya peluang untuk mengeksport produksi dalam negeri ke negara lain.

#### d. Bidang sosial budaya, manfaatnya antara lain:

- 1) terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar,
- 2) dapat mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu di mana negara kita memiliki kekurangan,
- 3) dapat saling memperkenalkan budaya masing-masing.

#### e. Bidang pertahanan dan keamanan, manfaatnya antara lain:

- 1) dapat menghindarkan konflik dengan negara lain,
- 2) terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam proses perwujudan perdamaian dunia,
- 3) terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri.

## Arena Diskusi

***Coba Anda baca dan cermati artikel berikut ini bersama kelompok Anda!***

### **Putri UMNO Minta Penghentian TKI asal Lombok**

**KUALA LUMPUR\_MI-** Pergerakan Putri Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mendesak kementerian dalam negeri Malaysia menghentikan rekrutmen pekerja asing asal Lombok setelah adanya kecenderungan kawin



lari antara gadis-gadis Malaysia dengan pekerja Lombok yang makin mengkhawatirkan.

Ketua Pergerakan Perempuan UMNO Rosnah Abdul Rashid Shirlin mengatakan telah menerima informasi bahwa sekitar 500 wanita Malaysia kini berada di Lombok akibat terjerat ikatan pernikahan dengan pekerja Lombok saat bekerja di Malaysia, demikian kantor berita Malaysia, Bernama, Jumat.

Disebutkan, melihat kejadian tersebut maka kementerian dalam negeri Malaysia perlu membuat mekanisme untuk menghentikannya. Putri UMNO percaya masih akan ada lagi kasus gadis Malaysia nekat meninggalkan keluarga masing-masing karena ingin menikah dengan pekerja Lombok.

Rosnah mengatakan ia tidak mau kasus tersebut meningkat karena bisa mengorbankan masa depan gadis Malaysia dan anak-anak yang akan lahir. (Ant/OL-03)

*Sumber: www.mediaindonesia.com*

1. Tuliskan pendapat Anda berkaitan dengan kebijakan tersebut!
2. Upaya apa menurut Anda dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyikapi kebijakan tersebut?

## Refleksi

Bangsa Indonesia hidup di antara bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu perlu dikembangkan sikap saling menghargai dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kerja sama yang dilakukan merupakan cara dalam berinteraksi dengan bangsa lain di dunia. Hanya saja perlu disepakati sebuah hubungan internasional yang saling menguntungkan dan saling menjaga kehormatan masing-masing.

Makin maju peradaban dunia, maka interaksi antarbangsa mutlak diperlukan. Tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup setiap bangsa. Dalam menjalin hubungan perlu diperhatikan norma dan etika yang berlaku secara internasional. Bagaimana pola hubungan internasional yang harus dikembangkan demi kemajuan bangsa Indonesia? Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalin kerja sama internasional?

## Rangkuman

- Dalam rangka mencukupi kebutuhan warga negara, setiap negara perlu menjalin kerja sama dengan negara lain.
- Kerja sama antarnegara tersebut dinamakan kerja sama internasional.
- Hubungan internasional dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks.
- Kerja sama internasional merupakan perwujudan dari hubungan antarbangsa yang berpijak pada kepentingan nasional.

- Misi negara untuk membina kerja sama yang baik dengan negara lain, diperlukan peranan Departemen Luar Negeri.
- Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif karena lebih menjamin kepastian hukum.
- Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap.
- Tahap pelaksanaan perjanjian internasional terdiri dari perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
- Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian internasional adalah UU No. 24 Tahun 2000.
- Pelaksanaan politik luar negeri merupakan pencerminan ideologi bangsa.
- Dalam rangka menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan negara lain, Indonesia membuka perwakilan tetap sebagai lembaga resmi yang menangani kegiatan luar negeri.
- Organisasi internasional merupakan organisasi yang bersifat tetap dan dibentuk atas dasar perjanjian internasional.
- Kerja sama dan perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif karena lebih menjamin kepastian hukum.
- Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerja sama, dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerja sama, yaitu kerja sama bilateral, kerja sama regional, dan kerja sama multilateral.
- Berdasarkan pada bidangnya, kerja sama antara negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu kerja sama bidang ekonomi, sosial, pertahanan, atau politik



### Pilihan Ganda

**I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!**

1. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain.  
Pernyataan di atas merupakan pengertian dari ....
  - a. monodualis
  - b. monolateral
  - c. dualisme
  - d. dwilateral
  - e. dikotomisme
2. Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara negara yang satu dengan negara lain.  
Pernyataan di atas adalah definisi hubungan internasional menurut ....
  - a. Mohtar Mas'ood
  - b. K. C. Wheare
  - c. John Houston
  - d. Mochtar Kusumaatmadja
  - e. Robert Strausz dan Stefan T. Possony
3. Pada masa Perang Dingin, negara-negara yang tergabung dalam Blok Barat secara umum menganut paham ....
  - a. komunisme
  - b. monarki
  - c. liberal
  - d. teokrasi
  - e. aristokrasi
4. Faktor yang harus diperhatikan dalam kerja sama internasional tercantum di bawah ini, kecuali ....
  - a. posisi geografis
  - b. kekayaan alam
  - c. sejarah perjuangan
  - d. sumber daya manusia
  - e. jumlah penduduk
5. Lembaga yang menangani urusan hubungan luar negeri suatu negara adalah ....
  - a. departemen luar negeri
  - b. departemen hukum dan HAM
  - c. departemen tenaga kerja
  - d. kedutaan
  - e. parlemen
6. Ketentuan atas hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihak yang membuat perjanjian disebut ....
  - a. komite internasional
  - b. pacta sunt servanda
  - c. law making treaties
  - d. treaty contract
  - e. perjanjian internasional

7. *Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.*  
Pernyataan di atas dikemukakan oleh ....
- John Houston
  - Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
  - Oppenheimer-Lauterpacht
  - Konferensi Wina tahun 1969
  - G. Schwarzenberger
8. Perjanjian internasional menurut subjeknya terbagi dalam ....
- perjanjian bilateral dan multilateral
  - law making treaties dan treaty contract
  - perjanjian penting dan sederhana
  - traktat dan konvensi
  - protokol dan persetujuan
9. Tahap terakhir dalam perjanjian internasional adalah ....
- perundingan
  - internalisasi
  - penandatanganan
  - pengikatan diri
  - pengesahan
10. Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri yang bebas dan aktif, ada beberapa sikap yang perlu kita dukung, *kecuali* ....
- menetapkan peranan Indonesia dalam ASEAN
  - menyokong uji coba nuklir di bawah dasar laut
  - membantu negara tetangga
  - mengirim utusan diplomatik
  - mengirim TKI semaksimal mungkin
11. Pengakuan secara de jure berarti ....
- pengakuan berdasarkan hukum
  - pengakuan berdasarkan kenyataan
  - pengakuan berdasarkan konvensi
  - pengakuan berdasarkan musyawarah
  - pengakuan berdasarkan surat keputusan
12. Pelaksanaan politik luar negeri merupakan pencerminan ....
- cita-cita bangsa
  - tujuan negara
  - ideologi negara
  - sistem politik
  - sosiokultural masyarakat
13. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah ....
- konvensi
  - GBHN
  - Pancasila
  - UUD 1945
  - Pembukaan UUD 1945

14. Bahwa janji itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini disebut ....
  - a. covenant
  - b. protocol
  - c. charter
  - d. pacta sunt servanda
  - e. konvensi
15. Istilah ini biasanya digunakan untuk mendirikan suatu badan/lembaga misalnya piagam PBB.  
Pernyataan di atas berkaitan dengan istilah ....
  - a. traktat
  - b. piagam
  - c. charter
  - d. deklarasi
  - e. treaty
16. Proses pembuatan perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral biasanya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, kecuali ....
  - a. perundingan
  - b. penandatanganan
  - c. pengesahan
  - d. signature
  - e. full power
17. Tindakan penguatan/pengesahan materi perjanjian disebut ....
  - a. ratification
  - b. signature
  - c. negotiation
  - d. penandatanganan
  - e. pelaksanaan
18. Politik luar negeri Indonesia merupakan bagian dari ....
  - a. strategi nasional
  - b. politik nasional
  - c. cita-cita nasional
  - d. kepentingan nasional
  - e. tujuan nasional
19. Perwakilan yang mempunyai tugas di bidang nonpolitik dinamakan ....
  - a. duta besar
  - b. menteri presiden
  - c. perwakilan
  - d. kuasa usaha
  - e. duta besar luar biasa
20. Kota yang identik dengan Konferensi Asia Afrika adalah ....
  - a. Jakarta
  - b. Bandung
  - c. Medan
  - d. Surabaya
  - e. Makasar

## **B** Uraian

### **II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!**

1. Apa yang dimaksud dengan perjanjian internasional?
2. Uraikan yang dimaksud dengan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral!
3. Apa yang dimaksud dengan law making treaties dan ratifikasi?
4. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam kerja sama internasional? Jelaskan!
5. Sebutkan peranan departemen luar negeri dalam mewujudkan kerja sama internasional yang sehat!
6. Uraikan manfaat kerja sama internasional!
7. Jelaskan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian internasional!
8. Mengapa suatu perjanjian internasional dapat dibatalkan? Jelaskan alasan-alasannya!
9. Apa yang dimaksud kebijakan politik luar negeri?
10. Uraikan dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif!

## **C** Uji Kreativitas

*Lakukan survei di daerah tempat tinggal Anda mengenai pelaksanaan hukum/peraturan yang ada. Analisislah tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan/hukum! Apabila diperlukan, lakukan wawancara baik dengan warga masyarakat maupun perangkat desa. Hasilnya diskusikan dengan teman Anda dan buatlah kesimpulan!*

## **D** Studi Kasus

### **Langkah Kegiatan:**

1. Pahami cuplikan artikel berikut ini!
2. Susunlah pendapat Anda berdasarkan hasil analisis dari tema artikel yang telah Anda pahami!

### **Landasan Teori:**

1. Materi tentang Keterbukaan dan Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional.
2. Referensi yang membahas tentang hubungan dan organisasi internasional.
3. Wawancara dengan narasumber.

### **Bahan Kajian:**

#### **RI-Malaysia Sepakat Lindungi TKI**

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Juru Bicara Eminent Persons Group Indonesia (EPG), Musni Umar, di Jakarta, Jumat (12/3/2010), menyambut baik kesepakatan Indonesia-Malaysia, terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk lebih memberi perlindungan kepada TKI, seperti libur sehari dalam satu minggu, paspor dipegang oleh TKI, dan adanya perjanjian kerja, patut disambut gembira,” ujar Musni.

“Ini satu kemajuan yang patut disyukuri,” sambungnya.

Namun, Musni berharap, sebelum kesepakatan ditandatangani oleh kedua negara, dapat ditambahkan satu pasal yaitu TKI boleh memegang telepon genggam atau ponsel, untuk memudahkan hubungan ke luar. Misalnya untuk menghubungi ke atase perburuahan Kedubes RI, atau sebaliknya, sehingga perlindungan TKI lebih bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan pemerintah RI-Malaysia dan masyarakat kedua negara.

*Sumber: Kompas.com*

# Bab

## 5

## Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

### Pendahuluan

Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur dan menciptakan keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Hukum bersifat memaksa seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Maka dari itu, setiap pelanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan. Untuk menjaga pelaksanaan hukum, dibentuklah lembaga hukum. Fungsinya adalah menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara adil dan damai yaitu lembaga peradilan.

Sebagaimana halnya masyarakat dalam negara, masyarakat internasional pun memiliki hukum. Sebutannya adalah hukum internasional. Hukum internasional dibentuk dalam rangka mengatur hubungan antarbangsa dan masyarakat dalam pergaulan internasional. Dalam hubungan antarbangsa, seringkali menemui banyak sekali permasalahan yang kadang menimbulkan perselisihan atau sengketa antarbangsa. Perselisihan atau persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional. Setiap negara dapat mengikatkan diri pada hukum internasional dengan cara melakukan ratifikasi atas hukum internasional tersebut.

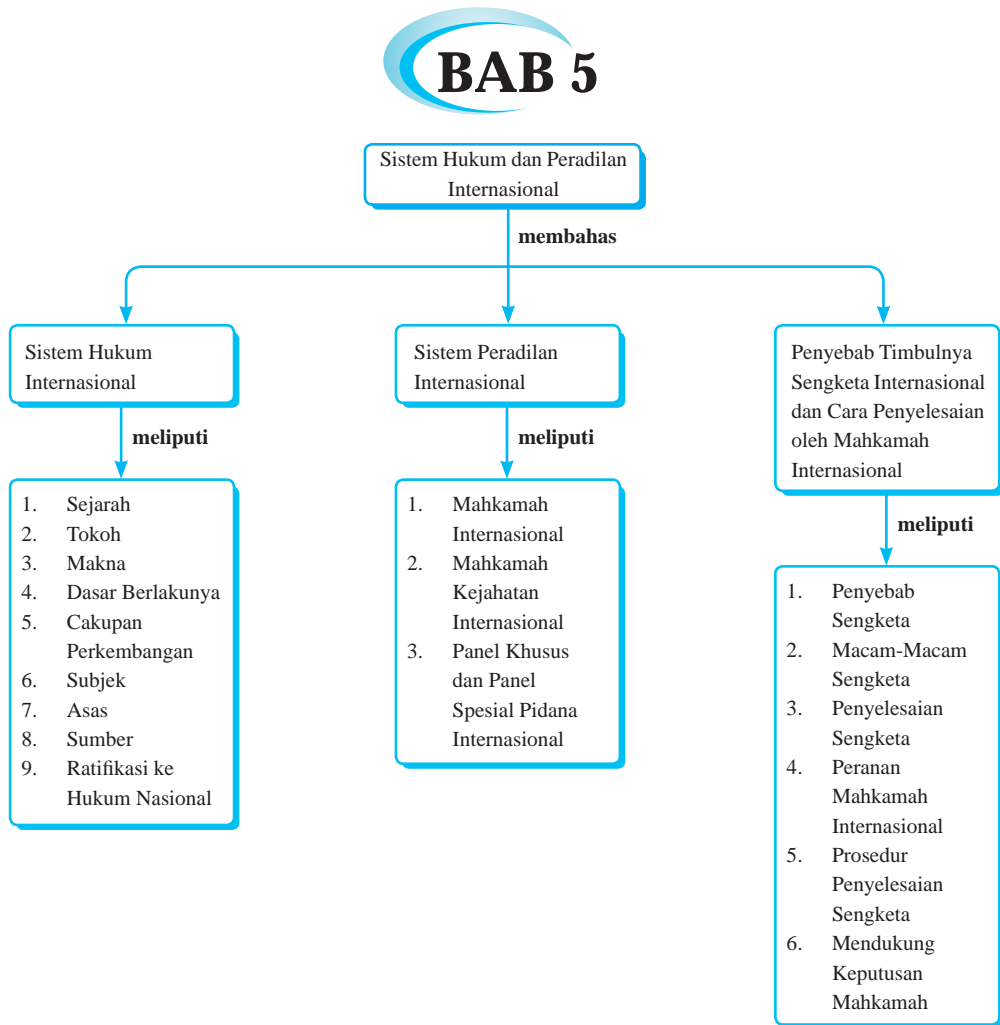


*Sumber: weblog.leidenuniv.nl*

*Gambar 5.1*



# Peta Konsep



## Kata Kunci

- sistem
- hukum
- peradilan
- sengketa
- mahkamah
- putusan
- sanksi

Hukum internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Pada masa keemasan kerajaan kuno di Benua Eropa, Asia, maupun Afrika, hukum internasional sudah diberlakukan dalam hubungan antarkerajaan. Pada masa tersebut, hukum yang berlaku masih dalam bentuk dan sifat yang masih sederhana. Pada abad XVI, hukum internasional mulai menemukan bentuknya. Pada masa ini, hukum internasional mulai memenuhi persyaratan sebagai hukum, meski belum dapat dikatakan maksimal.

### 1. Sejarah Hukum Internasional

Hukum internasional modern lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat internasional yang berdasarkan atas negara-negara nasional. Negara-negara nasional modern lahir pada saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian *Westphalia*. Perjanjian ini menandai berakhirnya *Perang Tiga Puluh Tahun* di Eropa.

Dalam praktiknya, hukum internasional memiliki arti secara luas. Pengertian hukum internasional mencakup hukum yang mengatur hubungan antarbangsa. Berdasarkan pengertian ini, maka hukum internasional sudah ada sejak masa sebelum Masehi. Hal tersebut dapat diketahui dari lingkungan kebudayaan India kuno. Dalam kebudayaan tersebut telah terdapat kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga hukum yang mengatur hubungan antarkasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja.

#### a. Masa sebelum Masehi

Perkembangan hukum internasional pada masa abad sebelum Masehi dapat ditemukan dalam kebudayaan berbagai bangsa. Di antara bangsa-bangsa tersebut adalah India, Yahudi, Yunani, dan Romawi. Keempat bangsa dengan peradaban besar tersebut meninggalkan konsep-konsep hukum yang berguna dalam mengembangkan hukum internasional.

##### 1) Bangsa India

Pada abad VI SM, kerajaan-kerajaan di India sudah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur oleh adat kebiasaan, yang dinamakan *Dasa Dharma*. Berlakunya hukum di India pada masa sebelum Masehi tertulis dalam *Arta Satra Gautamasutra*. Kitab ini ditulis oleh Canakya atau Kautilya. *Arta Satra Gautamastra* memuat tentang hukum kerajaan dan hukum keluarga, serta hukum kasta. Selanjutnya pada abad V SM muncul undang-undang Manupada. Undang-undang ini memuat tentang hukum kerajaan. Dari kenyataan-kenyataan ini dapat diketahui bahwa pada waktu itu sudah ada hukum internasional yang mengatur hubungan antara raja-raja. Meskipun demikian, hukum yang berlaku pada masa sebelum Masehi belum dapat disamakan persis dengan hukum internasional pada saat ini.

Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno sudah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa diplomat atau utusan raja(duta). Demikian juga diatur tentang perjanjian (*treaties*), hak-hak dan kewajiban raja. Hukum perang waktu itu juga sudah ada dan jelas pengaturannya.

## 2) *Bangsa Yahudi*

Kitab yang dianggap sebagai sumber hukum bagi bangsa Yahudi Kuno adalah Kitab Perjanjian Lama. Melalui kitab tersebut, bangsa Yahudi mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Dalam hukum perang, masih dibedakan perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.

## 3) *Bangsa Yunani*

Lingkungan kebudayaan Yunani terdiri dari negara-negara kecil. Menurut hukum negara kota, penduduk digolongkan dalam 2 golongan yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan (arbitration) dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya.

Sumbangan yang berharga untuk hukum internasional waktu itu ialah konsep hukum alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak di manapun juga dan yang berasal dari rasion atau akal manusia. Konsep ini mulai dikenal pada abad III SM.

## 4) *Bangsa Romawi*

Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu Imperium Roma. Imperium ini menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan.

Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Konsep hukum bangsa Romawi antara lain *occupatio servitut*, *bona fides*, serta *asas pacta sunt servanda*.

Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu *Ius Ceville* dan *Ius Gentium*. *Ius Ceville* adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, di manapun mereka berada. *Ius Gentium* adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.

### b. *Abad pertengahan*

Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar. Adapun kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Takhta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlainan yaitu Kekaisaran Byzantium dan Kekaisaran Islam. Kekaisaran Byzantium mempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya, praktik diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan hukum internasional. Adapun Kekaisaran Islam memberikan sumbangan penting dalam bidang hukum perang.

### c. *Perjanjian Westphalia 1648*

Perjanjian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Perjanjian ini bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional, karena:

- 1) Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang di Eropa.
- 2) Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci.
- 3) Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara masing-masing.
- 4) Kemerdekaan Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru. Bentuk masyarakat didasarkan atas negara-negara nasional, tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan. Bersamaan dengan bentuk baru tersebut, juga terjadi perubahan mengenai hakikat negara dan pemerintahan. Praktik kenegaraan dan pemerintahan dilaksanakan dengan melakukan pemisahan antara kekuasaan negara dan pemerintahan dengan pengaruh gereja.

Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperkuat dengan Perjanjian Utrecht. Berdasarkan Perjanjian Utrecht, semua aktivitas politik internasional dilaksanakan berdasarkan asas keseimbangan kekuatan.

## 2. Tokoh Hukum Internasional

Terdapat beberapa tokoh yang dianggap sebagai peletak dasar teori hukum internasional. Para tokoh tersebut di antaranya:

### a. *Hugo Grotius*

Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum internasional kepada hukum alam. Hukum alam yang diilhami oleh akal manusia. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Hukum alam banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai sumber hukum internasional. Atas perannya dalam mengembangkan teori hukum internasional, Hugo Grotius disebut sebagai *Bapak Hukum Internasional*.

### b. *Fransisco Vittoria*

Fransisco Vittoria adalah seorang biarawan Dominikan berkebangsaan Spanyol. Pada abad XIV, ia menulis buku *Relectio de Indis* Buku ini menjelaskan hubungan antara Spanyol dan Portugis dengan suku bangsa Indian di Amerika Serikat.

Menurut Fransisco Vittoria, negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Ia menyebutkan hukum bangsa-bangsa dengan sebutan *ius intergentes*.

### c. *Fransisco Suarez*

Fransisco Suarez menulis *De legibus ae Deo legislatore* (On laws and God as legislator). Dalam tulisannya ia mengemukakan adanya suatu hukum atau kaidah objektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.



Sumber: ancestry.com

Gambar 5.2  
Fransisco Suarez menulis *De legibus ae Deo legislatore* (On laws and God as legislator.)

#### d. Balthazer Ayala dan Alberico Gentilis

Menurut Balthazer Ayala dan Alberico Gentilis, hubungan antarbangsa harus didasarkan pada falsafah keagamaan dan tidak ada pemisahan antara hukum, etika, dan teologi.

### Tokoh

#### Hugo Grotius



Hugo Grotius, juga dikenal sebagai Huig de Groot atau Hugo de Groot lahir pada 10 April 1583 di Delft, Belanda. Ia dikenal sebagai seorang filsuf, teolog, apologis Kristen, dramawan, dan penyair. Bersama Francisco de Vitoria dan Alberico Gentili, Hugo Grotius merupakan peletak dasar-dasar teori hukum internasional yang dikenal dengan *Teori Hukum Alam*.

Hugo Grotius lahir pada masa pemberontakan Belanda. Hugo memasuki Universitas Leiden ketika baru berusia sebelas tahun. Di sana ia belajar dengan beberapa intelektual paling terkenal di Eropa Utara, termasuk Franciscus Junius, Yusuf Yustus Scaliger, dan Rudolph Snellius. Pada usia 14 tahun, Hugo menerbitkan buku pertamanya, sebuah edisi ilmiah zaman kuno akhir penulis Martianus Capellas.

Beberapa karya ilmiah Hugo Grotius adalah:

1. De Indis (Di Hindia), yang memaparkan mengenai prinsip-prinsip keadilan alamiah.
2. De Jure Praedae (Pada Hak Capture), yang memaparkan mengenai keadilan bekerja berdasarkan keadilan internasional.
3. De Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai), yang memaparkan mengenai hukum dan hubungan internasional.
4. The Free Sea/Mare Liberum, yang merumuskan bahwa laut adalah wilayah internasional dan semua bangsa bebas menggunakannya untuk pelayaran perdagangan.

*Sumber: id.wikipedia.org*

### 3. Makna Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Dengan demikian, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara *negara dengan negara* dan *negara dengan subjek hukum lain bukan negara* atau *subjek hukum bukan negara satu sama lain*.

Untuk memahami makna hukum internasional, perlu diketahui terlebih dahulu berbagai definisi tentang hukum internasional. Definisi atau batasan hukum internasional bukan sesuatu yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Hal tersebut karena batasan atau pengertian hukum internasional senantiasa harus disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat internasional.

Beberapa definisi mengenai hukum internasional tercantum berikut ini.



Sumber: geopolitika.l

Gambar 5.3 Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, atau hukum antarnegara.

#### a. *Hugo Grotius*

Dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* (Perihal Perang dan Damai), Hugo Grotius mengemukakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan dari beberapa negara atau semua negara.

#### b. *Prof. Mochtar Kusumaatmadja*

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

#### c. *Charles Cheny Hyde*

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel them selves bound to observe, and there fore do commonly observe in ther veletions with each other and which includes also:

- 1) the rule of law relating to the functioning of international institutions of organizations, their relations with each other and their relations with states and individuals; and
- 2) certain rules of law relating to individuals and non-states entities so far as the right or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah:

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan oleh karena itu, juga dihormati dalam hubungan antara mereka satu dengan yang lain, dan juga mencakup:

- 1) Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau organisasi internasional hubungan antara organisasi internasional itu satu dengan lainnya; hubungan antara organisasi internasional itu dengan negara dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu-individu.
- 2) Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara sepanjang hak dan kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara itu bersangkutan-paut dengan masalah masyarakat internasional.

#### d. J.G. Starke

J.G. Starke dalam bukunya *Stark's International Law* mengemukakan definisi hukum internasional:

*“Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan dengan demikian mereka (negara-negara) itu juga harus menghormati atau mematuhi dalam hubungannya satu sama lain, dan yang juga mencakup.*

- 1) *peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, hubungan antara organisasi internasional dengan negara serta hubungan antara organisasi internasional dengan individu,*
- 2) *peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non state entities) sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara itu bersangkut paut dengan persoalan masyarakat internasional”.*

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum internasional adalah seperangkat kaidah dan prinsip tindakan ataupun tingkah laku yang mengikat negara, yang berupa sistem hukum.

### Aktivitas Mandiri

*Hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Menurut pendapat Anda, apa kaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional di masing-masing negara? Jelaskan pendapat Anda!*

#### 4. Dasar Berlakunya Hukum Internasional

Dasar-dasar berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari teori-teori berikut ini:

##### a. Teori Hukum Alam

Hukum ideal didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhami alam pada akal manusia. Hukum internasional tidak lain merupakan hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.

Para penganut Teori Hukum Alam disebut golongan naturalis. Tokohnya adalah Hugo de Groot atau Grotius, Francisco de Vittoria, Francisco Suarez, dan Alberico.

##### b. Teori Positivisme

Kekuatan mengikatnya hukum internasional pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Hukum internasional berasal dari kemauan negara dan berlaku karena disetujui oleh negara.



Para penganut Teori Positivisme disebut golongan positivisme. Tokohnya adalah Jacques Rousseau, Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche, dan Emerich de Vattel.

### c. Teori Aliran Mahzab Wina

Kekuatan mengikat hukum internasional bukan kehendak negara melainkan norma hukum yang merupakan dasar terakhir yang harus di patuhi oleh setiap negara. Kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi.

Aliran mahzab Wina lahir pada abad XIX, dengan diselenggarakannya Kongres Wina tahun 1815. Hasil Kongres Wina memengaruhi percepatan perkembangan hukum internasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- 1) Setelah Kongres Wina tahun 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain.
- 2) Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (*lawmaking treaties*) di bidang perang, netralitas, peradilan, dan arbitrase.
- 3) Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

### b. Teori Aliran Mahzab Prancis

Kekuatan mengikatnya hukum internasional dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan hidup manusia. Hukum internasional mengikat karena faktor biologis, sosial, sejarah, atau fakta kemasyarakatan.

Aliran Mahzab Prancis lahir di abad XX. Pada masa ini, perkembangan hukum internasional makin cepat. Hal tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antarnegara.
- 2) Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang.
- 3) Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional, maupun bersifat global.
- 4) Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.

## 5. Cakupan Perkembangan Hukum Internasional

Perkembangan hukum internasional yang terjadi selama beberapa dasawarsa terutama menyangkut hal-hal yang akan diuraikan berikut ini.

- a. Pembentukan sejumlah besar lembaga-lembaga atau organisasi internasional yang bersifat tetap. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan-Badan Khusus PBB (*Specialized Agencies*) yang dapat mengadakan hubungan satu sama lain maupun mengadakan hubungan dengan negara.



Sumber: film.com rousseau

Gambar 5.4  
Jacques Rousseau  
merupakan salah  
seorang tokoh aliran  
positivisme.

- b. Adanya gerakan yang diprakarsai oleh PBB dan Dewan Eropa (Council of Europe) untuk:

- 1) melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan fundamental dari individu,
- 2) terbentuknya aturan-aturan atau kaidah-kaidah guna menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan internasional seperti genosida (genocide) atau kejahatan pemusnahan ras,
- 3) dibebankannya kewajiban pada individu berdasarkan keputusan dari Tribunal Militer Internasional Nuremberg atau Peradilan Nuremberg tahun 1946 yang melakukan kejahatan internasional seperti:

- a) kejahatan terhadap perdamaian dunia (crimes against peace),
- b) kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity),
- c) konspirasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu sebagai kejahatan internasional.

- c. Pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) yang berkedudukan di Den Haag. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma yang ditandatangani pada tahun 1993.



*Sumber: wordpress.com*

*Gambar 5.5 Pelaksanaan Tribunal Militer Internasional Nuremberg atau Peradilan Nuremberg tahun 1946*

### **Info Khusus**

Berdasarkan Statuta Roma 1993, siapapun yang terlibat dalam kejahatan terhadap perdamaian dunia, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida ataupun berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya seperti kejahatan terorisme dapat diajukan ke depan International Criminal Court tanpa melihat apakah mereka adalah kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat tinggi negara ataupun pejabat militer.

*Sumber: one indoskripsi.com*

- d. Terbentuknya mahkamah kriminal internasional yang bersifat adhoc, seperti misalnya apa yang dinamakan The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslav (ICTY) dan The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kedua lembaga bertujuan untuk mengadili individu-individu yang terlibat dalam berbagai kejahatan kemanusiaan tanpa menghiraukan apakah mereka kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat tinggi negara atau pemerintahan baik dari kalangan sipil maupun militer.
- e. Pembentukan Uni Eropa (European Union) berdasarkan perjanjian internasional yang disebut Perjanjian Maastricht pada tahun 1992 yang merupakan kesepakatan dari sebagian besar dari negara-negara di Benua Eropa untuk membentuk dan menerapkan Sistem Pasar Tunggal dan menggunakan Mata Uang Euro sebagai Mata Uang Tunggal.
- f. Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara yang terbentuk melalui Deklarasi ASEAN tahun 1967 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

## 6. Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut Ian Brownlie, subjek hukum internasional merupakan entitas yang mengundang hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional.

Subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, wilayah-wilayah perwalian, kaum beligerensi, dan individu-individu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu.

### a. Negara

Menurut *Konvensi Montevideo* 1949 kualifikasi atau syarat-syarat suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional antara lain adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

Di antara subjek-subjek hukum internasional lainnya, negara merupakan subjek hukum internasional yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan negara yang tidak dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya adalah:

- 1) Negara mempunyai kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya.
- 2) Negara menentukan keberadaan subjek hukum internasional lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkataan lain negara merupakan entitas dasar dan awal bagi terbentuknya masyarakat internasional

Oleh karena dua keistimewaan di atas itulah negara dapat menentukan sendiri tindakan-tindakan yang hendak diambil.

Negara adalah subjek hukum internasional yang utama. Alasan yang mendasarinya adalah:

- 1) Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diurus oleh hukum internasional terutama adalah negara.
- 2) Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama di mana negara yang paling berperan menciptakannya sehingga secara tidak langsung negara adalah subjek hukum internasional yang utama.

### b. Organisasi internasional

Munculnya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerja sama internasional secara tetap. Klasifikasi organisasi internasional menurut *Theodore A Coulombis* dan *James H. Wolfe* yaitu:

- 1) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa.
- 2) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, seperti *World Bank*, *UNESCO*, *International Monetary Fund*, dan *International Labour Organization*.
- 3) Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, seperti *Association of South East Asian Nation* (ASEAN), dan Uni Eropa (*Europe Union*).

### c. *Palang Merah Internasional*

Palang Merah Internasional didirikan oleh 5 orang berkebangsaan Swiss. Organisasi ini dipimpin oleh Henry Dunant. Palang Merah Internasional bergerak dalam bidang kemanusiaan secara universal. Keanggotaan Palang Merah Internasional bukan negara, tetapi Palang Merah Nasional dari setiap negara. Jadi Palang Merah Internasional tergolong sebagai organisasi Internasional pemerintah (NGO).

### d. *Takhta Suci*

Takhta Suci berkedudukan di Vatikan, Roma. Takhta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929. Perjanjian yang disepakati antara pemerintah Italia dan Takhta Suci Vatikan tersebut mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Takhta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri.

Karena wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci dan umat Katolik sedunia, maka banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Takhta Suci dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan. Demikian juga sebaliknya Takhta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara.

Takhta Suci memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang kerohanian atau keagamaan. Keseluruhan negara-negara di dunia yang menganut agama Katolik memberikan tempat kepada Takhta Suci sebagai pemimpin bidang keagamaan.



Sumber: wordpress.com

Gambar 5.6 Takhta Suci Vatikan menjadi salah satu subjek hukum internasional.

### e. *Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya*

Organisasi pembebasan adalah organisasi atau bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk membangkitkan semangat rakyat mereka agar terbebas dari negara penjajah dan sederajat dengan bangsa lain. Contoh organisasi pembebasan adalah:

- 1) Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) yang sejak tahun 1948 memperjuangkan hak-haknya untuk mendirikan sebuah negara Palestina merdeka di wilayah yang sekarang dikuasai Israel.
- 2) Organisasi Rakyat Afrika Darat Baya (South West Africa People,s Organization/SWARO) yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendirikan negara Afrika Barat Daya dari belenggu penjajahan Afrika Selatan.

### f. *Kaum beligerensi*

Kaum Beligerensi atau kaum pemberontak adalah organisasi atau sekelompok orang yang melakukan penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Adapun ciri-ciri kaum beligerensi adalah:

- 1) pemberontak yang terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pemimpinnya yang jelas,
- 2) pemberontak biasanya menggunakan tanda pengenal yang jelas,
- 3) kaum pemberontak sudah menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga wilayah-wilayah itu benar-benar di bawah kekuasaannya,
- 4) kaum pemberontak mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya tersebut.

#### g. *Wilayah-wilayah perwalian*

Keberadaan wilayah perwalian bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Maksud dari wilayah perwalian adalah wilayah-wilayah jajahan dari negara-negara yang karena kalah dalam Perang Dunia I lalu ditempatkan di bawah mandat dari negara lain dalam rangka membimbing wilayah itu untuk menjadi negara merdeka. Seperti misalnya wilayah Afrika Barat Daya atau Namibia yang ditempatkan di bawah mandat Afrika Selatan.

#### h. *Individu*

Individu yang bisa menjadi subjek hukum internasional adalah individu-individu yang memiliki kriteria-kriteria khusus, seperti mereka yang telah dituduh melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### i. *Perusahaan multinasional*

Perusahaan multinasional merupakan fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Keberadaan perusahaan multinasional menjadi fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Hubungan tersebut melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi, dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.

### **Nilai-Nilai Pancasila**

*Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai. Bangsa kita mau bekerja sama dan saling menolong dengan bangsa lain. Namun, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan kerja sama, yaitu kedaulatan. Kedaulatan bangsa diperoleh dengan tetesan keringat dan darah para pahlawan. Kedaulatan mutlak harus dipertahankan dengan alasan dan cara apapun.*

## 7. **Asas Hukum Internasional**

Hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara yang terlibat. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. Seperti umumnya sistem hukum lainnya, sistem hukum internasional dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu sebagai pedomannya.

Adapun asas-asas hukum internasional meliputi:

### a. *Asas teritorial*

Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas teritorial negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing sepenuhnya.

### **b. Asas kebangsaan**

Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas kebangsaan setiap warga negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas kebangsaan mempunyai kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

### **c. Asas kepentingan umum**

Asas kepentingan umum didasarkan kepada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan-paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas wilayah negara.

Dalam pelaksanaan hukum internasional sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal ada beberapa asas, antara lain:

- a. *Pacta sunt servanda*, artinya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya.
- b. *Egality rights*, artinya pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.
- c. *Reciprositas*, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif.
- d. *Courtesy*, artinya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.
- e. *Rebus sig stantibus*, artinya asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

## **Info Khusus**

### **Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Dalam kehidupan masyarakat internasional, terjadi interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara dalam hidup bermasyarakat membentuk hukum internasional, sedangkan masing-masing negara memiliki hukum nasional. Perjanjian yang dibuat oleh negara masuk dalam ruang lingkup hukum internasional, tetapi untuk mengimplementasikan hukum internasional sering memerlukan perundang-undangan nasional. Kekebalan diplomatik yang disediakan hukum internasional, tidak ada artinya bila tidak diakui dan tidak dilindungi oleh hukum nasional.

Kaitannya dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dapat diambil suatu aturan bahwa hukum nasional tidak mempunyai pengaruh pada kewajiban negara di tingkat internasional, tetapi hukum internasional tidak sama sekali meninggalkan hukum nasional. Namun untuk menentukan lebih jauh bagaimana hukum internasional dan hukum nasional harus saling bereksistensi, serta apa yang terjadi bila ada konflik antarkeduanya, digunakanlah teori hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Teori tersebut adalah:

#### **1. Teori dualisme**

Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda.



## 2. Teori monisme

Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya. Berdasarkan teori monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional hierarkinya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Namun ada pula monisme yang menganggap hukum nasional sejajar dengan hukum internasional. Keduanya harus sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai suatu sistem hukum pada umumnya.

*Sumber: id.wikipedia.org*

## 8. Sumber Hukum Internasional

Membahas mengenai sumber hukum pada umumnya dan sumber hukum internasional pada khususnya, maka lebih dahulu kita memahami arti kata “sumber” tersebut. Selanjutnya, barulah kita mengkaitkannya dengan kata “hukum” dan secara lebih khusus lagi dengan “hukum internasional”

Dalam bahasa Indonesia, kata *sumber* berarti asal, asal-usul ataupun asal mula. Kalau kita renungkan secara mendalam perkataan sumber mengandung arti luas, yaitu:

- a. Sumber diartikan sebagai awal mula atau kemunculan yang pertama kali, jadi sebelumnya tidak ada atau tidak pernah terwujud.
- b. Sumber diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan berupa rangkaian peristiwa ataupun fakta.
- c. Sumber diartikan sebagai bentuk atau wujud yang tampak atau yang menimbulkan benda, fakta, atau peristiwa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, jika dihubungkan dengan hukum internasional, maka sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:

- a. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional
- b. Metode penciptaan hukum internasional
- c. Tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret.

Dalam merumuskan sumber-sumber hukum internasional, harus dikaji terlebih dahulu mengenai pengertian sumber-sumber hukum dalam arti material dan dalam arti formal.

### a. Arti material

Hukum internasional berbeda dengan tata hukum nasional, karena tidak memiliki lembaga yang dapat disamakan dengan hukum. Masyarakat internasional bukanlah suatu negara dunia yang memiliki suatu badan kekuasaan atau pemerintahan seperti suatu negara. Pelaksanaan hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Meskipun demikian kaidah hukum internasional juga ditaati sebagian besar negara anggota masyarakat internasional.



### 1) *Aliran naturalis*

Aliran naturalis berdasarkan pada hak asasi atau hak alamiah. Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang berasal dari Tuhan. Hukum alam dianggap lebih tinggi daripada hukum nasional.

### 2) *Aliran positivisme*

Aliran positivisme mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara-negara ditambah dengan asas yang dianut mazhab Wina.

### b. *Arti formal*

Sumber hukum dalam arti formal artinya adalah sumber dari mana didapatkan atau ditemukan ketentuan hukum internasional. Sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum utama yang memiliki otoritas tertinggi dan otentik. Sumber hukum utama dapat dipergunakan Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa internasional.

## Aktivitas Mandiri

Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional. Hubungan antarmasyarakat internasional mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama.

***Menurut pendapat Anda, sejauh mana peran hukum internasional dalam menciptakan keteraturan dalam hubungan masyarakat internasional? Jelaskan pendapat Anda!***

Sumber hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 adalah perjanjian internasional atau traktat, kebiasaan internasional, keputusan pengadilan, doktrin atau pendapat para sarjana, dan keputusan-keputusan atau resolusi organisasi internasional.

### 1) *Perjanjian internasional atau traktat*

Perjanjian internasional adalah persetujuan antarsubjek hukum internasional, terutama negara yang diatur dengan hukum internasional. Dengan demikian perjanjian internasional juga dapat didefinisikan sebagai konsensus internasional yang diekspresikan melalui instrumen-instrumen berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

- Perjanjian internasional tertulis adalah setiap perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya antara lain: konvensi, protokol, persetujuan, penetapan, statuta, dan deklarasi.
- Perjanjian tidak tertulis diartikan sebagai setiap perjanjian internasional yang tidak tertulis dan berupa ucapan lisan, tindakan tertentu dari negara atau subjek hukum internasional lainnya.

## 2) *Kebiasaan internasional*

Hukum kebiasaan internasional yaitu kebiasaan internasional yang telah diakui mempunyai kekuatan hukum. Hukum kebiasaan internasional merupakan praktik umum negara yang sudah diterima sebagai hukum.

## 3) *Keputusan pengadilan*

Keputusan pengadilan yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional adalah setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan/organisasi pengadilan internasional yang mengatur/memutus perselisihan atau persengketaan yang diajukan ke hadapannya. Artinya keputusan badan peradilan internasional yang bersifat mengadililah yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

## 4) *Doktrin atau pendapat para sarjana*

Doktrin adalah ajaran-ajaran para sarjana atau ahli hukum yang dianggap sebagai sumber hukum. Doktrin berisi tentang teori-teori hukum dan peraturan-peraturan hukum sebagai hukum yang seharusnya menurut pendapat masing-masing sarjana atau ahli tersebut.

## 5) *Keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi organisasi internasional*

Setiap bentuk keputusan-keputusan yang diambil organisasi internasional yang mempunyai kekuatan mengikat para anggotanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional.

## **Arena Diskusi**

### **Sengketa Sipadan dan Ligitan**

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo. Tetapi, terjadi perbedaan pengertian status quo. Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia, sedangkan Indonesia memahami status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.

Pada tahun 1976, dibentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Tetapi, pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan.

Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional kemudian melunak. Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut.

Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada hari Selasa 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia.

*Sumber: id.wikipedia.org*

***Diskusikan bersama kelompok Anda hal-hal berikut ini!***

1. Siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam artikel di atas?
2. Penyelesaian seperti apa yang hendak dipilih pihak yang bersengketa?
3. Sudah sesuaikah langkah-langkah yang dilakukan pihak yang bersengketa?
4. Berikan penilaian Anda mengenai langkah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Sipadan Ligitan! Diskusikan bersama kelompok Anda!

## **9. Ratifikasi Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional**

Ratifikasi merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh dalam menjadikan perjanjian internasional menjadi hukum nasional, dalam suatu negara. Apabila ratifikasi telah dilakukan oleh suatu negara, maka hukum internasional tersebut dinyatakan berlaku dalam suatu negara. Negara yang telah mengikatkan diri pada suatu konvensi internasional berarti telah mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

### **a. Pengertian Ratifikasi**

Ratifikasi berasal dari bahasa latin *ratificare* yang artinya pengesahan (confirmation) atau persetujuan (approval). Secara gramatikal dalam kamus Bahasa Indonesia, ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional ke dalam hukum nasional suatu negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan penyetujuan (*approval*).

Secara teori, ratifikasi adalah persetujuan kepada negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya. Ratifikasi menjadi sarana atau alat penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuan negara tersebut untuk terikat pada diketahui bahwa ratifikasi erat kaitannya dengan perkembangan sistem konstitusi pemerintahan yang berkuasa. Lembaga yang diberi kekuasaan meratifikasi adalah kepala negara beserta parlemen.



Sumber: untreaty.un.org

Gambar 5.7 Secara teori, ratifikasi adalah persetujuan kepada negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya.

#### b. Proses ratifikasi hukum internasional

Pentingnya proses ratifikasi bagi sebuah negara adalah memperkaya khasanah hukum nasional. Proses ratifikasi tidaklah terlalu sulit. Di masing-masing negara, prosedur ratifikasi berbeda-beda disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Dengan kata lain prosedur ratifikasi tingkat nasional diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara.

Meskipun dalam praktiknya ratifikasi diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara, tetapi prosesnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Konvensi Wina tahun 1969 yang menentukan bahwa:

*“Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dengan ratifikasi, dengan syarat:*

- 1) *perjanjian internasional yang akan diratifikasi menentukan demikian secara tegas,*
- 2) *negara yang mengadakan perjanjian menyetujui bahwa ratifikasi adalah perlu,*
- 3) *perjanjian internasional yang telah ditandatangani akan berlaku hanya kalau sudah diratifikasi,*
- 4) *kemauan negara untuk menandatangani perjanjian internasional dengan syarat akan berlaku kalau sudah diratifikasi atau dinyatakan demikian selama negoisasi”.*

Selanjutnya setelah mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 Konvensi Wina, dalam praktiknya ratifikasi dihadapkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) negara berhak untuk mempunyai kesempatan guna meneliti kembali dan meninjau kembali instrumen yang telah ditandatangani oleh utusannya, sebelum negara menjalankan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam instrumen,
- 2) berdasarkan kedaulatannya suatu negara berhak untuk menarik diri dari partisipasi dalam suatu perjanjian internasional, apabila negara yang bersangkutan menghendaki demikian,

- 3) sering suatu perjanjian internasional mengundang dilakukannya suatu amandemen atau penyesuaian dalam hukum nasional,
- 4) karena prinsip demokrasi bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan pendapat umum yang ada dalam parlemen atau tempat lain, mengenai ada tidaknya keharusan untuk mengonfirmasi suatu perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan tidak ada kewajiban untuk melakukan ratifikasi bagi negara. Kekuasaan menolak atau menerima ratifikasi dianggap merupakan hal yang sama dengan kedaulatan negara, oleh karenanya menurut hukum internasional tidak ada suatu paksaan bagi sebuah negara untuk melakukan ratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional.

Selanjutnya suatu ratifikasi dapat mengikat dan memaksa negara apabila dilakukan proses:

- 1) pertukaran atau penyimpanan instrumen ratifikasi,
- 2) pemberitahuan mengenai instrumen ratifikasi kepada negara lain atau kepada negara-negara yang bersangkutan,
- 3) penyimpangan perjanjian internasional.

Apabila ratifikasi telah melalui tiga proses di atas, maka proses penerimaan atau persetujuan hukum internasional ke dalam hukum nasional untuk selanjutnya disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di negara penerima. Bila terjadi persetujuan, ratifikasi memasuki tahap akhir yaitu proses penandatanganan oleh kepala negara dan parlemen negara yang bersangkutan.

### *c. Ratifikasi di Indonesia*

Ratifikasi di Indonesia dilakukan berdasar ketentuan sistem konstitusional yang berlaku di negara kita dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Lebih lanjut tentang ketentuan ratifikasi yang dianut di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab III tentang Pembuatan Dan Pengesahan Perjanjian Internasional Pasal 13 sampai 15 yaitu:

- 1) Pasal 13 : Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut kepada Menteri.
- 2) Pasal 14 : Pejabat lembaga pemerintahan, baik departemen maupun non-departemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari menteri.
- 3) Pasal 15 : Ketentuan mengenai pembatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Selain berlandaskan ketentuan undang-undang, proses ratifikasi di Indonesia dilakukan dengan memandang politik luar negeri Indonesia. Pemerintah selalu mengedepankan sistem bebas aktif dengan prinsip dasar ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Info Khusus

Menurut Sam Suhaidi pada pokoknya prosedur ratifikasi ini mencakup dua aspek, yaitu:

1. Tindakan legislatif, yaitu umumnya dengan jalan undang-undang sehingga dengan diundangkannya perjanjian itu, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat negara dipandang dari segi hukum nasional.
2. Tindakan eksekutif, yaitu sesudah perjanjian ditandatangani oleh kekuasaan eksekutif, kemudian perjanjian disampaikan kepada badan legislatif untuk memperoleh persetujuannya, yang umumnya berupa undang-undang. Selanjutnya oleh badan eksekutif dibuatlah piagam ratifikasi, dan prosedur ini baru selesai sesudah diadakan pertukaran piagam ratifikasi.

*Sumber: jurnal.bl.ac.id.pdf*

## Arena Diskusi

### Hati-hati Ratifikasi Hukum Internasional

JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk berhati-hati meratifikasi konvensi hukum internasional ke dalam hukum nasional, karena bila tidak, bisa jadi bumerang bagi kepentingan nasional.

“Kalau tidak hati-hati, justru akhirnya merugikan kepentingan nasional,” tegas pakar hukum internasional Prof. Dr. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia (UI).

Selain Hikmahanto, hadir sebagai pembicara Prof Sunaryati, Sekjen Komisi Hukum Nasional Prof Mardjono Reksodiputro dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu Arif Havas Oegroseno.

Hikmahanto mencontohkan, dalam ratifikasi hukum internasional yang ditandatangani Indonesia mengenai larangan subsidi bagi produk pertanian, ternyata hasilnya sangat merugikan para petani Indonesia karena hampir 60% petani Indonesia masih miskin.

“Sementara secara diam-diam pemerintah AS masih memberikan subsidi bagi petani jagung mereka. Karena itu pemerintah harus hati-hati, tapi jangan takut terhadap hukum internasional,” katanya memperingatkan.

Hikmahanto menyarankan, sebelum suatu hukum internasional diratifikasi, harus dilihat bagaimana penegakan hukum dan dana yang akan disiapkan oleh pemerintah. Misalnya, Hikmahanto menambahkan, jika Indonesia meratifikasi ICCPR (hukum internasional tentang pengungsi) maka harus menyiapkan dana meskipun pengungsinya ada di Malaysia atau Australia. “Rakyat sendiri banyak yang miskin kok malah bantu warga negara lain,” kata Hikmahanto.

Sunaryati menambahkan, jatuhnya ekonomi AS yang menyeret krisis keuangan global, termasuk Indonesia merupakan dampak dari ratifikasi pemerintah dengan World Trade Organization (WTO). Begitu pula dengan hancurnya pasar modal AS yang mengimbas pasar modal dunia. Apakah pemerintah AS bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan.

“Belum lagi soal HAM, kita banyak meratifikasi tentang HAM. Kita banyak diserang dunia internasional, mereka tidak melihat latar belakang saat itu,” katanya seraya menyatakan keheranannya, kenapa pemerintah terkesan mudah meratifikasi hukum internasional

*Sumber: www.detikriau.com*

***Diskusikan bersama kelompok Anda!***

- 1. Bagaimana pendapat Anda menanggapi pendapat Prof. Dr. Hikmahanto Juwana pada artikel di atas?***
- 2. Apa akibat yang dapat terjadi apabila pemerintah tidak meratifikasi hukum internasional tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional?***

## **B Sistem Peradilan Internasional**

Sistem peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen dalam lembaga peradilan internasional adalah:

### **1. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)**

Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan dunia yang berkedudukan di Den Haag. Lembaga ini berperan untuk mencegah terjadinya pertikaian antarnegara. Mahkamah Internasional merupakan kelanjutan dari Mahkamah Tetap Peradilan Internasional yang dibentuk berdasarkan Pasal XIV Covenant Liga Bangsa-Bangsa. Pembentukan Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBB. Maka dari itu, semua anggota PBB merupakan anggota Statuta Mahkamah Internasional.

#### **a. Struktur hakim**

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Pemilihan hakim didasarkan pada Pasal 4 Statuta Mahkamah Internasional.

Nama-nama calon hakim Mahkamah Internasional diusulkan oleh kelompok-kelompok negara yang khusus ditugaskan untuk itu. Calon-calun hakim tersebut harus memiliki moral yang tinggi (*high moral characteristic*). Calon hakim tersebut juga harus memiliki persyaratan-persyaratan di negaranya untuk menduduki kepangkatan hakim tertinggi. Dia juga harus diakui kompetensinya dalam hukum internasional.



Statuta Mahkamah mensyaratkan bahwa pemilihan hakim tanpa memandang kebangsaan (nasionalitasnya). Namun, dalam pelaksanaan faktor kebangsaan sangat dominan karena pengangkatannya ditentukan oleh faktor geografis.

Dalam praktiknya hakim Mahkamah Internasional menganut pembagian sebagai berikut:

- 1) 5 orang dari negara-negara Barat,
- 2) 3 orang dari negara-negara Afrika,
- 3) 3 orang dari negara-negara Asia,
- 4) 2 orang dari negara-negara Eropa Timur,
- 5) 2 orang dari negara-negara Amerika Latin.

Dalam praktek yang tidak tertulis 5 orang hakim berasal dari negara-negara anggota tetap DK PBB menjadi anggota dari Mahkamah Internasional. Hakim Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu 9 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

Seorang hakim yang berasal dari negara tertentu tidak perlu mengundurkan diri apabila negaranya terlibat sengketa dan dia sendiri yang mengadilinya. Dalam perkembangannya apabila suatu negara terlibat sengketa dan komposisi hakim tidak ada hakim dari negara yang bersangkutan maka negara tersebut dapat meminta dipilih hakim ad-hoc. Hakim ad-hoc ini dipilih diluar dari 15 orang hakim Mahkamah. Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketanya dapat memeriksa dengan seluruh anggotanya atau cukup beberapa hakim anggota yang disebut *chamber*.



Sumber: weblog.leidenuniv.nl

Gambar 5.8 Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan dunia yang berkedudukan di Den Haag.

#### b. Yurisdiksi atau kewenangan

Mahkamah Internasional memiliki wewenang untuk mengadili semua sengketa yang diserahkan para pihak dalam semua persoalan yang ditetapkan oleh Piagam PBB, perjanjian internasional, atau konvensi internasional yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 1 Piagam PBB tentang Yurisdiksi Mahkamah Internasional. Yurisdiksi Mahkamah Internasional lahir berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian khusus (*special agreement*), di mana dalam klausulnya para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketanya ke Mahkamah Internasional.

Menurut Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional, kewenangan mengadili dari Mahkamah Internasional hanya berlaku untuk negara saja. Ada 3 prinsip yang berlaku sehubungan dengan Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional ini, yaitu:

- 1) Semua negara anggota PBB *ipso facto* (dalam kenyataannya) adalah anggota/peserta dari Mahkamah Internasional.
- 2) Suatu negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi peserta pada statuta Mahkamah apabila negara tersebut bersedia:
  - a) Menerima isi ketentuan Statuta Mahkamah Internasional.
  - b) Menerima dan melaksanakan putusan Mahkamah Internasional.
  - c) Bersedia memberikan sumbangan keuangan untuk menutup ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.
- 3) Penyerahan suatu sengketa kepada Mahkamah Internasional didasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

## Aktivitas Mandiri

*Terciptanya keadilan bagi masyarakat internasional, mendapat payung hukum dengan adanya lembaga-lembaga peradilan internasional. Menurut pendapat Anda, perlukah semua permasalahan internasional diselesaikan melalui lembaga peradilan internasional? Jelaskan pendapat Anda! Berikan contoh permasalahan internasional yang dapat diselesaikan tanpa melalui lembaga peradilan internasional!*

### 2. Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court)

Perserikatan Bangsa-bangsa membentuk sebuah lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Kejahatan Internasional. Pembentukan lembaga ini disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998.

#### a. Struktur hakim

Mahkamah Kejahatan Internasional terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua per tiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Paling tidak separuh dari para hakim tersebut memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan acara pidana. Sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum internasional, misalnya saja hukum humaniter internasional, dan hukum HAM internasional.

Dalam memilih para hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya representasi berdasarkan prinsip-prinsip sistem legal di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan jender. Para hakim akan disebar dalam tiga bagian yaitu praperadilan, peradilan, dan peradilan banding.

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali. Orang-orang ini haruslah memiliki pengalaman praktik yang luas dalam penuntutan atau penyidikan kasus-kasus pidana. Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari negara pihak atau Dewan Keamanan PBB, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (*proprio motu*).

#### b. Yurisdiksi atau kewenangan hukum

Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Kejahatan Internasional ini adalah di bidang hukum pidana internasional. Lembaga ini mengadili individu pelanggar hak asasi manusia internasional yang berupa kejahatan perang, genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan), dan kejahatan agresif.

### Info Khusus

Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, *Raphael Lemkin*, pada tahun 1944 dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe* yang diterbitkan di Amerika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa Yunani *genos* yang berarti ras, bangsa, atau rakyat.

Sumber: [one.indoskripsi.com](http://one.indoskripsi.com)

### 3. Panel Khusus dan Panel Spesial Pidana Internasional

Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka yang melakukan kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau hanya untuk sementara. Kedua panel peradilan internasional ini dibubarkan setelah menyelesaikan peradilan.

#### a. *Struktur hakim*

Perbedaan antara Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional ini terletak pada komposisi penuntut dan hakim *ad hoc*-nya. Panel Khusus Pidana Internasional komposisi penuntut dan hakim *ad hoc*-nya sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional. Sedangkan pada Panel Spesial Pidana Internasional komposisi penuntut dan hakim *ad hoc*-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional.

#### b. *Yurisdiksi atau kewenangan*

Yurisdiksi atau kewenangan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional menyangkut tindakan kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi Statuta Roma atau belum. Hal ini berbeda dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang didasarkan pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

## Arena Diskusi

### **Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia**

Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia adalah sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad-hoc yang merdeka dan terletak di Den Haag, Belanda.

Badan ini didirikan oleh Resolusi 827 dari Dewan Keamanan PBB, yang diluncurkan pada tanggal 25 Mei 1993. Badan ini memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia semenjak 1991, pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, serta pelanggaran undang-undang perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Badan ini hanya bisa mengadili orang secara pribadi dan bukan organisasi atau pemerintahan. Hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup. Beberapa negara telah menandatangani perjanjian dengan PBB mengenai pelaksanaan hukuman ini. Vonis terakhir dijatuhkan pada 15 Maret 2004. Badan ini memiliki tujuan untuk mengakhiri semua sidang pada akhir 2008 dan semua kasus banding pada 2010.

#### ***Diskusikan bersama kelompok Anda!***

- 1. Apa manfaat adanya lembaga tersebut bagi jaminan keadilan internasional?***
- 2. Perlukah lembaga sejenis didirikan di negara lain yang mengalami konflik serupa?***



## Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian oleh Mahkamah Internasional

Dalam pelaksanaan hubungan internasional, dapat terjadi perselisihan atau konflik, dalam tingkat kecil sampai tingkat serius. Apabila sengketa internasional dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mengancam perdamaian dunia. Sengketa internasional mencakup negara dengan negara, negara dengan individu, dan negara dengan subjek hukum lainnya.



*Sumber: wordpress.com*

Gambar 5.9 Perang merupakan salah satu bentuk sengketa antarnegara.

### 1. Sebab-sebab Sengketa Internasional

Ada beberapa sebab terjadinya sengketa internasional, antara lain:

#### a. Politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku

Politik luar negeri suatu bangsa menjadi salah satu penyebab kemungkinan timbulnya sengketa antarnegara. Sikap tersinggung atau salah paham merupakan pemicu utama terjadinya konflik. Salah satu contohnya adalah sikap Inggris yang terlalu luwes (fleksibel) dalam masalah pengakuan pemerintahan Cina. Pada akhirnya mengakibatkan ketersinggungan pihak Amerika Serikat yang bersikap kaku terhadap Cina.

#### b. Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa

Dalam menjalin kerja sama atau berhubungan dengan bangsa lain, kesopanan antarbangsa penting untuk diperhatikan dalam etika pergaulan. Sebab jika kita menyalahi etika bisa saja timbul konflik atau ketegangan. Hal ini pernah terjadi saat Singapura mengundurkan diri dari perjanjian dengan Malaysia, meskipun hubungan baik telah lama mereka jalin.

#### c. Masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan

Negara-negara yang bertetangga secara geografis berpeluang besar terjadi konflik atau sengketa memperebutkan batas negara. Hal ini dialami antara lain oleh Indonesia-Malaysia, India-Pakistan, dan Cina-Taiwan.

#### **d. Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan**

Hukum nasional setiap negara berbeda-beda bergantung pada kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Jika suatu negara saling bekerja sama tanpa mempertimbangkan hukum nasional negara lain, bukan tidak mungkin konfrontasi bisa terjadi. Hal ini terjadi saat Malaysia secara yuridis menentang cara-cara pengalihan daerah Sabah dan Serawak dari kedaulatan Kerajaan Inggris ke bawah kedaulatan Malaysia.

#### **e. Masalah ekonomi**

Faktor ekonomi dalam praktek hubungan antara negara ternyata sering kali memicu terjadinya konflik internasional. Kebijakan ekonomi yang kaku dan memihak adalah penyebab terjadinya konflik. Hal ini dapat terlihat ketika Amerika Serikat mengembargo minyak bumi hasil dari Irak yang kemudian menjadikan konflik tegang antara Amerika Serikat dan Irak.

### **Aktivitas Mandiri**

*Banyak sebab yang memicu terjadi sengketa antarnegara. Coba Anda cari beberapa contoh peristiwa internasional yang berkaitan dengan persengketaan! Kemudian identifikasikan hal-hal berikut ini!*

- 1. Pihak yang bersengketa*
- 2. Sebab-sebab persengketaan*
- 3. Cara penyelesaian sengketa*

## **2. Macam-Macam Sengketa Internasional**

Dalam sengketa internasional, pertama-tama sengketa tersebut akan diselesaikan dengan cara damai. Kalau tidak berhasil, baru dipakai cara penyelesaian dengan kekerasan yang berupa perang atau tindakan bersenjata lain yang bukan perang. Penyelesaian damai dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Berdasarkan pembedaan cara tersebut sengketa internasional dapat dibedakan menjadi:

### **a. Sengketa justisiabel**

Sengketa justisiabel adalah sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan atas dasar hukum internasional. Sengketa justisiabel sering disebut sebagai sengketa hukum, karena sengketa tersebut timbul dari hukum internasional dan diselesaikan dengan menerapkan hukum internasional.

### **b. Sengketa nonjustisiabel**

Sengketa nonjustisiabel adalah sengketa yang bukan merupakan sasaran penyelesaian pengadilan. Sengketa nonjustisiabel sering dikenal sebagai sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijaksanaan atau urusan lain di luar hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Penyelesaian politik ini ditempuh dengan jalan diplomasi melalui keahlian diplomasi dari para diplomatnya.

## **3. Penyelesaian Sengketa Internasional**

Sengketa internasional diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur damai dan jalur kekerasan. Kedua penyelesaian tersebut dipilih bergantung pada besar dan kecilnya sengketa yang terjadi. Jalur damai dapat dilakukan melalui jalur hukum dan diplomasi.

Berikut ini diuraikan lebih lanjut berbagai penyelesaian sengketa internasional yang tersedia.

#### a. *Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum*

Penyelesaian sengketa secara jalur hukum dilakukan melalui arbitrase dan pengadilan internasional.

##### 1) *Arbitrase*

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dapat memanfaatkan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase ad hoc. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat.

Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim” atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan *compromis* (kompromi) yang memuat:

- a) persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase,
- b) metode pemilihan panel arbitrase,
- c) waktu dan tempat *hearing* dengar pendapat,
- d) batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan,
- e) prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu kesepakatan.

##### 2) *Pengadilan internasional*

Pengadilan internasional telah dikenal sejak Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa itu disebut *Permanent Court of International Justice*. Setelah Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan, tugas dari *Permanent Court of International Justice* dilaksanakan oleh *International Court of Justice*. Lembaga baru ini merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Beberapa pengadilan internasional dan pengadilan internasional regional untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa internasional antara lain *International Court of Justice*, *International Criminal Court*, *International Tribunal on the Law of the Sea*, dan *European Court for Human Rights*.

### **Potret Nusantara**

#### **Pemerintah Harus Tegas dengan Malaysia Soal Perbatasan**

*Rabu, 18 Agustus 2010 - 08:14 wib*

*Anton Suhartono, - Okezone*

**JAKARTA** - Pemerintah Indonesia didesak segera menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Malaysia dan negara lainnya, sehingga insiden seperti penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pekan lalu, tidak terulang kembali.

Insiden ini bukan kali pertama terjadi, dan tidak hanya melibatkan Malaysia, namun juga dengan Vietnam dan Filipina.



Anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid menyatakan diperlukan diplomasi yang kuat dari Kementerian Luar Negeri kepada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang selalu saja terjadi.

“Sejauh ini Indonesia baru merampungkan UU perbatasan dengan Singapura. Dibutuhkan diplomasi yang kuat dari Pemerintah dalam hal ini Kemenlu untuk segera menyelesaikan masalah ini,” tutur mantan Ketua MPR ini saat berbicara dengan okezone, Rabu (18/8/2010).

Hidayat menambahkan dalam pertemuan dengan anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara, pihaknya selalu menyampaikan dan mengingatkan agar negara bersangkutan beritikad baik untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Namun, tandas politisi dari Fraksi PKS ini, upaya dari pemerintah lebih harus ditonjolkan karena masalah ini sebenarnya menjadi domain pemerintah.

“Dalam pertemuan parlememen Asia Tenggara, kami selalu sampaikan pentingnya menyelesaikan berbagai hal, termasuk soal perbatasan. Apabila perlu mereka juga harus mendorong merampungkan UU tersebut, sehingga hubungan antara negara-negara Asia Tenggara, tetap harmonis,” sambung Hidayat. ton)

.....  
.....

*Sumber: okezone.com*

Makna yang dapat kita hayati dari artikel di atas yaitu:

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi darat, laut, dan udara. Semuanya warga negara bertanggung jawab menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah NKRI. Tidak ada satu bangsa pun di dunia yang berhak atas kedaulatan Indonesia. Pondasi utama untuk menjaga kesatuan NKRI adalah persatuan.

#### **b. Penyelesaian melalui jalur diplomasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, maupun penyelidikan.

##### **1) Negosiasi**

Negosiasi menjadi cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Negosiasi dilakukan tanpa campur tangan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.



Keuntungan dari pelaksanaan negosiasi antara lain:

- a) para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka,
- b) para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya,
- c) dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri,
- d) para pihak mencari penyelesaian yang bersifat menyeluruh sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.

## 2) *Mediasi*

Mediasi dilakukan apabila negosiasi gagal menemui kata sepakat. Pada proses mediasi, pihak bersengketa melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti:

- a) pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang,
- b) pihak ketiga menyediakan jalur komunikasi tambahan.

Dalam menjalankan tugasnya, pihak ketiga sebagai mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada.

## 3) *Good offices (jasa baik)*

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teknis maupun politis.

### a) *Jasa teknis*

Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan jasa teknis adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus.

### b) *Jasa politis*

Jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

## 4) *Konsiliasi*

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat *ad hoc*, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

#### 5) *Penyelidikan*

Penyelesaian sengketa dengan penyelidikan telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya *The Hague Convention* pada tahun 1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907. Cara penyelidikan ditempuh untuk kasus yang terjadi karena ketidaksepahaman atas suatu fakta.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Dalam beberapa kasus, badan penyelidik yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Dalam hal ini, badan penyelidikan yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa.



Sumber: wordpress.com

Gambar 5.10 Banyak jalur diplomasi yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa antarnegara.

#### c. *Penyelesaian sengketa dengan kekerasan*

Penyelesaian sengketa dengan kekerasan, ditempuh apabila cara damai sudah tidak bisa digunakan lagi. Penyelesaian sengketa dengan kekerasan dapat berupa perang, tindakan bersenjata bukan perang, retorsi, raprisal, blokade, embargo, dan intervensi

##### 1) *Perang*

Perang adalah penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan senjata dengan tujuan untuk mengalahkan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak ada alternatif lain kecuali memenuhi syarat-syarat penyelesaian yang diajukan oleh pihak pemenang. Dengan berakhirnya perang, berarti sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan telah selesai.

## 2) *Retorsi*

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang terlebih dahulu melakukan tindakan tidak bersahabat. Retorsi juga diartikan sebagai tindakan pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain

## 3) *Reprisal*

Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. Reprisal merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain

Syarat-syarat reprisal antara lain:

- a) sasarannya ditujukan kepada negara yang senantiasa melakukan pelanggaran,
- b) negara sasaran dituntut terlebih dahulu untuk memenuhi ganti rugi,
- c) tindakan reprisal harus proporsional dan tidak boleh berpihak.

## 4) *Blokade*

Blokade adalah mengepung wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu. Ada dua macam blokade, yaitu blokade masa damai dan blokade masa perang. Pada blokade masa damai, negara yang memblokade tidak berhak menangkap kapal negara ketiga yang melanggar blokade. Sedangkan blokade masa perang, negara yang memblokade berhak memeriksa kapal negara netral atau negara ketiga yang melanggar blokade.

## 5) *Embargo*

Embargo merupakan suatu prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi. Embargo dipergunakan sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap negara yang senantiasa melanggar hukum internasional. Biasanya embargo dilakukan dengan melarang ekspor ke negara yang dikenai embargo.

## 4. Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Dalam hubungan antarnegara, satu-satunya cara penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan adalah dengan mengajukan masalah sengketa ke Mahkamah Internasional. Namun dalam praktiknya, anggota masyarakat internasional jarang menempuh proses pengadilan. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab, antara lain:

- a. proses di Mahkamah Internasional hanya ditempuh sebagai jalan terakhir, yakni apabila semua jalan lain mengalami kemacetan,
- b. proses pengadilan di Mahkamah Internasional biasanya memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal,
- c. proses pengadilan di Mahkamah Internasional hanya diperuntukkan bagi kasus sengketa internasional yang besar,
- d. Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi wajib.

Pengaturan mengenai seluk beluk Mahkamah Internasional tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional maupun dalam Piagam PBB. Berkaitan dengan hal tersebut, ditegaskan dalam statuta bahwa Mahkamah Internasional mempunyai peranan sebagai berikut:

**a. Melaksanakan “Contentious Jurisdiction” yaitu yurisdiksi atas perkara biasa**

Mahkamah Internasional mempunyai yurisdiksi “contentious” atas dasar persetujuan para pihak yang bersengketa, yang disampaikan dengan pemberitahuan tentang persetujuan khusus kedua belah pihak. Pengajuan perkara biasa ke Mahkamah Internasional bisa diajukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak yang bersengketa saja.

Keputusan Mahkamah Internasional adalah final tanpa banding dan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja. Keputusan diambil atas dasar suara mayoritas. Pihak yang berperkara di depan Mahkamah Internasional hanya negara. Akan tetapi semua macam perkara/sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

**b. Memberikan “advisory opinion” yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasihat**

Advisory opinion adalah keputusan Mahkamah Internasional, yang berupa pendapat mahkamah mengenai masalah hukum suatu sengketa. Pendapat ini bersifat nasihat. Advisory opinion tidak mengikat meski bagi yang meminta. Namun biasanya mempunyai kuasa persuasif kuat.

Pihak-pihak yang dapat dimintakan advisory opinion, adalah:

- 1) sengketa antarnegara yang sedang ditangani badan/organ PBB,
  - 2) sengketa yang terjadi dalam badan/organ PBB atau organisasi internasional lain.
- Sedangkan advisory opinion biasanya diperoleh melalui pihak-pihak di bawah ini:
- 1) Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB
  - 2) Badan/organ PBB selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan atau organisasi internasional, selain PBB dengan kuasa dari Majelis Umum PBB.



Sumber: [www.york.ac.uk](http://www.york.ac.uk)

Gambar 5.11 Majelis Umum PBB merupakan salah satu pihak yang dapat memberikan advisory opinion.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para ahli hukum sudah mencapai kata sepakat tentang eksistensi Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Lembaga ini menjadi tempat pengajuan perkara secara hukum. Meskipun nantinya keputusan Mahkamah Internasional hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi kekuatan hukumnya sah menurut hukum internasional.

Berikut ini diuraikan beberapa contoh keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional yang diajukan:

- 1) Keputusan Mahkamah Internasional tahun 1951 yang terkenal dengan nama Anglo-Norwegian Fisheries Case yang menyelesaikan konflik/sengketa perbatasan antara Norwegia dengan Inggris.

- 2) Advisory Opinion Mahkamah Internasional pada tahun 1949 dalam Injuries Case atau Reparation Case yang mengukuhkan posisi PBB sebagai subjek hukum internasional.
- 3) Keputusan Badan Peradilan Internasional dalam menyelesaikan kasus nasionalisasi milik Belanda di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

## Info Khusus

### **Sengketa Perbatasan**

Beberapa persoalan perbatasan yang cukup mengusik harmonisasi antarnegara di kawasan Asia Pasifik antara lain:

1. Sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan laut Sulawesi menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, dan garis perbatasan di pulau Kalimantan (salah satunya mengenai blok Ambalat);
2. Perbedaan pendapat dan kepentingan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste di perairan Celah Timor;
3. Konflik historis antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah Malaysia Timur;
4. Konflik antara Malaysia dan Singapura tentang pemilikan Pulau Batu Putih (Pedra Branca) di Selat Johor;
5. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak Malaysia Timur serta batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif;
6. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Vietnam mengenai batas wilayah di perairan lepas pantai dari masing-masing negara;
7. Konflik berlarut antara Myanmar dan Bangladesh di wilayah perbatasan;
8. Ketegangan antara Myanmar dan Cina mengenai batas wilayah kedua negara;
9. Sengketa Myanmar dan Thailand, mengenai perbatasan ke dua negara;
10. Konflik antara Vietnam dan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara;
11. Sengketa antara Cina dan Vietnam tentang pemilikan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Paracel;
12. Konflik laten antara Cina di satu pihak dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam di lain pihak sehubungan klaim cina atas seluruh perairan Laut Cina Selatan;
13. Konflik intensitas rendah (Low intensity) antara Cina dengan Filipina, Vietnam dan Taiwan mengenai status pemilikan wilayah perairan Kepulauan Spratly;
14. Konflik antara Cina dengan Jepang mengenai pemilikan Kepulauan Senaku (Diaoyutai);
15. Sengketa antara Cina dengan Korea Selatan mengenai pemilikan Liancourt Rocks (Take-shima atau Tak do) dibagian selatan laut Jepang;
16. Konflik antara Cina dengan Korea Selatan mengenai batas wilayah perairan teritorial;

17. Sengketa berlarut antara Rusia dengan Jepang mengenai status pemilikan Kepulauan Kuril Selatan;
18. Sengketa India dan Pakistan mengenai status wilayah Kashmir.

*Sumber: [www.mail-archive.com](http://www.mail-archive.com)*

## 5. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional merupakan Mahkamah pengadilan yang tertinggi di seluruh dunia. Semua anggota PBB adalah peserta Piagam Mahkamah Internasional, sedang negara-negara bukan anggota PBB juga menjadi peserta piagam Mahkamah Internasional menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Negara-negara yang menyetujui Mahkamah Internasional setiap waktu dapat menyatakan bahwa mereka tunduk kepada keputusan-keputusan Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (berupa traktat atau kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat dimintakan banding. Di samping pengadilan di Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional mengusahakan prosedur arbitrase sebagai upaya perselisihan hukum melalui jalur pengadilan.

Berikut ini akan diuraikan prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional yang dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian melalui arbitrase internasional dan pengadilan internasional.

### a. Arbitrase internasional

Penyelesaian sengketa Internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Hal-hal yang penting dalam arbitrase ialah:

- 1) perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase,
- 2) sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum.

Arbitrase memiliki prosedur khusus berupa konsensus atau persetujuan para pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan sebuah kompromi yang memuat:

- 1) persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase,
- 2) metode pemilihan panel arbitrase,
- 3) waktu dan tempat pendengaran pendapat,
- 4) batas fakta-fakta yang harus dipertimbangkan,
- 5) prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu keputusan.

Selanjutnya proses arbitrase dilakukan melalui prosedur khusus sebagai berikut:

- 1) Pertama : masing-masing pihak sengketa menunjuk dua arbitrator, dan hanya satu yang boleh dari negara yang bersangkutan atau yang boleh dipilih di antara orang-orang yang diajukan oleh negara yang bersangkutan.

- 2) Kedua : kemudian para arbitrator ini memilih seorang wasit yang hanya akan bertindak sebagai ketua pengadilan.
- 3) Ketiga : dari anggota yang hadir diambil suara mayoritas/terbanyak sebagai hasil keputusannya, dan jika keputusan berdasar mayoritas telah tercapai maka proses arbitrase dengan sendirinya telah selesai.

Berikut ini beberapa arbitrase internasional yang seringkali dipercaya masyarakat internasional sebagai prosedur penyelesaian sengketa internasional Mahkamah Internasional, antara lain:

- 1) Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) atau Pengadilan Arbitrase kamar Dagang Internasional yang didirikan di Paris tahun 1919.
- 2) International Centre for Settlement of Investmen Disputes (ICSID) atau Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional yang berkedudukan di Washington DC.
- 3) Regional Centre for Commercial Arbitration atau Pusat Arbitrase Dagang Regional di Kuala Lumpur yang didirikan tahun 1978 untuk wilayah Asia.

#### **b. Pengadilan internasional**

Tahun 1945 merupakan tahun berakhirnya Perang Dunia II. Puing dan bangkai-bangkai di kota dan kamp-kamp konsentrasi di Eropa sudah dibersihkan. Dunia terhenyak dengan kekejaman yang terjadi selama masa perang. Perang telah menghilangkan rasa perikemanusiaan. Jumlah korban jiwa Perang Dunia II yaitu:

No.	Daerah	Jumlah
1.	Kamar gas di Duchau dan Aauschwitz	16 juta orang
2.	Front Rusia	12 juta orang
3.	Asia	24 juta orang
4.	Eropa	14 juta orang
<b>Total</b>		<b>66 juta orang</b>

Banyaknya korban yang berjatuh, membuat mata dunia terbuka akan perlunya sebuah perdamaian dunia. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya sengketa, konflik, dan, perang lahirlah Mahkamah Pidana Internasional atau Pengadilan Tertinggi Internasional. Lembaga ini disahkan pada 17 Juli 2002. Pengadilan Internasional memastikan bahwa konflik dan sengketa bisa dikurangi dan para penjahat perang internasional tidak lepas dari jeratan hukum.

Secara umum, prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan tidak jauh berbeda seperti dalam pengadilan nasional masing-masing negara, yaitu:

- 1) Pertama, pihak-pihak yang bersengketa setelah mengalami jalan buntu dalam usaha damai, maka pihak-pihak yang bersengketa bisa mengajukan masalah ke Pengadilan Internasional dengan catatan atas persetujuan pihak lainnya.
- 2) Kedua, pihak-pihak yang berperkar bisa menunjuk negara lain sebagai pembela atau penasehat yang kemudian dipertemukan dengan pihak lain yang bersengketa.
- 3) Ketiga, putusan diambil dengan mempertimbangkan sumber-sumber hukum nasional yang digunakan yaitu berupa perjanjian-perjanjian internasional dan traktat-traktat yang relevan dengan masalah sengketa.



## Arena Diskusi

Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasifik menghadapi masalah perbatasan. Anggapan bahwa situasi regional dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun di balik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka. Faktor-faktor yang dapat menyulut persengketaan antarnegara antara lain:

1. Ketidaktepahaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan).
2. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawasan ini, maupun dari luar kawasan.
3. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.

Berdasarkan kondisi di atas, diskusikan hal-hal berikut ini bersama kelompok Anda!

1. Upaya apa yang perlu dilakukan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk mencegah timbulnya konflik terbuka?
2. Sikap apa yang perlu dikembangkan masing-masing negara untuk menghindari konflik?
3. Perlukah setiap negara memperkuat kekuatan angkatan bersenjata untuk mengamankan wilayah perbatasan masing-masing?
4. Bentuk kerja sama apa yang dapat dilakukan antarnegara di kawasan Asia Pasifik?

## 6. Mendukung Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Mahkamah Internasional merupakan lembaga internasional yang bertugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Dalam menyelesaikan perselisihan, Mahkamah Internasional akan memeriksa sebab akibat terjadinya perselisihan secara cermat dan teliti. Kemudian, lembaga ini membuat pertimbangan-pertimbangan yuridis, hingga akhirnya memutuskan sebagai pemecahan sengketa atau perselisihan tersebut. Pemecahan perselisihan dapat berupa penentuan siapa yang bersalah, siapa yang harus memberikan reparasi, siapa yang memiliki hak tertentu, dan siapa yang memiliki kewajiban tertentu.

Dalam Mahkamah Internasional, kesepakatan negara-negara untuk menyerahkan persengketaan mereka di tangan Mahkamah Internasional ditindaklanjuti secara hukum dan mempunyai kaidah hukum yang sifatnya adalah:

### a. Kaidah hukum yang bersifat memaksa atau imperatif

Kaidah hukum yang bersifat memaksa atau imperatif adalah kaidah hukum yang harus ditaati, artinya seseorang atau pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh menaati keputusan yang telah dijatuhkan.

### b. Kaidah hukum yang bersifat mengatur atau fakultatif

Kaidah hukum yang bersifat mengatur atau fakultatif adalah kaidah hukum yang tidak secara mutlak mengikat atau wajib ditaati, artinya tidak ada kewajiban bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk tunduk dan patuh ataupun melaksanakan keputusan yang telah dijatuhkan kepadanya.

Keputusan-keputusan yang diambil Mahkamah Internasional sebagai wujud penyelesaian sengketa yang terjadi biasanya bersifat mengikat. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam perkara harus menghormati dan melaksanakan keputusan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Sikap tersebut sebagai bentuk upaya mendukung keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi.



Sumber: images.google.co.id

Gambar 5.12 Keputusan-keputusan yang diambil Mahkamah Internasional sebagai wujud penyelesaian sengketa yang terjadi biasanya bersifat mengikat.

Untuk lebih jelasnya berikut ini digambarkan beberapa sikap yang menunjukkan mendukung terhadap keputusan Mahkamah Internasional, yaitu:

- beritikad baik dengan penuh tanggung jawab menerima keputusan yang diambil,
- melaksanakan dengan penuh tanggung jawab baik secara moral atau pun kepada Tuhan,
- apabila tidak setuju, maka berusaha mencari penyelesaian damai lainnya seperti naik banding,
- bagi para saksi wajib menghormati dan menghargai keputusan yang telah diambil.
- mengupayakan sanksi yang adil bagi siapa saja yang melanggar keputusan yang telah dijatuhkan.

Berbagai sikap di atas menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Internasional mempunyai kekuatan yurisdiksi yang mengikat. Setiap keputusan diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang berlaku dan diakui secara internasional. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan akhir dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Semua pihak yang terlibat dalam keputusan Mahkamah Internasional harus mendukung dan merespon dengan baik keputusan yang telah ditetapkan.

### Info Khusus

Sengketa mengenai garis batas antara Indonesia dengan Malaysia ternyata bukan hanya di perairan Ambalat. Ada tiga persoalan garis batas lainnya yang masih dirundingkan dalam satu paket dengan sengketa Ambalat, yaitu:

- Pertama di Selat Malaka dan Natuna mengenai garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

2. Garis batas ZEE di Laut Cina Selatan
3. Garis batas di ujung Singapura.

Perundingan ini satu paket dengan perundingan penentuan garis batas landas kontinen dan ZEE di Laut Sulawesi (Ambalat). Permasalahan antara Indonesia dan Malaysia berangkat dari klaim Malaysia atas wilayah perbatasan berdasarkan peta tahun 1979. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia prinsipnya adalah sengketa mengenai landas kontinen di permukaan bawah laut, di mana negara pantai berhak untuk mengelola dan mengambil sumber-sumber bawah laut di landas kontinen tersebut.

Berdasarkan konvensi hukum laut tahun 1982, garis batas laut hanya mungkin ditentukan melalui perundingan dengan kesepakatan. Saat ini, Indonesia dan Malaysia sudah memasuki perundingan ke-13 soal penyelesaian Ambalat dan tiga persoalan garis batas lainnya.

*Sumber: disarikan dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)*

## Refleksi

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara. Namun dalam perkembangan, pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional tercipta untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam hukum internasional. Pelaksanaannya pun dijamin dengan adanya lembaga-lembaga peradilan internasional.

Bagaimana agar hukum internasional benar-benar mampu menciptakan perdamaian dunia? Bagaimana pula perilaku setiap negara dalam menyikapi putusan-putusan lembaga peradilan internasional? Sikap apa yang perlu dikembangkan setiap negara untuk menciptakan perdamaian dunia?

## Rangkuman

- Hukum internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
- Hukum internasional modern lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat internasional yang berdasarkan atas negara-negara nasional.
- Tokoh yang dianggap sebagai peletak dasar teori hukum internasional adalah Hugo Grotius, Francisco Vittoria, Francisco Suarez, serta Balthazer Ayala dan Alberico Gentilis.

- Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, atau hukum antarnegara.
- Definisi atau batasan hukum internasional bukan sesuatu yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Dasar-dasar berlakunya hukum internasional dapat dilihat dari teori hukum alam, positivisme, aliran mazhab Wina, dan aliran mazhab Prancis.
- Subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.
- Subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, wilayah-wilayah perwalian, kaum beligerensi, dan individu-individu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, dan perusahaan multinasional..
- Asas-asas hukum internasional meliputi asas teritorial, kebangsaan, dan kepentingan umum.
- Dalam merumuskan sumber-sumber hukum internasional, harus dikaji terlebih dahulu mengenai pengertian sumber-sumber hukum dalam arti material dan dalam arti formal.
- Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional ke dalam hukum nasional suatu negara.
- Sistem peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional.
- Sengketa internasional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sengketa justisiabel dan sengketa nonjustisiabel



### Pilihan Ganda

**I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!**

1. Hukum internasional mulai mencapai titik permulaan sebagai sebuah hukum pada abad ....
  - a. X
  - b. XI
  - c. XII
  - d. XIV
  - e. XVI
2. Undang-Undang Manupada muncul pada abad ... Masehi,
  - a. II
  - b. V
  - c. X
  - d. XI
  - e. XII
3. Hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, di manapun mereka berada adalah ....
  - a. Bona fides
  - b. Ius ceville
  - c. Ocupatio servitut
  - d. pacta
  - e. sunt servada
4. Berikut ini yang bukan merupakan isi perjanjian Westphalia adalah ....
  - a. meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang di Eropa
  - b. perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci
  - c. hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan
  - d. setiap negara membentuk pemerintahan berdasarkan kepentingan nasional
  - e. kemerdekaan Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia
5. Hakikat subjek hukum internasional adalah ....
  - a. pokok-pokok yang mengadakan perjanjian
  - b. orang-orang yang sudah cakap hukum
  - c. pihak-pihak yang mengalami sengketa
  - d. negara-negara yang tergabung dalam PBB
  - e. pemegang hak dan kewajiban internasional

6. Subjek hukum dalam perjanjian internasional tercantum berikut ini, kecuali ....
  - a. negara yang berdaulat
  - b. organisasi internasional
  - c. manusia pribadi
  - d. takhta suci Vatikan
  - e. traktat
7. Di bawah ini termasuk hukum internasional, *kecuali* ....
  - a. perjanjian internasional
  - b. yurisprudensi internasional
  - c. organisasi internasional
  - d. kebiasaan hukum internasional
  - e. doktrin internasional
8. Kaum beligerensi disebut juga dengan ....
  - a. pemberontak
  - b. front pembebasan
  - c. partai politik
  - d. organisasi internasional
  - e. negara-negara maju
9. Menurut Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38, sumber hukum internasional antara lain ....
  - a. formal dan naturalis
  - b. formal dan positivisme
  - c. dalam arti material dan formal
  - d. material dan naturalis
  - e. resolusi dan doktrin
10. Ajaran-ajaran para sarjana atau ahli hukum yang dianggap sebagai sumber hukum disebut ....
  - a. kebiasaan hukum
  - b. yurisprudensi
  - c. traktat
  - d. doktrin
  - e. resolusi
11. Dalam merumuskan sumber-sumber hukum internasional, harus dikaji terlebih dahulu mengenai pengertian sumber-sumber hukum dalam arti ....
  - a. material dan formal
  - b. yuridis dan akademis
  - c. pragmatis dan immaterial
  - d. substantif dan fungsional
  - e. kontens dan aplikatif
12. Salah satu asas hukum internasional adalah ....
  - a. kemanusiaan
  - b. kemerdekaan
  - c. persamaan derajat
  - d. kepentingan umum
  - e. hak dan kewajiban

13. Negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayah negaranya.  
Pernyataan di atas sesuai dengan asas ....
- konstitusi
  - territorial
  - kemerdekaan
  - kebangsaan
  - kepentingan umum
14. Hal-hal berikut ini terkait dengan Mahkamah Internasional dalam mengadili setiap permasalahan, *kecuali* ....
- kebiasaan internasional
  - perjanjian internasional
  - prinsip hukum umum
  - keputusan pengadilan dan pendapat para ahli
  - organisasi internasional
15. Subjek hukum internasional antara lain .....
- politik internasional
  - lembaga internasional
  - masalah internasional
  - organisasi internasional
  - kekuasaan
16. Konflik antarbangsa umumnya disebabkan oleh sengketa internasional atau lebih dikenal ....
- internasional disputes
  - internasional kontrol
  - internasionalisme
  - diskriminasi
  - ketertiban negara-negara tetangga
17. Mahkamah Internasional dipilih untuk jangka waktu ... tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali
- 3
  - 5
  - 9
  - 10
  - 15
18. Yurisdiksi atau kewenangan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional menyangkut tindakan kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi Statuta Roma atau belum. Hal ini berbeda dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang didasarkan pada negara-negara yang telah meratifikasi ....
- Statuta Roma
  - Perjanjian Westphalia
  - Konvensi Wina
  - Atlantic Charter
  - Magna Charta



19. Kekuatan mengikat hukum internasional bukan kehendak negara melainkan norma hukum yang merupakan dasar terakhir yang harus di patuhi oleh setiap negara  
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh penganut mazhab ....
  - a. Wina
  - b. Prancis
  - c. Positivisme
  - d. Hukum Alam
  - e. Westphalia
20. *Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya.*  
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ....
  - a. Hugo Grotius
  - b. J.G. Starke
  - c. Charles Cheney Hyde
  - d. Cornelius van Bynkershoek
  - e. Fransisco de Vittoria

## **B** Uraian

*II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!*

1. Jelaskan secara singkat sejarah hubungan internasional pada masa India Kuno!
2. Beri penjelasan yang dimaksud dengan asas teritorial dan asas kebangsaan dalam hukum internasional!
3. Bagaimana konsep hukum internasional menurut Hugo Grotius?
4. Tuliskan definisi hukum internasional menurut Charles Cheney Hyde!
5. Apa yang memengaruhi percepatan perkembangan hukum internasional pada masa lahirnya mazhab Prancis?
6. Keistimewaan apa saja yang dimiliki negara sebagai subjek hukum internasional?
7. Apa pengertian reciprositas?
8. Bila mana ratifikasi dapat mengikat dan memaksa negara?
9. Sebutkan 3 prinsip yang berlaku sehubungan dengan Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional!
10. Jelaskan yang dimaksud dengan sengketa nonjustisiabel!

## **C** Uji Kreativitas

*Buatlah permainan yang menggambarkan tentang jalannya proses pengadilan! Dalam permainan tersebut ada yang berperan sebagai terdakwa, hakim, jaksa, penuntut umum, dan saksi. Lakukanlah dengan teman sekelas Anda! (Permainan atas bimbingan guru).*

**Langkah Kegiatan:**

1. Pahami cuplikan artikel berikut ini!
2. Susunlah pendapat Anda berdasarkan hasil analisis dari tema artikel yang telah Anda pahami!

**Landasan Teori:**

1. Materi tentang Sistem Hukum dan Peradilan Internasional.
2. Referensi yang membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional.
3. Wawancara dengan narasumber.

**Bahan Kajian:****Astro akan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Internasional**

**JAKARTA--MI:** PT Astro All Asia Networks plc (ASTRO) akan mengeksekusi putusan Singapore International Arbitration Center (SIAC) atau badan arbitrase internasional terkait kewajiban membayar sebesar US\$230 juta oleh sejumlah anak perusahaan Lippo Group. “Putusan ini harus dieksekusi karena di arbitrase tidak ada banding atau kasasi. Kita akan minta permohonan eksekusi dan melakukan segala persiapan untuk permohonan,” kata kuasa hukum Astro di Indonesia Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/2).

Todung menjelaskan, badan arbitrase telah memutuskan bahwa sejumlah anak perusahaan Lippo Group termasuk First Media diharuskan membayar US\$230 juta atau sekitar Rp2,15 triliun sebagai biaya pengganti proses persidangan. Keputusan tersebut ditetapkan pada 18 Februari setelah diajukannya gugatan oleh Astro pada 2008 lalu.

Gugatan bermula dari perselisihan terkait kerja sama televisi berbayar Astro dengan Lippo Group melalui PT Direct Vision. Kerja sama ini mewajibkan Lippo menanamkan 50 persen saham mereka di Astro, namun tidak dipenuhi.

Akhirnya, keputusan pengadilan arbitrase menetapkan Direct Vision harus membayar US\$230 juta. Sementara First Media dan PT Ayunda Prima Mitra, juga anak perusahaan milik Lippo, diwajibkan membayar sejumlah US\$95 juta. “Astro yakin pengadilan Indonesia akan melakukan kewajibannya menjalankan putusan arbitrase tersebut mengingat Indonesia berada di bawah konvensi New York,” katanya.

Todung menjelaskan, eksekusi akan dilakukan di Indonesia karena pihak yang berkewajiban dan wajib melakukan pembayaran berdomisili dan melakukan tugas di Indonesia. Meskipun memilih untuk melakukan eksekusi, Todung menegaskan, pihaknya juga tidak akan mengabaikan opsi lain. “Saya tidak bisa mengatakan langkah apa yang akan diambil, tapi tentu saja kami semua berpedoman pada hukum dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Jika dalam pelaksanaanya ternyata pihak Lippo menolak melakukan pembayaran, Todung menyatakan hal tersebut akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan investor asing di Indonesia. “ Dan tidak ada alasan untuk tidak dipenuhi,” ujarnya. (DU/OL-04)

*Sumber: www.mediaindonesia.com*

**Penguatan Analisis:**

1. Buatlah forum diskusi di kelas untuk membandingkan hasil analisis Anda dengan analisis teman-teman Anda!
2. Lakukan presentasi pendapat di kelas!
3. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelas!



### Latihan Tertulis

**1. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!**

1. Di Indonesia budaya politik tradisional banyak berkembang pada suku bangsa ....
  - a. Jawa
  - b. Batak
  - c. Makasar
  - d. Minangkabau
  - e. Betawi
2. Masyarakat sebagai objek politik yang memiliki kesadaran politik rendah dan tunduk pada kebijakan penguasa terjadi pada budaya politik tipe ....
  - a. budaya politik parokial
  - b. parochial subjek kultur
  - c. budaya politik kaula
  - d. subjek partisipan kultur
  - e. budaya politik partisipan
3. *Sosialisasi politik adalah komunikasi yang dipelajari manusia dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.*  
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh ....
  - a. S.N. Eysenhardt
  - b. David F. Aberle
  - c. Gabriel Almond
  - d. Irvin L. Child
  - e. Denis Kavanagh
4. Agen politik yang termasuk dalam primary group adalah ....
  - a. pemerintah
  - b. lsm
  - c. media massa
  - d. keluarga
  - e. partai politik
5. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti ....
  - a. kekuasaan
  - b. departemen
  - c. pemerintah
  - d. pemerintahan
  - e. kelembagaan
6. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi yang dipraktikkan di Yunani Kuno adalah ....
  - a. referendum
  - b. demokrasi liberal
  - c. demokrasi langsung
  - d. demokrasi perwakilan
  - e. demokrasi tidak langsung

7. Beralihnya Orde Baru menuju Orde Reformasi ditandai oleh adanya kebebasan dalam berbagai hal, di antaranya adalah ....
- kebebasan berpolitik
  - pelaksanaan otonomi daerah
  - terselenggaranya pemilu yang demokratis
  - pembebasan narapidana dan tahanan politik
  - kemerdekaan pers dan kemerdekaan membentuk partai politik
8. *Rakyat yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.*  
Pernyataan tersebut berkaitan dengan asas ... dalam pemilu.
- langsung
  - umum
  - bebas
  - rahasia
  - jurdil
9. Suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas yang merupakan perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, dan mau menerima pendapat dari orang lain disebut ....
- keterbukaan publik
  - keterbukaan kelompok
  - keterbukaan masyarakat
  - keterbukaan individu
  - kerterbukaan pemerintah
10. *Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.*  
Pernyataan tersebut merupakan keadilan menurut ....
- Sokrates
  - Plato
  - Charles E. Merriam
  - Aristoteles
  - Kong Hu Chu
11. Seperangkat proses yang dilaksanakan dalam organisasi baik negeri maupun swasta untuk menentukan keputusan disebut ....
- pemerintahan
  - tata laksana pemerintahan yang baik
  - pemerintahan yang baik
  - prinsip-prinsip pemerintahan
  - pemerintahan dalam arti luas
12. Komponen pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab di bidang hukum, pelayanan publik, desentralisasi, dan transparansi umum adalah ....
- masyarakat
  - individu
  - swasta
  - negara
  - umum

13. Perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum yang sama disebut ....
  - a. traktat
  - b. konvensi
  - c. protokol
  - d. piagam
  - e. deklarasi
14. Berikut ini merupakan istilah-istilah yang digunakan untuk menamakan suatu perjanjian internasional, *kecuali* ....
  - a. treaty
  - b. agreement
  - c. convention
  - d. statuta
  - e. declaration
15. Kerja sama yang dilakukan antara dua negara disebut ....
  - a. kerja sama bilateral
  - b. kerja sama regional
  - c. kerja sama multilateral
  - d. kerja sama unilateral
  - e. kerja sama multinasional
16. Kerja sama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik adalah ....
  - a. ASEAN
  - b. APEC
  - c. WHO
  - d. UNICEF
  - e. NATO
17. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh anggota atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama disebut ....
  - a. kejahatan genosida
  - b. kejahatan kemanusiaan
  - c. kejahatan perang
  - d. kejahatan agresi
  - e. kejahatan HAM
18. Hakim pada Mahkamah Internasional berjumlah ....
  - a. 5
  - b. 10
  - c. 15
  - d. 20
  - e. 25
19. Sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara internasional tercantum di bawah ini, *kecuali* ....
  - a. perjanjian internasional
  - b. kebiasaan internasional
  - c. prinsip-prinsip hukum umum
  - d. keputusan pengadilan
  - e. resolusi Dewan Keamanan PBB

20. Mahkamah Kejahatan Perang Nuremberg adalah lembaga peradilan yang mengadili para penjahat perang dari ....
- a. Jerman
  - b. Yugoslavia
  - c. Rwanda
  - d. Kamboja
  - e. Jepang

**II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat!**

1. Apa yang dimaksud dengan budaya politik?
2. Jelaskan perbedaan di antara budaya politik santri, abangan, dan priyayi!
3. Jelaskan karakteristik masyarakat madani!
4. Berikan contoh perilaku demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sekolah, dan bangsa-negara!
5. Sebutkan ciri-ciri keterbukaan!
6. Apa saja akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan? Jelaskan!
7. Jelaskan tingkatan-tingkatan dalam perwakilan diplomatik!
8. Apa saja tujuan dibentuknya ASEAN? Sebutkan!
9. Jelaskan perbuatan yang adapat dikategorikan sebagai kejahatan berat internasional!
10. Jelaskan cara-cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan!



**Praktik Kewarganegaraan**

- I. *Keberadaan masyarakat internasional ditunjukkan dengan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional. Terjadinya hubungan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, seperti pembagian kebutuhan, perkembangan industri yang tidak merata di dunia, adanya perniagaan, hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olah raga mengakibatkan. Situasi tersebut mendorong timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama. Untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional inilah dibutuhkan hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.*  
Berdasarkan uraian tersebut, sikap-sikap apa saja yang perlu dikembangkan setiap bangsa agar dapat menciptakan hubungan internasional yang bermanfaat, saling menghormati, dan saling menguntungkan? Jelaskan pendapat Anda!
- II. *Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki suatu negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya. Kekuasaan itu berakhir bila mana kekuasaan suatu negara lain mulai. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. Konsep kedaulatan, kemerdekaan, dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur.*  
Menurut pendapat Anda, bagaimana usaha yang dilakukan suatu negara agar dapat melindungi kedaulatan negaranya sekaligus dapat menjalin hubungan internasional secara ideal? Sikap seperti apa yang harus dilaksanakan dan sikap seperti apa yang harus dihindari?



# Glosarium

<b>agresi</b>	: penyerangan suatu negara kepada negara lain.
<b>agresor</b>	: orang atau negara yang menyerang pihak lain.
<b>aklamasi</b>	: suara bulat, semua setuju
<b>akuntabilitas</b>	: dapat dipertanggungjawabkan
<b>blokade damai</b>	: blokade yang dilakukan pada waktu damai, untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan negara-negara.
<b>eksekutif</b>	: kekuasaan yang melaksanakan undang-undang.
<b>eksistensi</b>	: keberadaan; adanya.
<b>ekstradisi</b>	: penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara negara yang bersangkutan.
<b>embargo</b>	: penyitaan sementara terhadap kapal-kapal asing, masalah pada waktu perang dengan maksud agar kapal-kapal itu tidak meninggalkan pelabuhan.
<b>entitas</b>	: satuan yang berwujud.
<b>etnosentrisme</b>	: mengukur kebaikan berdasarkan budaya sendiri dan berpusat pada budaya bangsa sendiri.
<b>demokrasi</b>	: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
<b>desentralisasi</b>	: penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka negara kesatuan.
<b>diplomasi</b>	: urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara lain; urusan kepentingan sebuah negara dengan perantara wakil-wakilnya di negeri lain.
<b>diplomat</b>	: orang yang berkecimpung dalam bidang diplomasi (menteri luar negeri, duta besar. dan sebagainya).
<b>deklarasi</b>	: pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal; keterangan tentang suatu hal.
<b>diskriminasi</b>	: membedakan antar suku bangsa berdasarkan warna kulit, bentuk tubuh, dalam pergaulan.
<b>good government</b>	: tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
<b>governance</b>	: pemerintahan.
<b>government</b>	: pemerintah.
<b>hierarkis</b>	: urutan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas.
<b>ideologi</b>	: kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

<b>imperialisme</b>	: sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar.
<b>intervensi</b>	: campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak yang bersengketa
<b>investor</b>	: penanaman uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
<b>kaula</b>	: subjek.
<b>keadilan</b>	: menempatkan sesuatu pada tempatnya.
<b>kediktatoran</b>	: pemerintahan yang dipegang oleh seorang penguasa.
<b>klaim</b>	: tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu; pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.
<b>kolonialisme</b>	: penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.
<b>kolusi</b>	: kerja sama rahasia untuk kepentingan yang tidak terpuji.
<b>kongres</b>	: pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah
<b>konsensus</b>	: kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara.
<b>konsiliasi</b>	: metode untuk menyelesaikan sengketa internasional secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang tidak memihak.
<b>konvensi</b>	: permufakatan atau kesepakatan; perjanjian antara negara-negara dengan tujuan khusus.
<b>korupsi</b>	: penyelewengan/penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi.
<b>krisis</b>	: keadaan yang berbahaya; keadaan yang genting.
<b>legislatif</b>	: kekuasaan yang membuat undang-undang.
<b>mediasi</b>	: proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
<b>misi</b>	: keputusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan suatu tugas khusus di bidang diplomatik, politik, perdagangan, dan kesenian.
<b>mixed political</b>	: membedakan/membandingkan.
<b>negosiasi</b>	: proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain.
<b>nepotisme</b>	: kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.
<b>orientasi</b>	: peninjauan untuk menentukan sikap/arah yang tepat dan benar.
<b>otonomi daerah</b>	: kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
<b>political culture</b>	: budaya politik.

<b>politik</b>	: suatu tata cara/kegiatan yang menyangkut cara memperoleh, mengolah, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu.
<b>parlemen</b>	: badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara.
<b>partai politik</b>	: sekelompok orang yang terorganisasi berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
<b>partisipasi politik</b>	: semua aktivitas yang sah oleh semua warga negara yang bertujuan.
<b>paspor</b>	: surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri.
<b>protokol</b>	: surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan atau persetujuan.
<b>public service</b>	: pelayanan umum.
<b>raprisal</b>	: upaya pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara telah melakukan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
<b>reputasi</b>	: perbuatan, tingkah laku, sebagai sebab mendapat nama baik.
<b>resolusi</b>	: putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat atau musyawarah yang berupa pernyataan tertulis.
<b>retorsi</b>	: tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah dahulu melakukan beberapa tindakan yang tidak bersahabat.
<b>sistem</b>	: suatu rangkaian yang bulat dan utuh yang terdiri dari komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing menurut pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
<b>sistem politik</b>	: suatu tata cara untuk mengatur/mengolah bagaimana memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan dalam negara.
<b>statuta</b>	: anggaran dasar suatu organisasi.
<b>stereotype</b>	: berprasangka buruk pada suku bangsa lain.
<b>terorisme</b>	: penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu.
<b>transparan</b>	: terbuka.
<b>transparansi</b>	: keterbukaan.
<b>universal</b>	: umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia); bersifat seluruh dunia yang berlaku untuk semua bahasa.
<b>validitas</b>	: keabsahan.
<b>yudikatif</b>	: kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang.
<b>yurisdiksi</b>	: kekuasaan mengadili: lingkup kuasa kehakiman / peradilan (lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu)

# Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2003. **Dasar-dasar Ilmu Tata Politik**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budiyanto. 2003. **Dasar-dasar Ilmu Tata Negara SMU untuk kelas 3**. Jakarta: Erlangga
- Budiman, Arief. 1995. **Teori Pembangunan Dunia Ketiga**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Depdiknas. 2003. **Kurikulum Berbasis Kompetensi**. Depdiknas. Jakarta
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1997. **Kamus Besar Bahasa Indonesia** Jakarta. Balai Pustaka
- Haryati, Sri. 2000. **Pengantar Tata Hukum Indonesia**. Surakarta: UNS Press
- Junaedi. 2002. **Kamus Politik Populer**. Jakarta: Madani
- Kaelan. 2001. **Edisi Reformasi: Pendidikan Pancasila**: Yogyakarta: Paradigma
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesan. 1983. **Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara**. Bandung: Alumni
- Maron, Rafael Raga. 2001. **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta: Rineka Cipta
- Rosyda, Dede. 2003. **Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani**. Jakarta: Prenada Media
- S, Pamudji. 1994. **Perbandingan Pemerintahan**. Jakarta: Bumi Aksara
- Sanit, Arbi. 2002. **Sistem Politik Indonesia**. Jakarta . Raja Grafindo Persada
- Sadriman, Poernomo. 1990. **Pengantar. Hukum Internasional**. Bandung: Mandar Maju
- Situni, Whisnu. 1989. **Identifikasi dan Reformasi Sumber-Sumber Hukum Internasional**. Bandung: Mandar Maju
- Suryono, Edy. 1998. **Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia**. Bandung: Remaja Karya
- Suseno, Franz Magnis. 1997. **Mencari Sosok Demokrasi**. Jakarta. Gramedia
- Tsani, Burhan. 1990. **Hukum dan Hubungan Internasional**. Yogyakarta: Liberty
- Tunggal, Hadi Setia. 2000. **UU Nomer 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri**. Jakarta: Harvarindo
- Tasrif. 1987. **Hukum Internasional**. Jakarta: CV Abardin
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik**. Jakarta: Citra Umbara
- Wagimin, Ign. 2002. **Pengaruh Motivasi dan Kemampuan terhadap Prestasi Kerja dalam Jurnal Paedagogia Jilid. 5 No. 1, Februari 2002**. Surakarta: FKIP UNS

www.politikita.com diakses tanggal 1 Januari 2010.  
suarakarya.com diakses tanggal 23 Agustus 2010.  
one. indoskripsi.com diakses tanggal 1 Januari 2010.  
id. wikipedia.org diakses tanggal 1 Januari 2010.  
bilikdemokrasi.org diakses tanggal 5 Januari 2010.  
kompas.com diakses tanggal 5 Januari 2010.  
islamkuno.com diakses tanggal 5 Januari 2010.  
harianjoglosemar.com diakses tanggal 6 Januari 2010.  
www.ginanjat.com diakses tanggal 6 Januari 2010.  
transparansi.oi.id diakses tanggal 6 Januari 2010.  
www.sigittfahrudin.co.cc diakses tanggal 6 Januari 2010.  
www.mediaindonesia.com diakses tanggal 6 Januari 2010.  
jurnal.bil.ac.id.pdf diakses tanggal 6 Januari 2010.  
okezone.com diakses tanggal 10 Januari 2010.

# Indeks

## A

agresi 215  
agresor 215  
aklamasi 215  
akuntabilitas 215

## B

blokade damai 215

## D

deklarasi 215  
demokrasi 215  
desentralisasi 215  
diplomasi 215  
diplomat 215

## E

eksekutif 215  
eksistensi 215  
ekstradisi 215  
embargo 215  
entitas 215  
etnosentrisme 215

## G

good governance 215  
governance 215  
government 215

## H

hierarkis 215

## I

ideologi 215  
imperialisme 216  
intervensi 216  
investor 216

## K

kaula 216  
keadilan 216  
kediktatoran 216  
klaim 216  
kolonialisme 216  
kolusi 216  
kongres 216  
konsensus 216  
konsiliasi 216  
konvensi 216  
korupsi 216  
krisis 216

## L

legislatif 216

## M

mediasi 216  
misi 216  
mixed political 216

## N

negosiasi 216  
nepotisme 216

## O

orientasi 216  
otonomi daerah 216

## P

parlemen 217  
partai politik 217  
partisipasi politik 217  
paspor 217  
political culture 216  
politik 217  
protokol 217  
public service 217

## R

raprisal 217  
reputasi 217  
resolusi 217  
retorsi 217

## S

sistem 217  
sistem politik 217  
statuta 217  
stereotipe 217

## T

terorisme 217  
transparan 217  
transparansi 217

## U

universal 217

## V

validitas 217

## Y

yudikatif 217  
yurisdiksi 217



# Kunci Jawaban

## BAB 1 : BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

### A. Pilihan Ganda

- |      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 1. a | 6. d  | 11. b | 16. b |
| 2. b | 7. e  | 12. d | 17. b |
| 3. b | 8. a  | 13. c | 18. a |
| 4. a | 9. a  | 14. d | 19. d |
| 5. d | 10. e | 15. a | 20. e |

### B. Uraian

- Elemen pola budaya politik Indonesia adalah:
  - Dualisme kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang mengutamakan kedinamisan (konflikual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi.
  - Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang mengutamakan keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemandirian militer-sipil dalam proses sosial politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru.
  - Dualisme implikasi masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia.
- Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dimengerti oleh para anggota suatu sistem politik.
- Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum,
  - perasaan seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjur-penganjur kebijakan
  - perasaan seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal itu.
  - perasaan seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak, kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang memiliki pengaruh,
  - penilaian seseorang terhadap norma-norma berpolitik.

4. Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu keyakinan dan nilai agama Islam. Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas. Karenanya, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan Islam sebagai salah satu budaya politik yang cukup mewarnai kebudayaan politik di Indonesia. Orientasi budaya politik yang mendasarkan pada nilai agama Islam mulai tampak sejak para pendiri bangsa membangun negeri ini.
5. Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
  - a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
  - b. Tingkat ekonomi masyarakat yaitu makin tinggi tingkat ekonomi atau kesejahteraan masyarakat maka partisipasi masyarakat pun makin besar.
  - c. Reformasi politik/*political will* yaitu semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik.
  - d. Supremasi hukum yaitu adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas.
  - e. Media komunikasi yang independen di mana media tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri.
6. Dalam bukunya yang berjudul *Culture and Socialization*, David F. Aberle mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan, motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan baik sekarang maupun yang berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
7. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik.
8. Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung program-program pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
9. Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik, yaitu:
  - a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap,
  - b. warga negara biasa (preman) bukan pejabat,
  - c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah,
  - d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak,
  - e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak.

10. Dari sejarah politik Indonesia krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:
  - a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijaksanaan politik yang diambil oleh suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan bati dengan sebagian rakyat.
  - b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan.
  - c. Ketidakacuhan (apatis) yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi.
  - d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan masyarakat menjadi terganggu.

## **BAB 2: BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI**

### **A. Pilihan Ganda**

- |      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 1. a | 6. a  | 11. b | 16. b |
| 2. c | 7. c  | 12. c | 17. b |
| 3. d | 8. c  | 13. c | 18. b |
| 4. a | 9. b  | 14. c | 19. b |
| 5. c | 10. e | 15. a | 20. b |

### **B. Uraian**

1. Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan tersebut antara lain:
  - a. kebebasan untuk berpendapat,
  - b. kebebasan untuk membuat kelompok,
  - c. kebebasan untuk berpartisipasi,
  - d. kesetaraan antarwarga,
  - e. saling percaya,
  - f. kerja sama.
2. Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari dominasi salah satu lembaga atas lembaga yang lain. Beberapa fakta sejarah mencatat bahwa kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif hingga mampu menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat
3. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya

4. Terwujudnya kedaulatan rakyat, menjadi ciri kehidupan bernegara yang demokratis. Kehidupan bernegara yang demokratis, merupakan arah yang hendak dicapai dalam perubahan di bidang politik. Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, diperlukan terciptanya masyarakat madani. Kehidupan masyarakat madani ditandai dengan adanya keterbukaan di bidang politik. Kehidupan masyarakat madani juga memiliki tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
5. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya.
6. Reformasi menuntut perubahan dalam semua aspek kehidupan khususnya bidang politik, pemerintahan, ekonomi dan budaya. Masyarakat mengharapkan terwujudnya perubahan total dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang. Terwujudnya kedaulatan rakyat, menjadi ciri kehidupan bernegara yang demokratis.
7. Sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani menurut Zbighiew Rau adalah individualisme, pasar (market), dan pluralisme.
8. civil society mempunyai prinsip pokok pluralis, toleransi, dan hak asasi (human right), termasuk didalamnya adalah demokrasi.
9. Terbentuknya lembaga penegak hukum harus mampu mencerminkan berlakunya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju suatu tatanan masyarakat madani atau *civil society* Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan semangat reformasi. Di dalamnya terkandung semangat untuk mewujudkan ketaatan kepada hukum untuk semua orang dan bukan hanya untuk kepentingan penguasa. Setiap orang sama di depan hukum, sehingga dituntut kedisiplinan yang sama terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Terciptanya perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, mampu menghilangkan diskriminasi di bidang hukum. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga hukum berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial, merupakan karakteristik masyarakat madani.
10. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani antara lain:
  - a. terjadinya krisis perekonomian,
  - b. masih kuatnya perilaku korupsi,
  - c. ancaman disintegrasi bangsa,
  - d. belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia
  - e. belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia,
  - f. kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku,
  - g. rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara,
  - h. kurangnya perangkat hukum,
  - i. rendahnya kesadaran hukum
11. Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah/ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila
12. Isi pokok demokrasi Pancasila adalah:
  - a. Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

- b. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
  - c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.
  - d. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.
13. *Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia*, maksudnya dalam demokrasi Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia
  14. Konservatisme merupakan suatu doktrin yang menghendaki dan mengusahakan terus berlangsungnya situasi dan kondisi yang sudah berlangsung sekian lama (*status quo*).
  15. Terdapat beberapa penyimpangan konstutusi dalam pelaksanaan demokrasi tertpimpin, di antaranya:
    - a. pemusatan kekuasaan di tangan presiden,
    - b. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah,
    - c. pengangkatan presiden seumur hidup,
    - d. rangkap jabatan yang dilakukan presiden,
    - e. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.
    - f. konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis),
    - g. terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan,
    - h. kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis.
    - i. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN seharusnya dibuat oleh MPR.

### BAB 3 : KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN

#### A. Pilihan Ganda

- |      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 1. c | 6. e  | 11. e | 16. a |
| 2. e | 7. c  | 12. b | 17. a |
| 3. a | 8. d  | 13. e | 18. b |
| 4. d | 9. a  | 14. a | 19. c |
| 5. e | 10. b | 15. e | 20. d |

#### B. Uraian

1. Jaminan keadilan tersebut berkaitan dengan hak-hak warga negara untuk mendapat keadilan dari negara. Selanjutnya, jaminan keadilan tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti
  - a. dalam UUD 1945 tercantum pada Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 34,
  - b. Undang-undang Nomor 39 tentang HAM pada Pasal 3 Ayat 2.
2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi interaksi antarwarga negara. Dalam interaksi tersebut, akan ditemukan banyak perbedaan baik itu bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Untuk menjaga hubungan yang baik, maka perlu adanya rasa saling menghargai, menghormati, percaya dan sikap keterbukaan. Dengan sikap keterbukaan tersebut maka diharapkan keadilan yang menjadi dambaan setiap manusia dapat terwujud sehingga jaminan keadilanpun diperolehnya.

3. Menurut pendapat siswa
4. Terciptanya suatu keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah bangsa termasuk bangsa Indonesia. Keadilan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia bukan keadilan yang diperuntukkan oleh sekelompok orang saja atau penguasa, namun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang menjadi dambaan seluruh umat manusia diharapkan mampu memberi jaminan keadilan bagi seluruh warga negara. Jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk dasar negara, undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Jaminan keadilan terkandung dalam Pancasila sila ke-5, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Berpedoman pada sila tersebut, bangsa Indonesia ingin mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara.
6. Media massa berperan menyuarakan kebenaran dalam suatu masalah, memberitakan fakta yang terjadi di masyarakat, menyampaikan masalah kehidupan dan bahkan mendukung program pembangunan pemerintah
7. Berdasarkan asas kepastian hukum, setiap kebijakan penyelenggara negara harus mengutamakan hukum sebagai landasannya. Landasan hukum yang digunakan adalah perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan
8. Asas adil dan merata, artinya bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan usaha bersama dan harus merata diseluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
9. Keterbukaan berkaitan erat dengan komunikasi dan hubungan antarmanusia
10. Jaminan keadilan tersebut harus meliputi segala bidang kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan

## BAB 4 : HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

### A. Pilihan Ganda

- |      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 1. a | 6. b  | 11. a | 16. e |
| 2. e | 7. b  | 12. c | 17. a |
| 3. c | 8. a  | 13. c | 18. e |
| 4. d | 9. e  | 14. a | 19. c |
| 5. a | 10. b | 15. c | 20. b |

### B. Uraian

1. Perjanjian internasional adalah kesepakatan antarnegara dengan tujuan tertentu dengan disertai akibat-akibat hukum tertentu.
2. Perjanjian bilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara  
Perjanjian multilateral, adalah suatu bentuk perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara.
3. Perjanjian yang membentuk hukum (*law making treaties*) yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Perjanjian yang bersifat khusus (*treaty contract*) yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja.

4. Kerja sama internasional harus memerhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
- Posisi geografis**  
Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang dunia. Letak geografis tersebut membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk menghindari dampak negatif yang dapat terjadi, diperlukan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan maupun negara dalam satu kawasan.
  - Sejarah perjuangan**  
Bangsa Indonesia telah merasakan penderitaan panjang selama masa penjajahan. Melalui kerja sama internasional, bangsa Indonesia dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
  - Jumlah penduduk**  
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal kekuatan bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, besarnya jumlah penduduk juga dapat mendatangkan kelemahan-kelemahan dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain. Melalui kerja sama internasional, dapat diupayakan berbagai usaha untuk menanggulangi permasalahan kependudukan yang dihadapi bangsa Indonesia.
  - Kekayaan alam**  
Bangsa Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun tidak semua kekayaan alam dapat diolah sendiri. Keterbatasan teknologi merupakan salah satu kendala yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan bangsa lain untuk mempercepat alih teknologi.
  - Militer**  
Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, membutuhkan penanganan yang lebih rumit dalam hal keamanan. Banyak terjadi pelanggaran perbatasan yang dilakukan bangsa lain. Untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia, diperlukan kekuatan militer, baik personil maupun peralatan. Keterbatasan peralatan perang dapat terpenuhi dengan kerja sama internasional.
  - Situasi internasional**  
Indonesia hidup bertetangga dengan negara lain, baik dengan negara yang berbatasan langsung maupun negara dalam satu kawasan. Situasi yang terjadi di negara tetangga maupun negara dalam satu kawasan, dapat membawa dampak bagi Indonesia. Kerja sama internasional diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif yang terjadi.
  - Kualitas diplomasi**  
Upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara tidak hanya ditentukan dengan kekuatan militer. Kepiawaian para diplomat untuk berdiplomasi dalam forum internasional juga dapat memengaruhi. Para diplomat yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif, dapat menghasilkan diplomasi yang menysasar dan berkualitas.
  - Pemerintahan yang bersih**  
Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain sangat diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Makin baik pemerintahan, maka makin baik penyelenggaraan negara yang dilakukan. Penyelenggaraan negara tersebut juga berkaitan dengan upaya menjalin hubungan dengan bangsa lain.



- i. **Kepentingan nasional**  
Kepentingan nasional Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pun harus mengabdikan pada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa. Untuk itu, kerja sama internasional yang dilakukan harus mampu mendukung terwujudnya kepentingan nasional.
5. Dalam rangka mewujudkan kerja sama internasional yang sehat, Departemen Luar negeri mempunyai peranan sebagai berikut:
  - a. Berkewajiban membawa aspirasi nasional ke tengah pergaulan antarbangsa.
  - b. Membantu presiden dan bersama-sama dengan aparaturnya melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan berorientasi pada kepentingan nasional.
  - c. Melakukan pengawasan dan menerima laporan pertimbangan, saran, dan pendapat baik diminta maupun tidak mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas perwakilan diplomatik.
  - d. Sebagai perangkat vital politik luar negeri yang mampu mengolah bahan dari semua sumber menjadi rumusan langkah-langkah yang akan ditempuh.
6. Bagi setiap bangsa, pelaksanaan kerja sama internasional diperlukan untuk:
  - a. mewujudkan kepentingan nasional, terutama di bidang politik dan hubungan luar negeri di dalam pergaulan internasional,
  - b. menjalin persahabatan yang lebih erat antara Indonesia dengan negara lain demi terwujudnya ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan perdamaian abadi,
  - c. menempatkan perwakilan di luar negeri,
  - d. mewujudkan kerja sama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
7. Mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional terdapat dua teori yang berkembang, yaitu:
  - 1) **Teori kebulatan suara**  
Persyaratan dalam perjanjian internasional hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian.  
Contohnya:  
Setiap mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, PBB memerlukan kebulatan suara dari seluruh anggota untuk menetapkan.
  - 2) **Teori Pancasila Amerika**  
Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan.  
Contoh:  
Dengan adanya NATO atau AFTA, setiap negara peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang dibentuk tersebut.
8. Berdasarkan konvensi Wina 1969, perjanjian internasional dapat dibatalkan apabila:
  - a. negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya,
  - b. adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat,
  - c. adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian,

- d. terdapatnya penyalahgunaan atau kecurangan, baik melalui kelicikan atau penyuapan,
  - e. adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta,
  - f. bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
9. Kebijakan politik luar negeri adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hubungan negara dengan masyarakat internasional.
  10. Dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia adalah tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV.

## BAB 5 : SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

### A. Pilihan Ganda

- |      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 1. d | 6. c  | 11. a | 16. a |
| 2. b | 7. c  | 12. d | 17. c |
| 3. b | 8. a  | 13. d | 18. a |
| 4. d | 9. e  | 14. e | 19. c |
| 5. e | 10. d | 15. d | 20. b |

### B. Uraian

1. Pada abad VI SM, kerajaan-kerajaan di India sudah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur oleh adat kebiasaan, yang dinamakan Desa Dharma. Berlakunya hukum di India pada masa sebelum Masehi tertulis dalam Arta Satra Gautamasutra. Kitab ini ditulis oleh Canakya atau Kautilya. Arta Satra Gautamasutra memuat tentang hukum kerajaan dan hukum keluarga, serta hukum kasta. Selanjutnya pada abad V SM muncul undang-undang Manupada. Undang-undang ini memuat tentang hukum kerajaan. Dari kenyataan-kenyataan ini dapat diketahui bahwa pada waktu itu sudah ada hukum internasional yang mengatur hubungan antara raja-raja. Meskipun demikian, hukum yang berlaku pada masa sebelum Masehi belum dapat disamakan persisi dengan hukum internasional pada saat ini.  
Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno sudah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa diplomat atau utusan raja(duta). Demikian juga diatur tentang perjanjian (treaties), hak-hak dan kewajiban raja. Hukum perang waktu itu juga sudah ada dan jelas pengaturannya.sesuai pendapat siswa
2. Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas teritorial negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing sepenuhnya. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas kebangsaan setiap warga negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas kebangsaan mempunyai kekuatan eksteritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warganegaraanya, walaupun berada di negara asing.
3. Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum internasional kepada hukum alam. Hukum alam yang diilhami oleh akal manusia. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Hukum alam banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai sumber hukum internasional
4. Charles Cheny Hyde:  
Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang bagian terbesar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan oleh karena itu, juga dihormati dalam hubungan antara mereka satu dengan yang lain

5. Aliran Mahzab Prancis lahir di abad XX. Pada masa ini, perkembangan hukum internasional makin cepat. Hal tersebut dipengaruhi oleh:
  - a. Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antarnegara
  - b. Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang
  - c. Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global
  - d. Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang.
6. Keistimewaan negara yang tidak dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya tersebut adalah:
  - a. Negara mempunyai kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya.
  - b. Negara menentukan keberadaan subjek hukum internasional lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan perkataan lain negara merupakan entitas dasar dan awal bagi terbentuknya masyarakat internasional
7. Reciprositas, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif.
8. Ratifikasi dapat mengikat dan memaksa negara apabila dilakukan proses:
  - a. pertukaran atau penyimpanan instrumen ratifikasi,
  - b. pemberitahuan mengenai instrumen ratifikasi kepada negara lain atau kepada negara-negara yang bersangkutan,
  - c. penyimpanan perjanjian internasional
9. Ada 3 prinsip yang berlaku sehubungan dengan Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional ini, yaitu:
  - a. Semua negara anggota PBB ipso facto (dalam kenyataannya) adalah anggota/peserta dari Mahkamah Internasional.
  - b. Suatu negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi peserta pada statuta Mahkamah apabila negara tersebut bersedia:
    - 1) Menerima isi ketentuan Statuta Mahkamah Internasional.
    - 2) Menerima dan melaksanakan putusan Mahkamah Internasional.
    - 3) Bersedia memberikan sumbangan keuangan untuk menutup ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.
  - c. Penyerahan suatu sengketa kepada Mahkamah Internasional didasarkan akatan dari kedua belah pihak.
10. Sengketa non justisiabel adalah sengketa yang bukan merupakan sasaran penyelesaian pengadilan. Sengketa non justisiabel sering dikenal sebagai sengketa politik karena hanya melibatkan masalah kebijaksanaan atau urusan lain di luar hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak menggunakan pertimbangan politik. Penyelesaian politik ini ditempuh dengan jalan diplomasi melalui keahlian lobbying dari para diplomatnya.

Diunduh dari BSE.Mahoni.com

# Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas XI

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-675-9 (jil.2.1)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010**.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 18.043,00